

**TRADISI TAKARAN DALAM JUAL BELI BAHAN BAKAR MINYAK  
PERTALITE ECERAN DI KOTA PALANGKA RAYA PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi  
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh :  
**MUHAMMAD ANDRI**  
**150 213 0054**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKARAYA  
FAKULTAS SYARI'AH  
JURUSAN SYARI'AH  
PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
TAHUN 2019 M / 1440 H**

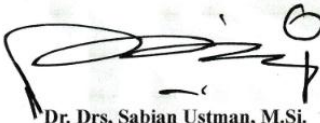
## PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : TRADISI TAKARAN DALAM JUAL BELI  
BAHAN BAKAR MINYAK PERTALITE ECERAN  
DI KOTA PALANGKA RAYA PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI SYARIAH  
NAMA : MUHAMMAD ANDRI  
NIM : 1502130054  
FAKULTAS : SYARIAH  
JURUSAN : SYARIAH  
PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH


Palangka Raya, 06 Mei 2019

Menyetujui,

Pembimbing I

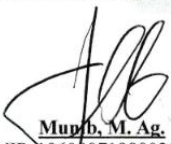
  
**Dr. Drs. Sabian Ustman, M.Si.**  
NIP. 196311091992031004

Pembimbing II


  
**Abdul Khair, M. H.**  
NIP. 196812012000031003

Menyetujui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

  
**Mupb, M. Ag.**  
NIP. 1960071990031002

Ketua Jurusan Syariah

  
**Drs. Surya Sukti, MA**  
Nip. 196505161994021002


## PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : TRADISI TAKARAN DALAM JUAL BELI  
BAHAN BAKAR MINYAK PERTALITE ECERAN  
DI KOTA PALANGKA RAYA PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI SYARIAH  
NAMA : MUHAMMAD ANDRI  
NIM : 1502130054  
FAKULTAS : SYARIAH  
JURUSAN : SYARIAH  
PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

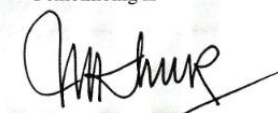
Palangka Raya, 06 Mei 2019

Menyetujui,

Pembimbing I


  
**Dr. Drs. Sabian Ustman, M.Si.**  
NIP. 196311091992031004

Pembimbing II


  
**Abdul Khair, M. H.**  
NIP. 196812012000031003

Menyetujui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

  
**Mupb, M. Ag.**  
NIP. 1960071990031002

Ketua Jurusan Syariah

  
**Drs. Surva Sukti, MA**  
Nip. 196505161994021002

## NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**  
**Sdr. MUHAMMAD ANDRI**

Palangka Raya, 06 Mei 2019

Kepada  
Yth. **Ketua Panitia Ujian**  
**Skripsi IAIN Palangka Raya**

*Assamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh*


Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan perbaikan seperlunya  
maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : **MUHAMMAD ANDRI**  
NIM : **1502130054**  
Judul : **TRADISI TAKARAN DALAM JUAL BELI**  
**BAHAN BAKAR MINYAK PERTALITE ECERAN**  
**DI KOTA PALANGKA RAYA PERSPEKTIF**  
**HUKUM EKONOMI SYARIAH**

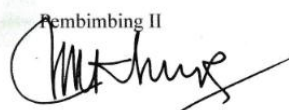
Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Serjana Hukum. Demikian  
atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh*

Pembimbing I

  
**Dr. Drs. Sabian Ustman, M.Si.**  
NIP. 196311091992031004

Pembimbing II

  
**Abdul Khair, M.H.**  
Nip. 196812012000031003

# **TRADISI TAKARAN DALAM JUAL BELI BAHAN BAKAR MINYAK PERTALITE ECERAN DI KOTA PALANGKA RAYA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini muncul karena dilatar belakangi adanya fenomena jual beli bahan bakar minyak pertalite eceran di kota Palangka Raya yang terindikasi adanya ketidak sesuaian dengan aturan Hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan memahami sistem takaran, pelaksanaan akad yang digunakan dan kedudukan hukum dalam praktik jual beli pertalite eceran di Kota Palangka Raya di tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian hukum yang berparadigma kualitatif, data hasil penelitian diperoleh dari pedagang dan pembeli bahan bakar minyak pertalite eceran, Kepala Dinas Perindustriam dan Perdagangan Kota Palangka Raya serta Ulama Kota Palangka Raya. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian teknik pengabsahan data menggunakan tri angulasi teknik dan tri angulasi sumber. Sedangkan teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, dan verivikasi data.

Hasil penelitian diperoleh bahwa, (1) Sistem takaran yang digunakan oleh pedagang bahan bakar minyak pertalite eceran di Kota Palangka Raya adalah menggunakan botol (2) Pelaksanaan akad belum jelas karena hanya sebagian pedagang menggunakan akad, akad yang digunakan adalah akad dengan kalimat “Jual Seadanya, (3) Kedudukan hukum penjualan bahan bakar minyak Pertalite eceran di Kota Palangka Raya ditinjau dari budaya hukum termasuk budaya yang tidak benar dan harus ditinggalkan, ditinjau dari teori keadilan tidak mengandung keadilan bagi para pihak terutama bagi pembeli, ditinjau dari teori perlindungan hukum praktek jual beli seperti ini tidak memiliki kepastian hukum bahkan banyak pelanggaran hak konsumen atas pedagang, ditinjau dari teori transparansi dikatakan belum transparan karena tidak ada sisi keterbukaan dari penjual untuk pembeli, ditinjau dari sisi ‘*Urf* termasuk katagori ‘*urf fāsid* dikarenakan perdagangan ini tidak memenuhi beberapa syarat terbentuknya ‘*urf*, ditinjau dari teori *maslahah* mengandung *maslahah* akan tetapi tidak sesuai dengan hukum Islam karena bertentangan dengan *syara*. Akad dalam jual beli ini belum terbentuk karena tidak terpenuhinya syarat-syarat terbentuknya akad. Sedangkan menurut pandangan ulama kota Palangka Raya bagi pedagang bahan bakar minyak eceran dengan menggunakan botol di perbolehkan asalkan akadnya jelas dan dilakukan di depan serta akad menyebutkan kata botol bukan liter akan tetapi menurut Disperindag praktek jual beli seperti ini dikatakan melanggar hukum karena tidak sesuai dengan undang-undang mengenai metrologi legal yang terkait masalah aturan dalam segi penakaran.

**Kata Kunci: Tradisi Takaran, Jual Beli, Pertalite Eceran**

## **FIELD TRADITION IN SELL FOR RETAIL RETAIL OIL FUEL IN PALANGKA RAYA CITY PERSPECTIVE OF SHARIA ECONOMIC LAW**

### **ABSTRACT**

This research arose because of the background of the phenomenon of buying and selling retail pertalite fuel in the city of Palangka Raya which indicated an incompatibility with the rules of Islamic law. The purpose of this research is to know and understand the dosing system, the implementation of the contract used and the legal position in the practice of buying and selling retail pertalite in the City of Palangka Raya in terms of Sharia Economic Law.

This research is a legal research that has a qualitative paradigm, the research data is obtained from traders and buyers of retail pertalite fuel oil, Head of the Department of Industry and Trade of Palangka Raya City and Palangka Raya City Ulama. Data collection techniques using interview techniques, observation and documentation then the technique of validating data using triangulation techniques and triangulation of sources. While the data analysis technique in this study was conducted with four stages, namely data collection, data reduction, data display, and data verification.

The results of the study show that, (1) The dosage system used by retail pertalite oil fuel traders in Palangka Raya City is using bottles (2) The implementation of the contract is not yet clear because only some traders use contracts, the contract used is a contract with "Selling Potential" , (3) The legal position of the sale of retail Pertalite fuel oil in the City of Palangka Raya in terms of legal culture including culture that is incorrect and must be abandoned, in terms of the theory of justice does not contain justice for the parties, especially for buyers, in terms of the selling practice legal protection theory Buying like this has no legal certainty, even many violations of consumer rights to traders, in terms of transparency theory are said to be not transparent because there is no openness from the seller to the buyer, viewed from the 'Urf including category' urfidid because this trade does not fulfill some conditions of formation 'urf, ditinja u from the theory of maslahah containing maslahah but not in accordance with Islamic law because it is contrary to syara. This contract of sale and purchase has not yet been formed because the conditions for establishing a contract are not fulfilled. Whereas according to the view of the Palangka Raya city cleric for retail oil fuel traders using bottles is permitted provided the contract is clear and carried out in front and the contract states that the word bottle is not liter but according to Disperindag the practice of buying and selling is said to be illegal because it is not in accordance with the law law regarding legal metrology related to regulatory issues in terms of rooting.

**Keywords: Measure Traditions, Buy and Sell, Retail Retail**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya Skripsi yang berjudul Tradisi Takaran Dalam Jual Beli Bahan Bakar Minyak Pertalite Eceran di Kota Palangka Raya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah ini, alhamdulillah akhirnya dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Selanjutnya pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Rektor IAIN Palangka Raya, Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag, sebagai penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan IAIN Palangka Raya.
2. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syariah.
3. Bapak Drs. Surya Sukti, MA selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya yang mana telah mendidik, membimbing, mengajarkan, mengamalkan ilmu ilmunya kepada peneliti.



4. Ibu Hj. Tri Hidayati, M. H, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang selama ini selalu memberikan motivasi dan meluangkan waktu untuk memberikan ilmu dan pelajaran.
5. Bapak Dr. Drs, Sabian Ustman, M.Si, selaku pembimbing I dan Abdul Khair, M.H, selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing serta memberikan motivasi, dukungan dan pelajaran dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Norwili, M.H.I selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan dan masukan selama proses perkuliahan.
7. Bapak Dr. Sadiani, M. H, selaku Dosen Matakuliah Metodologi Penelitian yang membantu memperbaiki Judul Proposal, dan selalu memberikan motivasi.
8. Seluruh dosen IAIN Palangka Raya terkhusus dosen Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, yang telah mendidik dan mengajarkan dengan ikhlas dan sabar.
9. Bapak, Ibu, kakak dan nenek dan adik-adikku yang selalu memberi dukungan baik materil maupun moril.
10. Teman-teman seperjuangan mahasiswa IAIN Palangka Raya, terkhusus teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015 yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
11. Semua pihak yang berpartisipasi dalam pembuatan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.



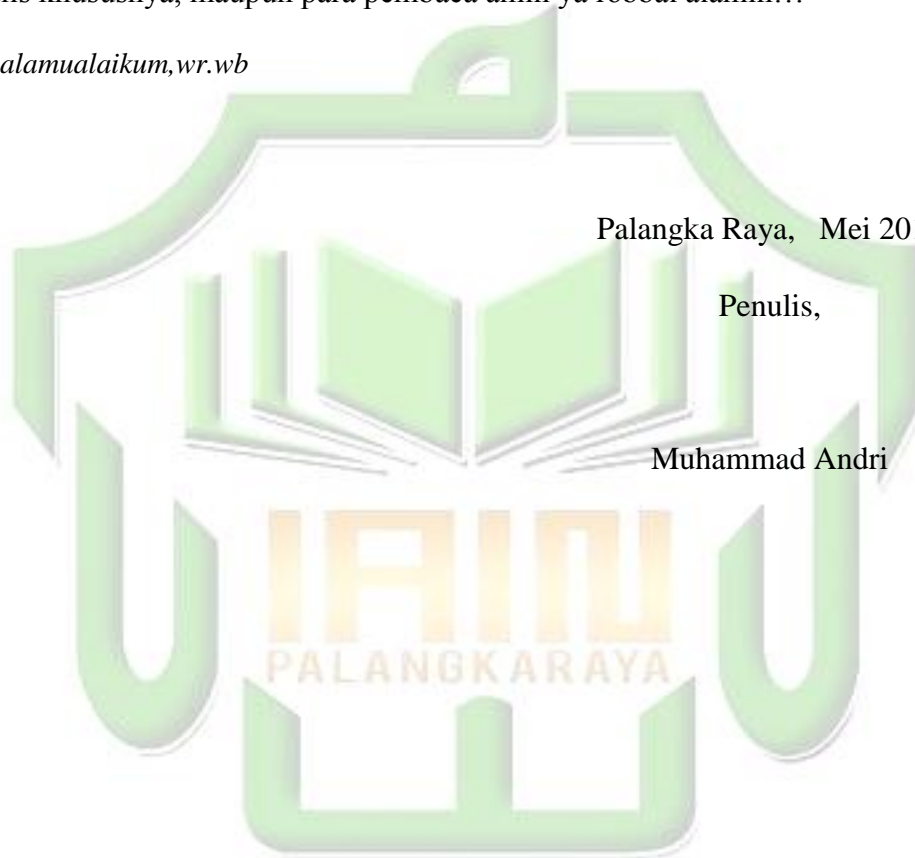
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, oleh sebab itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan untuk memenuhi segala kekurangan yang ada. Akhirnya, kata yang pantas penulis ucapkan semoga apa yang telah penulis laksanakan diridhoi oleh Allah SWT dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, maupun para pembaca amin ya robbal alamin...

*Wassalamualaikum,wr.wb*

Palangka Raya, Mei 2019

Penulis,

Muhammad Andri



## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Andri  
NIM : 1502130054  
Tempat dan Tanggal Lahir : Palangka Raya, 27 September 1997  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“TRADISI TAKARAN DALAM JUAL BELI BAHAN BAKAR MINYAK PERTALITE ECERAN DI KOTA PALANGKA RAYA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH”** ini adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip dan dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, penulis siap untuk menerima sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 06 Mei 2019



*Muhammad Andri*  
Muhammad Andri  
NIM. 1502130054

## MOTTO

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا  
٣٥

*“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*

**(Qs. Al-Is'ra Ayat [17]:35)**



## **PERSEMBAHAN**

*Dengan Mengucapkan:*

الحمد لله رب العالمين

**Ku Persembahkan Karya Kecilku ini Kepada :**

*BAPAKKU TERSAYANG HERMAN*

Bapa yang selalu memberikan perhatian, semangat dan dukungan kepadaku, mencurahkan keringatnya untuk membesarkanku, serta telah banyak pengorbanan dan perjuangan untuk mendidik serta menjagaku sampai sekarang.

*IBUKU TERCINTA SALEHA*

Ibu yang setiap hari memperhatikan dan merawatku dari kecil hingga besar, yang tidak pernah lelah mendoakan di setiap langkahku dan pekerjaanku, memberi semangat dukungan moral dalam setiap apa yang aku kerjakan dan dalam hal penyelesaian skripsi ini.

*SAUDARA KANDUNGKU*

Yang selama ini selalu memberikan dukungan, dorongan semangat bahkan doa yang tak lupa tercurah dan kebaikan baik material maupun non-material dalam perjuangan menyelesaikan perkuliahan.

*NENEK DAN KAKEK*

Yang selama ini tidak pernah lelah selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepadaku demi terselesaikannya studi dan tugasku. Yang selalu berdoa semoga di panjangkan umur dan sehat badan bisa melihat cucu pertamanya wisuda. Dan Insya allah dan Alhamdulillah kakek dan nenek dipanjangkan umur dan bisa melihatku wisuda nantinya.

*KAWAN-KAWAN SEPERJUANGAN HES 2015*

Dan terakhir kawan-kawan seperjuangan HES 2015 yang menjadi kawan bahkan sahabat terbaik dan luar biasa, senyum dan tawa kita ukir bersama dalam Dunia Perkuliahan yang selama ini dijalani. Semoga apa yang kita jalani selama ini menjadi buah keberhasilan bagi diri kita sendiri maupun orang di sekitar kita

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab di tulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

HurufArab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha

د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi

ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	Em
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap**

متعدين	Ditulis	<i>muta' aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

**C. Ta' Marbutah**

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>



(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti solat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliya</i>
---------------	---------	--------------------------

2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	ditulis	A
◌ِ	Kasrah	ditulis	I
◌ُ	Dammah	ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ā</i>
يسعي	Ditulis	<i>yas 'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>Ī</i>
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>Ū</i>
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaulun</i>

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a 'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u 'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

## H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

## I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS .....	iii
PENGESAHAN .....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	x
MOTTO .....	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	2
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Sistematika Pembahasan .....	5
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	7
B. Landaasan Teori .....	10
1. Teori Budaya Hukum.....	10
2. Teori Keadilan.....	11
3. Teori Perlindungan Hukum.....	15
4. Teori Transparansi .....	16
5. Teori Urf.....	19
6. Teori Masalahah.....	21
C. Deskripsi Teoritik.....	24
1. Tinjauan Umum Jual Beli .....	24
2. Tinjauan Khusus Takaran dan Timbangan .....	31
3. Tinjauan Umum Terbentuknya Akad.....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Waktu dan Tempat Penelitian .....	44
C. Pendekatan Objek, dan Subjek Penelitian.....	45
D. Sumber Data.....	46
1. Sumber Data Primer .....	46

2. Sumber Data Sekunder.....	47
E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
1. Wawancara.....	47
2. Observasi.....	49
3. Dokumentasi .....	51
F. Pengabsahan Data .....	53
G. Analisis Hasil .....	53
H. Kerangka Fikir .....	56

#### **BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	57
B. Hasil Penelitian .....	64
C. Analisis Hasil Penelitian .....	100

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	140
B. Saran.....	142

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan salah satu bukti bahwa manusia sebagai makhluk sosial karena di dalam akad jual beli menunjukkan bahwa manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak dapat terlepas dari manusia yang lain. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh *syara'* dan disepakati<sup>1</sup>. Dalam aktivitas jual beli, pihak yang melakukan jual beli harus bersikap jujur dan adil.

Bukti kejujuran dan keadilan dalam jual beli yaitu adanya nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar benar-benar harus diutamakan.<sup>2</sup> Neraca merupakan lambang keadilan dan kebenaran, seperti halnya di dalam Al-Qur'an yang menyuruh supaya menakar dan menimbang dengan jujur mempergunakan takaran yang benar dan neraca yang betul.<sup>3</sup> Dengan demikian, di dalam jual beli harus menerapkan keadilan salah satunya dengan menyempurnakan takaran dan timbangan, tidak mengurangi takaran ataupun timbangan. Terdapat perintah tegas

---

<sup>1</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 68-69.

<sup>2</sup>Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam dalam Perkembangan*, Bandung: Mandar Maju, 2002, h. 169.

<sup>3</sup>Fachruddin, *Ensiklopedia al-Qur'an*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, h. 229.

dalam al-Qur'an maupun Hadis mengenai timbangan yang sepenuhnya dan keadilan dalam menakar, di antaranya terdapat dalam al-Qur'an surat ar-Rahman ayat 9 yang berbunyi:

وَأَقِمْوْا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya: *“Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”*<sup>4</sup>

Oleh sebab itu, setiap muslim harus berusaha sekuat tenaga untuk berlaku adil, sebab keadilan yang sebenarnya jarang diwujudkan. Salah satu benda yang memerlukan takaran adalah bahan bakar minyak (BBM) yang dijual secara eceran diberbagai tempat khususnya di kota Palangka Raya, berbagai macam kemajuan sudah dinikmati salah satunya seperti kemajuan alat transformasi yang berbagai macam dan jenisnya yang marak pada saat ini, baik kendaraan roda dua maupun roda empat bahkan yang lainnya. Sehingga banyak masyarakat yang memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak untuk operasional alat transportasi dengan membeli bahan bakar minyak (BBM) di pedagang eceran dan juga SPBU.

Berdasarkan observasi penulis di Kota Palangka Raya terdapat banyak pedagang bahan bakar minyak eceran. Bahan bakar minyak yang dijual di antaranya, Pertamax, pertalite, solar, dan Bensin. Sistem penjualannya dijual berdasarkan takaran botol, bukan menggunakan takaran liter sebagaimana mereka membelinya di Pom Bensin, kebanyakan dari pembeli mengetahui sistem takaran yang digunakan berdasarkan

---

<sup>4</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989, h. 885.



takaran liter akan tetapi, ada di antara pedagang BBM eceran yang tidak sampai 1 liter. Sehingga ketika terjadinya transaksi si penjual menyebutkan kata, "*Jual Seadanya*" dari praktik ini si penjual dapat di pahami bahwa dia mengetahui apa yang dilakukannya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dia berkata seperti itu.

Fenomena seperti ini dapat ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam (Syariah) karena dapat merugikan konsumen. Menanggapi hal tersebut, pembeli merasa ada yang dirugikan apalagi jika pembelian BBM dalam jumlah lebih dari 1 liter, selain merasa dirugikan, pembeli juga merasa tertolong dengan adanya pedagang BBM eceran mereka tidak perlu mengantri ke SPBU lagi untuk membelinya. Oleh sebab itu penulis merasa tertarik dengan adanya fenomena yang terjadi dan mengangkatnya menjadi judul skripsi.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian mengenai takaran bahan bakar minyak eceran terutama pertalite. dengan judul penelitian "TRADISI TAKARAN DALAM JUAL BELI BAHAN BAKAR MINYAK PERTALITE ECERAN DI KOTA PALANGKA RAYA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH".

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sistem takaran yang digunakan pedagang bahan bakar minyak pertalite eceran di Kota Palangka Raya?

2. Bagaimana pelaksanaan akad penjualan bahan bakar minyak pertalite eceran di Kota Palangka Raya?
3. Bagaimana kedudukan hukumnya dalam praktik penjualan bahan bakar minyak pertalite di Kota Palangka Raya menurut hukum ekonomi syariah ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan memahami sistem takaran yang digunakan yang digunakan pedagang bahan bakar minyak eceran pertalite eceran di Kota Palangkaraya.
2. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan akad yang digunakan pedagang bahan bakar minyak eceran pertalite eceran terhadap konsumennya.
3. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan hokum dalam praktik penjualan pedagang bahan bakar minyak eceran pertalite eceran di Kota Palangka Raya di tinjau dari hukum ekonomi syariah.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada serta dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan studi hukum ekonomi syariah pada umumnya dan khususnya bagi penelitian selanjutnya khususnya dalam hal jual beli BBM eceran sebagai bahan koreksi guna penelitian selanjutnya lebih terarah.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Masyarakat

Menciptakan pengetahuan bagi masyarakat agar memahami tentang Penjualan BBM eceran secara hukum ekonomi syariah.

### b. Bagi *Penjual BBM*

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam jual beli agar dalam melaksanakan bisnis di bidang ekonomi khususnya dalam jual beli BBM eceran dapat menerapkan hukum-hukum yang berlaku seperti tanpa adanya unsur penipuan dan paksaan.

### c. Bagi *Pembeli BBM*

Memberi pengetahuan terhadap pembeli BBM agar dapat mengerti dan memahami tentang akad dan aturan jual beli dalam hukum dan aturan yang berlaku serta bersinergi dengan hukum ek

## E. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran pembahasan yang jelas dalam penulisan skripsi ini. Maka penulisan penelitian ini disusun secara sistematis, yang masing-masing bab mencerminkan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan yaitu sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, telaah pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab II : Kajian pustaka yang memuat berbagai hal yang merupakan landasan teori dari bab berikutnya. Hal-hal yang penulis

kemukakan meliputi telaah pustaka dan penelitian terdahulu, kerangka teori, deskripsi teoritik berupa tinjauan umum jual beli : pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, pengertian akad, Syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*), syarat keabsahan akad (*syuruth ash-shihah*), syarat mengikatnya akad (*syuruth al-huzum*). Tinjauan Khusus : pengertian takaran dan timbangan, dasar hukum takaran dan timbangan, perintah menyempurnakan takaran dan timbangan.

Bab III : Memuat uraian mengenai metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV : Memuat Hasil dan Analisis terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, sistem takaran dalam jual beli bahan bakar minyak pertalite eceran, pelaksanaan akad yang digunakan oleh pedagang bahan bakar minyak pertalite eceran di Kota Palangka Raya dan kedudukan hukum dalam praktik jual beli bahan bakar minyak pertalite eceran ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah

.Bab V : Berisi Penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban dari tujuan penelitian, Sedangkan saran berisikan saran-saran yang di tujukan pada subjek dan instansi terkait.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Adapun beberapa skripsi yang mempunyai hubungan atau hampir sama dengan permasalahan yang akan diangkat penulis antara lain:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Nur Janah dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengurangan Takaran dalam Jual Beli Bensin Eceran di Jalan Medoho Raya Kelurahan Sambirejo Semarang”, di Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang tahun 2012. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengurangan takaran bensin eceran. Di mana penjual telah melakukan kecurangan dalam menakar bensin yaitu tidak memenuhi takaran dan dalam penakarannya tidak menggunakan takaran melainkan menggunakan selang.<sup>5</sup>

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Nurul Janah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tata Niaga BBM (Studi Kasus di SPBU Jetis dan SPBU Bajang)” menjelaskan hasil penelitian tentang akad jual beli BBM di SPBU Jetis dan SPBU Bajang yang menggunakan akad mu’ātāh, isyarat dan tulisan, adanya ketidaktepatan dalam takaran dan

---

<sup>5</sup>Nur Janah, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek Pengurangan Takaran dalam Jual Beli Bensin Eceran di Jalan Medoho Raya Kelurahan Sambirejo Semarang*”, Skripsi, Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2012.

penetapan harga di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dengan tambahan biaya jika konsumen menggunakan wadah atau jerigen.<sup>6</sup>

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Nur Faizah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Takaran Dalam Jual Beli Bensin Eceran (Studi Kasus di Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)” Dalam Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem takaran dalam jual beli bensin eceran di Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara. secara garis besar ada dua sistem yaitu dengan menggunakan alat takar berupa kaleng takar dan dengan memperkirakan pada tolak ukur botol yang telah diberi tanda garis atau titik dengan menggunakan cat.<sup>7</sup>

Untuk memudahkan dalam membedakan penelitian penulis dengan para peneliti terdahulu dapat di lihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian**

No	Nama Peneliti, Judul Dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nur Janah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengurangan Takaran dalam Jual Beli Bensin Eceran di Jalan Medoho Raya Kelurahan Sambirejo Semarang”, tahun 2012.	Sama sama meneliti tentang takaran	Penelitian yang dilakukan oleh Nur Jannah ini adalah meneliti tentang praktek pengurangan takaran dalam jual beli bensin eceran, sedangkan yang akan penulis teliti yakni

<sup>6</sup>Nurul Janah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tata Niaga BBM (Studi Kasus di SPBU Jetis dan SPBU Bajang”, Skripsi Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2009.

<sup>7</sup>Nur Faizah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Takaran Dalam Jual Beli Bensin Eceran Studi Kasus di Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara” tahun 2016.

			dari tradisi takaran dan pelaksanaan akad yang terjadi dalam penjualan Bahan Bakar Minyak eceran lebih spesifik dari bensin meliputi semua bahan bakar yang digunakan pada sekarang
2.	Nurul Janah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tata Niaga BBM (Studi Kasus di SPBU Jetis dan SPBU Bajang)” tahun 2012.	Sama sama meneliti tentang BBM	Penelitian yang dilakukan Nurul Jannah adalah terhadap tata niaga BBM sedangkan yang akan penulis teliti adalah dari Tradisi Takaran dan Pelaksanaan akad yang digunakan oleh pedagang eceran pada umumnya khususnya di Kota Palangkaraya.
3.	Nur Faizah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Takaran Dalam Jual Beli Bensin Eceran (Studi Kasus di Desa Punggulan Kecamatan Punggulan Kabupaten Banjarnegara)” tahun 2016.	Sama sama meneliti tentang takaran	Penelitian yang dilakukan oleh Nur Faizah ini fokusnya hanya pada sistem penakarannya saja tanpa meneliti tentang pelaksanaan akadnya yang dilakukan oleh pedagang eceran sedangkan yang akan diteliti oleh penulis adalah dari dua permasalahan yang terjadi yakni baik dari segi takarannya maupun dari pelaksanaan akadnya.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa yang sangat berbeda dari penelitian yang diteliti penulis adalah dari segi tinjauan hukumnya. Para peneliti terdahulu lebih fokus kepada bagaimana aturan hukum islam



(syariah) terhadap praktik jual beli eceran sedangkan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan terletak pada akad dan takaran yang dilakukan oleh pedagang BBM eceran.

Untuk mencapai tujuan dari penelitian yang dilakukan, penulis melakukan observasi dan penelitian yang semaksimal mungkin serta menggali dari berbagai sumber, sehingga diharapkan akan mendapatkan gambaran mengenai tradisi takaran dalam jual beli bahan bakar minyak pertalite eceran di kota Palangka Raya perspektif hukum ekonomi syariah.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Teori Budaya Hukum**

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalah gunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.<sup>8</sup>

Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat :

*“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.*

---

<sup>8</sup>Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung Nusa Media, 2011 h,8

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansihukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.<sup>9</sup>

Menurut Friedman, “Budaya hukum diterjemahkan sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum dan lembaganya, baik secara positif, maupun negatif. Jika masyarakat mempunyai nilai-nilai yang positif, maka hukum akan diterima dengan baik, sebaliknya jika negatif, masyarakat akan menentang dan menjauhi hukum dan bahkan menganggap hukum tidak ada.”

Teori ini dimaksudkan untuk mengetahui hubungan antara keadaan sosial masyarakat khususnya dalam jual beli bahan bakar minyak eceran pertalite ini, apakah kegiatan tersebut termasuk dalam hukum positif atau negative yang bertentangan di masyarakat. Sehingga dengan teori ini diharapkan mampu memilah kegiatan jual beli yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

## 2. Teori Keadilan

Kata keadilan dalam bahasa inggris yaitu *justice*, yang berasal dari bahasa latin “*iustitia*”. Kata “*justice*” memiliki tiga makna yang berbeda yaitu:

1. Secara atributif berarti suatu kualitas yang adil atau *fair*

---

<sup>9</sup>*Ibid*,

2. Sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman
3. Orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara di bawa ke pengadilan.<sup>10</sup>

Keadilan merupakan suatu tindakan atau putusan yang diberikan terhadap suatu hal (baik memenangkan/memberikan dan ataupun menjatuhkan/menolak) sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, adil asal kata nya dari bahasa arab '*adala*, alih bahasa nya adalah lurus. Secara istilah berarti menempatkan sesuatu pada tempat/aturan nya, lawan katanya adalah zalim/aniyaya (meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya). Untuk bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, kita harus tahu aturan-aturan sesuatu itu, tanpa tahu aturan-aturan sesuatu itu bagaimana mungkin seseorang dapat meletakkan sesuatu pada tempatnya.<sup>11</sup>

Keadilan merupakan perkataan yang diagungkan dan di idamkan oleh setiap orang di manapun mereka berada. Keadilan sering dikaitkan dengan salah satu bidang pranata kehidupan yaitu hukum. Hukum dan keadilan adalah dua hal yang berjalan beriringan dan tidak dapat dipisahkan. Hukum dibuat dan ditetapkan adalah agar orang yang berada dibawah naungan hukum tersebut menikmati dan merasakan keadilan.

Individu diperbolehkan mengembangkan hak pribadinya dengan syarat

---

<sup>10</sup>Dr.Muhammad Syukri Albani Nasution dkk, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta:, Kencana, 2016 , h.308

<sup>11</sup>*Ibid*,

tidak mengganggu kepentingan masyarakat. Jadi, keadilan merupakan sesuatu yang wajib ditegakkan karena dalam al-Qur'an tentang keadilan banyak sekali disebutkan. Agama Islam sangat menjunjung tinggi nilai keadilan baik itu dalam dunia perekonomian.

Keadilan juga dapat berarti suatu tindakan yang tidak berat sebelah atau tidak memihak ke salah satu pihak, memberikan sesuatu kepada orang sesuai dengan hak yang harus diperolehnya. Bertindak secara adil berarti mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan yang salah, bertindak jujur dan tepat menurut peraturan dan hukum yang telah ditetapkan serta tidak bertindak sewenang-wenang.

Keadilan pada dasarnya terletak pada keseimbangan atau keharmonisan antara penuntutan hak dan menjalankan kewajiban. Berdasarkan segi etis, manusia diharapkan untuk tidak hanya menuntut hak dan melupakan atau tidak melaksanakan kewajibannya sama sekali. Sikap dan tindakan manusia yang semata-mata hanya menuntut haknya tanpa melaksanakan kewajibannya akan mengarah pada pemerasan atau perbudakan terhadap orang lain.

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan. Termuat dalam (QS. An-Nisaa 4:58)

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.<sup>12</sup>

Dalam Al-Quran Surat an-Nisaa ayat 135 juga dijumpai perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menjadi penegak keadilan, yaitu:

﴿ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tau kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi

<sup>12</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta:PT Senergi Pustaka Indonesia, 2012, h. 113.

saksi, maka ketahuilah Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.(Q.S. An-Nisa': 135)<sup>13</sup>

### 3. Teori Perlindungan Hukum

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi.

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>14</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>15</sup>

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang

<sup>13</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: PT Senergi Pustaka Indonesia, 2012, h.131

<sup>14</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, h. 53

<sup>15</sup>*Ibid*, h. 69

respresif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>16</sup>

Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra bahwa hukum dapat didifungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.<sup>17</sup>

Teori ini memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Sama halnya dalam jual beli khususnya dalam jual beli bahan bakar minyak eceran harus adanya tujuan-tujuan hukum serta kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis (lisan) dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

#### **4. Teori Transparansi**

Transparansi adalah keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas atas pertanggung jawaban pemerintah dalam sumber daya yang di percayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Dalam Teori transparansi yang terkait dengan penelitian ini yakni bentuk transparan

---

<sup>16</sup>*Ibid*, h. 54

<sup>17</sup>Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung : Remaja Rusdakarya, 1993 h.118



dari seorang penjual dengan menggunakan tiga asas, yakni asas keadilan, asas keridhaan dan asas kejujuran’.

a. Asas Keadilan

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proporsional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa setiap orang atau warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada setiap orang porsi sesuai dengan prestasinya. Keadilan komutatif memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya, dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar dan menukar barang dan jasa.<sup>18</sup>

Dalam hal ini seorang penjual harus bersikap adil dalam hal penjualan BBM eceran tersebut khususnya dalam sistem takaran apakah takaran tersebut sudah pas dan sesuai dengan aturan yang ada

---

<sup>18</sup>L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1996, h.11-12

ataukah sebaliknya. perlu adanya penekanan dalam hal takaran serta menumbuhkan rasa keadilan.

b. Asas Keridhaan

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa dirugikan. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi salah satu pihak merasa rugi, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal. Seperti yang sudah terdapat dalam dalil ushul fiqh

الْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ الْمُتَعَاقِدِينَ وَنَتِيجَتُهُ مَا إِتَرَ مَا هُ بِاتِّعَا قُدْ

Artinya “Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang dilakukan.”<sup>19</sup>

c. Asas Kejujuran

Dalam hal ini seorang penjual harus memiliki sifat keterbukaan dan jujur kepada pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli yang dilakukan tersebut dengan pertimbangan bahwa masing-masing pihak yang terlibat mempunyai hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh.

Teori ini digunakan untuk menganalisis takaran dalam jual beli BBM eceran tersebut karena transparansi dibangun atas dasar arus

---

<sup>19</sup>Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, h,23.

informasi yang bebas. Seluruh proses jual beli yang terjadi antara pihak yang terlibat penjual maupun pembeli kiranya perlu diinformasikan secara transparansi dan jelas agar mudah dimengerti dan dipahami dengan menjunjung tinggi asas keadilan, asas keridhaan, dan asas kejujuran.

## 5. Teori 'Urf

Kata 'urf berasal dari kata 'arafa, ya'rifu( عرف-يعرف ) sering diartikan dengan “ al-ma'ruf” ( المعروف ) dengan arti: “sesuatu yang dikenal”.<sup>20</sup> Kata 'Urf secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”.<sup>21</sup> Secara terminologi yaitu kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan atau perbuatan.<sup>22</sup> 'Urfialah apa-apa yang saling diketahui oleh manusia dan diam mempraktekannya, baik perkataan, atau perbuatan, atau meninggalkan.<sup>23</sup>

Sapiudin Shidiq dalam bukunya *Ushul Fiqh* mendefinisikan 'Urf ialah kebiasaan yang sudah mendarah daging dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat.<sup>24</sup> Sedangkan menurut Miftahul Arifin dan Faishal Hag dalam bukunya *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam* dengan mengutip dari Abdul Wahhab Khallaf memberikan definisi sebagai berikut:

<sup>20</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2009, h. 387.

<sup>21</sup>Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005, h. 153.

<sup>22</sup>NazarBakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2003, h. 236.

<sup>23</sup>*Ibid.*

<sup>24</sup>Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011, h. 262.

Bahwasannya *'Urf* itu ialah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. *'Urf* disebut juga adat kebiasaan.<sup>25</sup>

Sebenarnya hakikat adat dan *'urf* itu adalah sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus menerus sehingga diterima keberadaannya di tengah umat.

Sama halnya dengan teori budaya hukum di atas teori ini juga dimaksudkan untuk mengetahui hubungan antara tradisi takaran dalam jual beli bahan bakar minyak pertalite eceran dengan *Urf* atau kebiasaan yang terjadi di masyarakat apakah sesuai dengan aturan ataupun sebaliknya.

Ditinjau dari segi jangkauannya *'urf* dapat dibagi 2 yaitu:

a. *Al-'Urf al-Am*

Yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Misalnya, membayar onkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh dan hanya dibatasi oleh jarak tempuh maksimum.

b. *Al-'Urf al-Khash*

Yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja. Misalnya kebiasaan

---

<sup>25</sup>MiftahulArifin dan Faisal Hag, *UshulFiqhKaidah-KaidahPenetapanHukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 1997, h. 146.

masyarakat +tertentu yang menjadikan kuitansi sebagai alat bukti yang sah, meskipun tanpa disertai dengan dua orang saksi.

Ditinjau dari absahannya, al-urf dapat pula dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

c. *Al-‘Urf ash-Shahihah* (‘urf yang absah)

Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum islam. Dengan kata lain ‘urf yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi yang halal, atau sebaliknya. Misalnya, dalam jual beli dengan cara pemesanan, pihak pemesan memberi uang muka atau panjar atas barang yang dipesannya.

d. *Al-‘Urf al-Fasidah* (Urf yang rusak/salah)

Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dan dalil-dalil syara’. Sebalik dari *Al-‘Urf ash-Shahihah* (‘urf yang abash), maka adat kebiasaan yang salah adalah yang menghalalkan hal-hal yang haram. Misalkan, kebiasaan berciuman antara wanita dan laki-laki yang bukan mahramnya dalam acara pertemuan pesta.<sup>26</sup>

## 6. Teori *Maṣlaḥah*

Maṣlaḥah secara definitif terdapat perbedaan rumusan di kalangan ulama yang kalau dianalisis ternyata hakikatnya adalah sama. Pandangan beberapa ulama tentang maṣlaḥah adalah sebagai berikut:

a. Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *maṣlaḥah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan

---

<sup>26</sup>Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Amzah, 2014). h. 209

mudarat (kerusakan), namun hakikat dari *maṣlaḥah* adalah Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum).

- b. Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi al-Ghazali di atas, yaitu: Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia. Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi al-Ghazali dari segi arti dan tujuannya karena menolak kerusakan itu mengandung arti menarik kemanfaatan, dan menolak kemaslahatan berarti menarik kemudaratannya.
- c. Al-'Izz ibn 'Abdi as-Salam dalam kitabnya, *Qawa'id al-Aḥkam*, memberikan arti *maṣlaḥah* dalam bentuk hakikinya dengan "kesenangan dan kenikmatan." Sedangkan bentuk majazinya adalah "sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan." Arti ini didasarkan bahwa pada prinsipnya ada empat bentuk manfaat, yaitu: kelezatan dan sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya.

Berdasarkan dari beberapa definisi tentang *maṣlaḥah* dengan rumusan yang berbeda, yang dimaksud dengan *maṣlaḥah* adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, h. 345-346.

*Maṣlaḥah* sebagai *ḥujjah* (sumber hukum), pada umumnya ulama lebih dahulu meninjaunya dari segi ada atau tidaknya kesaksian syara' (*syahādah asy-syar'i*) terhadap *maṣlaḥah*, baik kesaksian tersebut bersifat mengakui/melegitimasinya sebagai *maṣlaḥah* ataupun tidak. Dalam hal ini jumhur ulama membagi *maṣlaḥah* kepada tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- a. *Maṣlaḥah* yang terdapat kesaksian syara' dalam mengakui keberadaannya. *Maṣlaḥah* ini menjelma menjadi landasan dalam *qiyas*(analogi), karena ia sama dengan *al-munasib* ('illah yang merupakan *maṣlaḥah*) dalam pembahasan *qiyas*. Semua ulama sepakat menyatakan bahwa *maṣlaḥah* ini merupakan *ḥujjah* (landasan hukum). *Maṣlaḥah* ini disebut dengan *maṣlaḥah almu'tabaroh*.
- b. *Maṣlaḥah* yang terdapat kesaksian syara' yang membatalkannya/ menolaknya. *Maṣlaḥah* kedua ini adalah batil (tidak dapat menjadi *ḥujjah*) karena bertentangan dengan nas. *Maṣlaḥah* ini disebut dengan *maṣlaḥah almulgah*.
- c. *Maṣlaḥah* yang tidak terdapat kesaksian syara', baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya dalam bentuk nas tertentu. *Maṣlaḥah* ini disebut dengan *maṣlaḥah al-mursalah*.<sup>28</sup>

Ada tiga syarat dalam menggunakan *maṣlaḥah* sebagai *ḥujjah* (sumber hukum), yaitu: 1) kemaslahatan itu haruslah yang hakiki, bukan berdasarkan persangkaan belaka, yakni bahwa penetapan hukum

---

<sup>28</sup>Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, cet. ke-2, 2011, h. 316.



berdasarkan kemaslahatan itu haruslah benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudaratannya; 2) kemaslahatan itu haruslah bersifat universal, bukan kemaslahatan individual, yakni bahwa penetapan hukum itu bermanfaat bagi orang banyak atau dapat menghilangkan bahaya yang menimpa orang banyak; dan 3) penetapan kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan hukum atau dasar yang telah ditetapkan oleh nas atau ijma.<sup>29</sup>

Teori ini dimaksudkan untuk menganalisis akad dalam jual beli BBM eceran. Dengan demikian, akan tercermin apakah penjualan tersebut sesuai dengan prinsip *maṣlaḥah* dan akan mendatangkan suatu kemaslahatan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Selain itu, *maṣlaḥah almursalah* sebagai derivasi (turunan) teori *maṣlaḥah* penulis gunakan untuk menganalisis praktik dalam jual beli BBM eceran tersebut.

### C. Deskripsi Teoritik

#### 1. Tinjauan Umum Jual Beli

##### a. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan akad umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan atau minuman misalnya, terkadang ia tidak mau memenuhi kebutuhan

---

<sup>29</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, diterjemahkan oleh Faiz el Muttaqin dengan judul “Ilmu Uṣūl Fikih: Kaidah Hukum Islam, Jakarta: Pustaka Amani, cet. ke-9, 1977, h. 113-114. Lihat juga Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, cet. ke-2, 2008, h. 152-153.

itu dengan sendirinya, tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli.<sup>30</sup>

Secara bahasa, jual beli (*al-bai'*) bermakna pertukaran (*al-mubadalah*). Lafazh *al-bai'* dan *al-syira* memiliki kesamaan makna dan salah satunya bisa digunakan untuk menyebut yang lain. Adapun dalam makna keagamaan, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang lain secara suka rela tanpa paksaan atau perpindahan kepemilikan dengan ganti yang disetujui.<sup>31</sup> Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1457 dan 1458 disebutkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang sudah diperjanjikan. Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai kata sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya.<sup>32</sup>

#### **b. Dasar Hukum Jual Beli**

Karena jual beli merupakan kebutuhan *doruri* dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli, maka Islam menetapkan kebolehan nya sebagaimana dinyatakan dalam

---

<sup>30</sup>Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008. H. 69

<sup>31</sup>Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta Timur, Pustaka Al-Kausar, 2004. h.750

<sup>32</sup>Tim Permata Press, *Burgelijk Wetboek, KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA*, PERMARA PRESS, 2010. h. 342

banyak keterangan al-Qur'a dan Hadis Nabi maupun ijma Ulama.<sup>33</sup> Adapun dasar hukum dibolehkannya jual beli yakni sebagai berikut

1) Q.S An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا  
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>34</sup>

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, di antaranya, melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara' seperti halnya melakukan transaksi berbentuk riba (bunga), melakukan transaksi yang bersifat spekulatif (maisir, judi) ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar (adanya *uncertainty*/resiko dalam transaksi) serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu.

<sup>33</sup>Drs. Ghufroon A. Mas'adi, *FIQH MUAMALAH KONTEKSTUAL*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2002. h.120

<sup>34</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta:PT Senergi Pustaka Indonesia, 2012, h. 107

Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi. Dalam kaitannya dengan transaksi jual beli, transaksi tersebut harus jauh dari unsur bunga, spekulasi ataupun mengandung unsur *gharar* di dalamnya. Selain itu ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi dilaksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak. Dalam transaksi jual beli harus terdapat kerelaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.<sup>35</sup>

## 2) Q.S Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:...Sesungguhnya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba.<sup>36</sup>

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam AlQ-ur'an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah dalam Al-Qur'an, dan menganggapnya identik dan sama dengan sitem ribawi. Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum serta menolak dan melarang konsep ribawi. Allah adalah dzat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Jika suatu

<sup>35</sup>Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, H. 70

<sup>36</sup>KementrianAgama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta:PT Senergi Pustaka Indonesia, 2012, h, 58

perkara terdapat kemaslahatan dan manfaat maka Allah periintahkan untuk melaksanakannya. Dan sebaliknya jika di dalamnya terdapat kerusakan dan kemudharatan maka Allah melarang dan mencegah untuk melakukannya. Berdasarkan ketentuan ini, kontrak jual beli mendapat pengakuan dan legalitas dari syara' dan sah untuk dioperasikan dalam praktik transaksi jual beli.

### 3) Q.S Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ  
فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ  
الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ  
قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.<sup>37</sup>

Ayat di atas merujuk pada keabsahan menjalankan usaha guna mendapatkan anugerah Allah. Menurut riwayat Ibnu Abbas dan Mujahid, ayat ini diturunkan untuk menolak anggapan bahwa menjalankan usaha dan perdagangan pada musim haji merupakan perbuatan dosa, karena musim haji adalah saat-saat untuk

<sup>37</sup>KementrianAgama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta:PT Senergi Pustaka Indonesia, 2012, h, 38

mengingat Allah (dzikir). Ayat ini sekaligus memberikan legalisasi atas transaksi ataupun perniagaan yang dilakukan pada musim haji.

Allah SWT mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha dalam rangka mendapatkan anugerah Allah. Dalam konteks akad jual beli, antara kedua belah pihak menjalankan usaha dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena pada dasarnya manusia pada hakikatnya saling membutuhkan, dengan demikian legalitas operasionalnya mendapatkan pengakuan dari syara.

- 4) Dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda,

حدثنا العباس بن الوليد بيعا الدمشقي حدثنا مروان بن محمد حدثنا  
عبد العزيز بن محمد عن داود بن صالح المدني عن أبيه قال  
سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه و  
سلم

: - إنما البيع عن تراض في الزوائد إسناده صحيح ورجاله  
موثقون رواه ابن حبان في صحيحه قال الشيخ الألباني : صحيح

“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka” (H.R. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah)<sup>38</sup>

Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ibnu Majah ini merupakan dalil atas keabsahan jual beli secara umum. Menurut Wahbah Zuhaili, hadis ini terbilang hadis yang panjang, namun

<sup>38</sup>Dalam kitab Sunan Ibnu Majah, Bab jual beli khiyar, juz 2, h.737

demikian hadis ini mendapatkan pengakuan kesahihannya dari Ibnu Hibban. Hadis ini memberikan prasyarat bahwa akad jual beli harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi.

- 5) Ulama muslim sepakat (ijma') atas kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak dapat diberikan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan.<sup>39</sup>

### **c. Rukun dan Syarat Jual Beli**

Jual beli dilakukan dengan ijab dan kabul.<sup>40</sup> Sesuatu yang kecil dikecualikan dari ketentuan ini. Di dalamnya tidak harus ada ijab kabul, tetapi cukup dilakukan dengan saling menyerahkan barang atas dasar rela sama rela. Hal ini dikembalikan pada tradisi dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam ijab kabul tidak ada lafazh-lafazh tertentu yang digunakan karena yang menentukan dalam akad adalah tujuan dan makna bukan pada lafazh dan struktur. Yang menjadi sandaran dalam jual ini adalah kerelaan untuk melakukan pertukaran dan ungkapan yang menunjukkan pengambilan dan pemberian kepemilikan, seperti perkataan penjual, "Aku telah menjual", "aku serahkan", "Bayarkan

---

<sup>39</sup>Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 73



harganya” dan perkataan pembeli, “Aku telah membeli”, “Aku telah mengambil”, “Aku telah menerima”, “Aku telah rela”.<sup>41</sup>

Rukun jual beli menurut madzhab Hanafiyah, rukun yang terdapat dalam jual beli hanyalah *sighat*, yakni pernyataan ijab dan qabul yang merefleksikan keinginan masing-masing pihak untuk melakukan transaksi. Berbeda dengan mayoritas ulama (jumhur ulama) rukun yang terdapat dalam jual beli terdiri dari *akid*<sup>42</sup>, *ma'qud 'alaih*<sup>43</sup>, dan *sighat*.<sup>44</sup>

Dalam jual beli harus terpenuhi beberapa syarat agar menjadi sah. Di antara syarat-syarat ini ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad dan ada yang berkaitan dengan barang yang akan diakadkan, yaitu harta yang harus dipindahkan dari salah satu pihak kepada pihak lain, baik penukar maupun barang yang dijual.<sup>45</sup>

## 1. Tinjauan Khusus Takaran dan Timbangan

### a. Pengertian Takaran dan Timbangan

Takaran adalah alat yang digunakan untuk menakar. Dalam aktifitas bisnis, takaran (*al-kail*) biasanya dipakai untuk mengukur satuan dasar ukuran isi barang cair, makanan dan berbagai keperluan lainnya. Kata lain yang sering juga dipakai untuk fungsi yang sama adalah literan timbangan (*al-wazn*) dipakai untuk mengukur satuan berat. Timbangan adalah suatu macam alat ukur yang diberikan

<sup>41</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah*, h.35

<sup>42</sup>*Akid* adalah subjek/ Penjual atau pembeli yang terlibat dalam suatu transaksi

<sup>43</sup>*Ma'qud 'alaih* adalah Harga dan objek yang akan ditransaksikan

<sup>44</sup>Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 74

<sup>45</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah*, h.37

perhatian untuk benar-benar dipergunakan secara tepat dan benar dalam perspektif ekonomi syariah.

Mengurangi timbangan dan takaran adalah mengurangi ukuran atau jumlah barang yang di timbang atau di takar. Misalnya dalam penakaran BM eceran yang seharusnya 1 liter tetapi dikurangi dari 1 liter. Tidakan seperti ini adalah tindakan curang yang seharusnya dijaui. Perbuatan ini adalah kebohongan kepada pembeli. Kejujuran sangat ditekankan karena kejujuran kunci dari kebersihan hidup kebohongan-kebohongan yang hanya akan menjerumuskan ke dalam neraka.

Perbuatan mengurangi takaran dan timbangan akan menghilangkan kepercayaan dari orang lain. Ini sangat merugikan. karena ketika kepercayaan dari orang lain sudah tidak ada, maka akan mendapatkan kesulitan, hidup haruslah bergandengan, ketika orang tidak percaya lagi maka kita akan tersisih dan selalu di anggap curang walaupun suatu ketika kita tidak curang. Untuk itulah Allah sangat menekankan perbuatan jujur karena jujur akan selalu membawa pada kebaikan-kebaikan.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup>Asep Subhi Dan Ahmad Taufik. 2004. *101 Dosa-dosa Besar*. Jakarta: Qultum Media. h, 52-53.

## b. Dasar Hukum Takaran dan Timbangan

### 1) QS Asy Syu'ara : 181-183

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴾ ﴿ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ  
 الْمُسْتَقِيمِ ﴾ ﴿ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ  
 مُفْسِدِينَ ﴾

*Artinya:* “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”<sup>47</sup>

**Tafsiran QS. As-Syuara Ayat 181:** Jika kalian berjualan, maka takarlah pembelian mereka dengan sempurna, dan janganlah kalian merugikan hak mereka sehingga kalian memberikannya dalam keadaan kurang. Kemudian jika kalian membeli, maka ambillah seperti jika kalian menjual.

**Ayat 182:** Timbanglah dengan timbangan yang lurus dan adil. Serupa ini disajikan di dalam surat al-muthaffifin, disertai dengan peringatan

**Ayat 183:** Janganlah kalian banyak mengadakan kerusakan di muka bumi, seperti membunuh, memerangi, menyamun, merampas dan sebagainya. Setelah melarang mereka melakukan semua itu, selanjutnya syu'aib menakut-nakuti mereka dengan kemakmuran

<sup>47</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: PT Senergi Pustaka Indonesia, 2012, h, 526.

allah yang maha perkasa, yang telah menciptakan mereka dan orang-orang sebelum mereka, yang lebih kuat dan lebih sombong dibanding mereka.<sup>48</sup>

Setelah memerintahkan bersikap adil kepada Allah dengan mengesakannya dilanjutkan dengan perintah berlaku adil kepada manusia, antara lain dengan menyatakan: Dan janganlah kamu kurangi takaran dan jangan juga timbangan dan yang ditimbang, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, yakni mampu menyenangkan dan tidak berkekurangan, sehingga tidak ada dalil sedikitpun bagi kamu bila terus mempersekutukan Allah dan berlaku tidak adil. Sesungguhnya Rasulullah Saw Sangat membenci umatnya yang berbuat zalim dan memakan harta orang lain. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Surah Al Israa ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “penuhilah takaran apabila kalian menakar dan timbanglah dengan jujur dan lurus, yang demikian itu lebih baik dan sebaik-baiknya kesudahan.” (QS. Al- Isra ayat 35).<sup>49</sup>

Sabda Rasulullah SAW:

<sup>48</sup>Ahmad mustafa al maragi .1993 .*Terjemah Tafsir Al-Maraghi* 19. TOHA PUTRA: SEMARANG h. 184.

<sup>49</sup>KementrianAgama RI,*Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta:PT Senergi Pustaka Indonesia, 2012, h. 389.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: - عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ - رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’, ra: bahwasanya nabi Muhammad SAW, ditanya: apa pencarian yang lebih baik? Beliau menjawab: ialah amal usahanya seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih. (H.R. Al-Bazar dan disahkan oleh Hakim)<sup>50</sup>

Sabda Rasulullah SAW:

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

أَنَّهُ يُخَدَعُ فِي الْبُيُوعِ، فَقَالَ: إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي: ٣٤ كِتَابِ الْبُيُوعِ: ٤٨ بَابُ مَا يَكْرَهُ مِنَ الْخِدَاعِ فِي الْبَيْعِ

Artinya: “ Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, ada seseorang bercerita kepada Rasulullah SAW bahwa dirinya ditipu dalam jual beli, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berjual beli, maka katakanlah tidak boleh ada penipuan” (H.R. Muttafa’alaih).<sup>51</sup>

Dari hadits di atas dapat diambil suatu pemahaman bahwasannya jual beli yang tidak bersih atau terdapat unsur penipuan dilarang oleh Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pedagang yang melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang akan mendapat balasan di akhirat kelak dimana setelah

<sup>50</sup>Dalam kitab Bulughul Marram, Bab syarat-syarat dan larangan dalam jual beli, Juz 1, h.292.

<sup>51</sup>Dalam kitab, Al-lu’lu wal marjan, Bab Larangan jual beli sesuatu yang belum Nampak baiknya, juz 1, h.478.

mereka dibangkitkan kembali setelah kematian. Oleh sebab itu setiap pedagang hendaknya berhati-hati dalam melakukan penakaran dan penimbangan agar terhindar dari azab Allah SWT.

## 2) Perintah Menyempurnakan Takaran dan Timbangan

Perintah Allah untuk menyempurnakan takaran dan timbangan dengan adil berlaku bagi diri sendiri dan bagi orang lain.

Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan di hadapan hukum harus diimbangi dengan keadilan. Tanpa pengimbangan tersebut, keadilan sosial kehilangan makna. Dengan keadilan ekonomi, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing masing kepada masyarakat. Setiap individupun harus terbebas dari eksploitasi individu lainnya. Islam dengan tegas melarang seorang muslim merugikan orang lain.<sup>52</sup>

Islam dengan kesempurnaan, kemuliaan dan keluhuran ajarannya, memerintahkan umatnya untuk menjalin muamalah dengan sesama atas dasar keadilan dan keridhaan.

Syaikh asy-Syinqithi rahimahullah mengatakan, “bahwasannya, Allâh Azza wa Jalla memerintahkan penyempurnaan (isi) takaran dan timbangan dengan adil. Dan menyatakan bahwa siapa saja yang tanpa kesengajaan terjadi kekurangan pada takaran dan timbangannya, tidak mengapa karena

---

<sup>52</sup>Muhammad Syafi’i Antonio. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. h. 15.

tidak disengaja”. Dan bahwasannya juga, Allâh Azza wa Jalla menyebutkan bahwa memenuhi takaran dan timbangan lebih utama dan lebih baik manfaat.

Teori ini dimaksudkan untuk menganalisis sistem takaran dalam jual beli BBM eceran. Dengan demikian, akan tercermin apakah penjualan tersebut sesuai dengan prinsip jual beli dan akan mendatangkan suatu manfaat tanpa ada unsur penipuan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

#### **c. Tinjauan Umum Terbentuknya Akad**

Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad (perjanjian) yang sah dan mengikat haruslah terpenuhi rukun akad dan syarat akad. Syarat akad dibedakan menjadi empat macam, yaitu

##### **1) Syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*)**

Masing-masing rukun (unsur) yang membentuk akad di atas memerlukan syarat-syarat agar unsur itu dapat berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat dimaksud, rukun akad tidak dapat membentuk akad. Dalam hukum Islam, syarat-syarat dimaksud dinamakan syarat-syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*). Rukun pertama, yaitu harus memenuhi dua syarat terbentuknya akad, yaitu tamyiz dan berbilang (*at-ta'addud*). Rukun kedua, yaitu pernyataan kehendak, harus memenuhi dua syarat juga, yaitu adanya persesuaian ijab dan kabul, dengan kata lain tercapainya kata sepakat, dan kesatuan majelis akad. Rukun



ketiga, yaitu objek akad, harus memenuhi tiga syarat, yaitu objek itu harus dapat diserahkan, tertentu atau dapat ditentukan, dan objek itu dapat ditransaksikan. Rukun keempat memerlukan satu syarat, yaitu tidak bertentangan dengan syara.

Syarat-syarat yang terkait dengan rukun akad inidisebut syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*). Jumlahnya seperti terlihat dari apa yang dikemukakan di atas, ada delapan macam, yaitu:

- 1) Tamyiz
- 2) Berbilang pihak (*at-ta'adud*)
- 3) Persesuaian ijab dan kabul (kesepakatan)
- 4) Kesatuan majelis akad
- 5) Objek akad dapat diserahkan
- 6) Objek akad tertentu atau dapat ditentukan
- 7) Objek akad dapatditransaksikan (artinya berupa benda bernilai dan dimiliki/*mutaqawwim* dan *mamluk*)
- 8) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara.

Kedelapan syarat ini beserta rukun akad yang disebutkan terdahulu dinamakan pokok (*al-ashl*). Apabila pokok ini tidak terpenuhi, maka tidak terjadi akad dalam pengertian bahwa akad tidak memiliki wujud yuridis syar'i apa pun. Akad semacam ini disebut akad batil. Ahli-ahli hukum Hanafi mendefinisikan akad batil sebagai akad yang menurut syara tidak sah pokoknya, yaitu

tidak terpenuhi rukun dan syarat terbentuknya. Apabila rukun dan syarat terbentuknya akad telah terpenuhi, maka akad sudah terbentuk.

a. Syarat keabsahan akad (*syuruth ash-shihhah*)

Rukun-rukun dan syarat-syarat terbentuknya akad yang disebutkan di atas memerlukan kualitas tambahan sebagai unsur penyempurna. Perlu ditegaskan bahwa dengan memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, suatu akad memang sudah terbentuk dan mempunyai wujud yuridis syar'i, namun belum serta merta sah. Untuk sah nya suatu akad, maka rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut memerlukan unsur-unsur penyempurna yang menjadikan suatu akad sah. Unsur-unsur penyempurna ini disebut syarat keabsahan akad. Syarat keabsahan ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu syarat-syarat keabsahan umum yang berlaku terhadap semua akad atau paling tidak berlaku untuk kebanyakan akad, dan syarat-syarat keabsahan khusus yang berlaku bagi masing-masing aneka akad khusus.

Rukun pertama, yaitu para pihak, dengan dua syarat terbentuknya, yaitu tamyiz dan terbilang pihak, tidak memerlukan sifat penyempurna. Rukun kedua, yaitu pernyataan kehendak, dengan kedua syaratnya, juga tidak memerlukan sifat penyempurna. Namun menurut jumhur ahli

hukum Islam syarat dari rukun kedua ini memerlukan penyempurna, , yaitu persetujuan ijab dan kabul itu harus dicapai secara bebas tanpa paksaan, bilamana terjadi dengan paksaan maka akadnya fasid. Akan tetapi, ahli hukum Hanafi, Zulfar berpendapat bahwa bebas dari paksaan bukan syarat keabsahan, melainkan adalah syarat berlakunya akibat hukum (*syart an-nafadz*). Artinya, menurut Zulfar, akad yang dibuat dengan paksaan adalah sah., hanya saja akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan atau masih tergantung (*maukuf*), menunggu ratifikasi dari pihak yang dipaksa apabila paksaan tersebut telah berlalu. Tulisan ini mengikuti pendapat Zulfar, dan pendapat ini pula yang diikuti oleh banyak KUH Perdata yang bersumber syariah.

Rukun ketiga, yaitu objek akad, dengan ketiga syaratnya memerlukan sifat-sifat sebagai unsur penyempurna. Syarat “dapat diserahkan” memerlukan unsur penyempurna, yaitu bahwa penyerahan itu tidak dapat menimbulkan kerugian (*dharar*) dan apabila menimbulkan kerugian, maka akadnya fasid. Syarat “objek harus tertentu” memerlukan kualifikasi penyempurna, yaitu tidak boleh mengandung unsur *gharar* dan apabila mengandung unsur *gharar* maka akadnya menjadi fasid. Begitu pula syarat “objek harus dapat ditransaksikan” memerlukan unsur penyempurna yaitu harus bebas dari syarat

fasid dan bagi akad atas beban harus bebas dari riba. Dengan demikian, secara keseluruhan aada empat sebab yang menjadikan fasid suatu akad meskipun telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, yaitu, penyerahan yang menimbulkan kerugian, *gharar*, syarat-syarat fasid dan riba. Bebas dari keempat faktor ini merupakan syarat keabsahan akad.

Akad yang telah memenuhi rukunya, syarat terbentuknya dan syarat keabsahannya dinyatakan sebagai syarat yang sah. Apabila syarat-syarat keabsahan yang empat ini tidak terpenuhi, meskipun rukun dan syarat terbentuknya akad telah terpenuhi, akad tidak sah. Akad ini disebut akad fasid. Menurut ahli-ahli hukum Hanafi, akad fasid adalah akad yang menurut syara sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya.

Maksudnya adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya.<sup>53</sup>

Syarat berlakunya akibat hukum (*syuruthan-nafadz*), dan Apabila telah memenuhi rukun-rukunya, syarat-syarat terbentuknya, dan syarat-syarat keabsahannya, maka suatu akad dianggap sah. Akan tetapi, meskipun sudah sah, ada kemungkinan bahwa akibat-akibat hukum akad tersebut belum dapat dilaksanakan. Akad yang belum dilaksanakan akibat

---

<sup>53</sup>Syamsul Anwar, *HUKUM PERJANJIAN SYARIAH Studi tentang teori akad dalam Fikih Muamamalat*, Jakarta, Raja Grafindo, 2007, h.95-101

hukumnya itu, meskipun sudah sah, disebut akad *maukuf* (terhenti/tergantung).

Untuk dapat melaksanakan akibat hukumnya, akad yang sudah sah itu harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum, yaitu adanya kewenangan sempurna atas objek akad dan adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.

b. Syarat mengikatnya akad (*syuruth al-luzum*)

Pada dasarnya, akad yang telah memenuhi rukunnya, serta syarat terbentuknya, syarat keabsahannya dan syarat berlakunya akibat hukum, yang karena itu akad tersebut sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya adalah mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik kembali persetujuannya secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain. Namun ada beberapa akad yang menyimpang dari asas ini dan tidak serta merta mengikat, meskipun rukun dan semua syaratnya telah dipenuhi..

Dalam hal akad, akad-akad yang di dalamnya terdapat salah satu jenis *khiyar* (hak opsi) juga tidak mengikat. Akad itu mengikat apabila di dalamnya tidak ada lagi hak *khiyar*. Bebas dari *khiyar* inilah yang disebut syarat mengikatnya akad (*Syuruth al-luzum*).<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup>*Ibid*, h. 102-105.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian hukum yang berparadigma kualitatif, yakni penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>55</sup>

Karakteristik pokok dalam pendekatan penelitian hukum ini adalah mengutamakan makna, konteks dan perspektif *emik* yang sesuai tabel hidup sosial hukum lokal yang ada dan berproses dilapangan. Dalam hal ini, proses penelitian ini adalah berbentuk siklus, yang mana dalam hal pengumpulan serta analisis data data hukum maupun non hukum berlangsung secara simultan.<sup>56</sup>

Dapat dikatakan bahwa penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, artinya peneliti menganalisis dan menggambarkan penelitian secara objektif dan mendetail untuk mendapatkan hasil yang akurat. Secara teoritis, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu masalah yang ada, yaitu keadaan masalah menurut apa

---

<sup>55</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 6.

<sup>56</sup>Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, cet 1. h.. 383.

adanya pada saat penelitian dilakukan, sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta dengan menganalisis data.<sup>57</sup>

## B. Waktu dan Tempat Penelitian

### 1. Waktu

Waktu melakukan penelitian *Tradisi Takaran Dalam Jual Beli Bahan Bakar Minyak Pertalite Eceran Di Kota Palangka Raya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* dilaksanakan setelah mendapat izin penelitian dari Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, adapun rinciannya sebagai berikut:

**Tabel 3.1**

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (Bulan)					
		I	II	III	IV	V	VI
1	Menyusun proposal	√					
2	Seminar proposal tesis dan Menyusun instrument penelitian		√				
3	Menggali dan menganalisa data penelitian			√	√		
4	Menyusun laporan hasil penelitian					√	
5	Ujian Skripsi						√

### 2. Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Palangka Raya, adapun beberapa alasan penulis memilih Kota Palangka Raya sebagai tempat penelitian di antaranya:

<sup>57</sup>Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 234.



- a. Masalahnya ada dan memungkinkan untuk diteliti.
- b. Permasalahan ini belum ada yang meneliti.
- c. Ada beberapa pedagang eceran yang terindikasi tidak menggunakan takaran yang sesuai dengan standard yang ditetapkan.

### **C. Pendekatan, Objek, dan Subjek Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Nasir pendekatan kualitatif deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek bahkan suatu sistem persepsi atau kelas peristiwa pada masa sekarang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat antara fenomena yang diselidiki.<sup>58</sup> Menurut Moleong pendekatan kualitatif deskriptif adalah menetapkan objek apa adanya sesuai dengan bentuk aslinya, sehingga data yang sesungguhnya dapat diperoleh.<sup>59</sup>

Dari dua sudut pandang M. Nasir dan Moleong cukup memberikan kontribusi pemikiran kepada peneliti dalam menghasilkan data yang akurat, baik secara tertulis maupun secara lisan dari responden dan informan. Sebab pendekatan ini menggambarkan secara apa adanya dengan lugas dan rinci serta berusaha untuk mengungkapkan data tentang Tradisi takaran dalam jual beli Bahan Bakar Minyak eceran di Kota Palangka Raya ( Perspektif Hukum Ekonomi Syariah). Nasir

---

<sup>58</sup>M.Nasir, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999. h. 63.

<sup>59</sup>*Ibid.*,

menambahkan bahwa penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif mempunyai beberapa ciri sebagai berikut:

1. Natural *Setting* yaitu, data dikumpulkan secara langsung dari lingkungan nyata dalam situasi sebagaimana adanya penelitian.
2. Manusia sebagai instrumen (informan), merupakan alat pengumpul data utama.<sup>60</sup>

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah Akad/Takaran dalam penjualan Pertalite eceran. Sedangkan Subjek dalam penelitian ini adalah Penjual BBM pertalite eceran dengan kriteria sebagai berikut:

3. Beragama Islam
4. Sudah berjualan BBM eceran selama 5 tahun
5. Menjual BBM eceran dengan menggunakan takaran botol (bukan Pertamina)
6. Penjual BBM yang bersedia diteliti

#### **D. Sumber Data**

##### **1. Primer**

Data primer adalah data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata, seperti hasil wawancara.<sup>61</sup> Menurut Abdulkadir Muhammad data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data, jadi bukan hasil olahan orang lain.<sup>62</sup> Senada dengan ungkapan tersebut, H. Zainuddin Ali

---

<sup>60</sup>*Ibid.*,

<sup>61</sup>Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta; Granit, 2004, h.70.

<sup>62</sup>Abdulkadi Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 2004, h. 170.

mendefinisikan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti.<sup>63</sup>

## **2. Sekunder**

Data sekunder adalah data-data Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah dan hasil penelitian dan sebagainya.<sup>64</sup> Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.<sup>65</sup>

## **E. Teknik pengumpulan data**

### **1. Wawancara**

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.<sup>66</sup>

Menurut Moleong wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak: yaitu, pewawancara (orang yang mengajukan pertanyaan) dan diwawancarai (orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan).<sup>67</sup>

---

<sup>63</sup>H. Zainuddin Ali, *metode Penelitian Hukum*, cet. 6, Jakarta; Sinar Grafika, 2015, h. 106.

<sup>64</sup>Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta; PT. Hanindita offset, 1983, h. 56.

<sup>65</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; Universitas Indonesia, 1986, h. 12.

<sup>66</sup>Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, cet 18. h. 135.

<sup>67</sup>*Ibid.*,

Teknik wawancara dalam penelitian pendekatan kualitatif dibagi menjadi tiga kategori, yaitu sebagai berikut:

- a. Wawancara dengan cara melakukan pembicaraan informal ( *informal conversational interview*)
- b. Wawancara umum yang terarah (*general interview guide approach*)
- c. Wawancara terbuka yang standar (*standardized open-ended interview*).

Ditinjau dari penelitian pelaksanaannya maka penulis menggunakan wawancara dengan cara melakukan pembicaraan informal ( *informal conversational interview*), karena pada jenis penelitian ini pertanyaan yang diajukan sangat tergantung pada pewawancara itu sendiri, jadi bergantung pada spontanitas dalam mengajukan pertanyaan kepada terwawancara. Hubungan pewawancara dan terwawancara adalah dalam suasana biasa, wajar, sedangkan pertanyaan dan jawabannya berjalan seperti permbicaraan biasa dalam kehidupan sehari-hari saja.<sup>68</sup>

Melalui tahap wawancara ini, secara umum penulis menggali data tentang:

- a. Bagaimana Sistem takaran takaran yang digunakan yang digunakan pedagang BBM eceran di Kota Palangkaraya.
- b. Bagaimana Pelaksanaan akad yang digunakan pedagang BBM eceran terhadap konsumennya?

---

<sup>68</sup>Lexy j, Moleojonathanng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed revisi. h. 187.

## 2. Observasi

Observasi adalah pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.<sup>69</sup> Observasi atau pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh panca indra. Jadi observasi dapat dilakukan dengan penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap, apa yang dikatakan ini sebenarnya adalah pengamatan langsung. dalam artian penelitian observasi dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, rekaman, gambar dan rekaman suara.<sup>70</sup>

Melalui tahap observasi ini peneliti ingin menggali data proses penjualan dalam jual beli BBM eceran Di palangkaraya sebagai berikut:

- a. Sistem takaran dalam penjualan BBM eceran.
- b. Tata cara mengukur takaran BBM eceran.
- c. Bentuk transparansi atau akad yang dilakukan.

Untuk mendapatkan data data di atas pebeliti merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang akan digunakan dalam teknik wawancara sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan akad penjualan Bahan Bakar Minyak / BBM eceeran di Kota Palangka Raya?

---

<sup>69</sup>Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta, 2008. h. 224.

<sup>70</sup>Suharsimi arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, ed. Revisi., Jakarta, Rineka Cipta, 2002, cet 12. h. 133.

- 1) Apakah bapak/ibu menggunakan akad dalam penjualan BBM eceran ini?
  - 2) Akad apa yang bapak/ibu gunakan?
  - 3) Bagaimana kata-kata akad yang bapak/ibu gunakan?
  - 4) Apakah dengan akad yang bapak/ibu gunakan para pembeli merespon akad tersebut?
- b. Bagaimana sistem takaran yang digunakan pedagang Bahan Bakar Minyak / BBM eceran di Kota Palangka Raya?
- 1) Pelaku Usaha
    - a) Apakah ada standard dalam melakukan penakaran BBM eceran tersebut?
    - b) Standard seperti apa yang bapak/ibu gunakan dalam penakarannya?
    - c) Apakah jumlah takaran bapak/ibu gunakan ini sama takarannya dengan pedagang yang lainnya?
  - 2) Konsumen
    - a) Apakah bapak/ibu mengetahui jumlah volume takaran BBM yang ada di eceran?
    - b) Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap takaran BBM yang ada di eceran?
    - c) Alasan mengapa bapak/ibu mengisi bbm di pedagang eceran?
- c. Bagaimana praktik penjualan Bahan Bakar Minyak / BBM di Kota Palangka Raya di tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah

1) Ulama (MUI)

- a) Apakah penjualan BBM eceran melanggar syariat islam?
- b) Bagaimana pandangan bapak terhadap pratik penjualan BBM eceran?

2) Pemerintah (Dinas Perdagangan)

- 1) Apakah ada syarat dan aturan dalam penjualan BBM eceran di Kota Palangka Raya?
- 2) Apakah ada sanksi dalam praktik penjualan BBM eceran yang mengurangi takaran?
- 3) Pernahkah diadakan razia terhadap takaran BBM eceran di Kota Palangka Raya?
- 4) Pernahkah diadakan Sosialisasi terhadap takaran BBM eceran di Kota Palangka Raya?

**3. Dokumentasi**

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data dalam bentuk dokumen, data yang ingin didapat dan diperoleh dari tehnik ini adalah:

1. Biodata yang valid responden
2. Jumlah Penjual BBM eceran
3. Keadaan Kota Palangkaraya (Letak geografis, luas wilayah, dan jumlah penduduk Kota Palangka Raya).

**F. Pengabsahan Data**

Pengecekan keabsahan data dilakukan untuk menjamin bahwa semua data yang diamati dan diteliti oleh peneliti relevan dengan



sesungguhnya yang ada dalam kenyataan sebenarnya dan memang terjadi, hal ini peneliti lakukan untuk memelihara dan menjamin bahwa data maupun informasi yang berhasil dihimpun dan dikumpulkan itu benar, baik bagi pembaca maupun subjek penelitian yang diteliti sehingga tidak perlu diragukan lagi. Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data sehingga peneliti dapat *me-recheck* temuannya dengan jalan mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, mengeceknya dengan berbagai sumber data, dan memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.<sup>71</sup>

#### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan.<sup>72</sup>

#### 2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berdeda. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti

---

<sup>71</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung; CV. Remaja Rosdakarya, 2004, h.332.

<sup>72</sup>*Ibid* Sugiono, *Metode Penelitian.....*h. 274

bisa menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur. Atau, peneliti menggunakan wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran. Karena itu, triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya. Dengan demikian, jika data itu sudah jelas, misalnya berupa teks atau naskah/transkrip film, novel dan sejenisnya, triangulasi tidak perlu dilakukan.<sup>73</sup>

#### **G. Analisis Data**

Analisis data adalah suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>74</sup> Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat berlangsungnya pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.<sup>75</sup>

Ada beberapa langkah yang perlu ditempuh dalam melakukan penelitian, analisis data penelitian merupakan bagian penting dalam proses penelitian, dengan analisis inilah data yang ada akan tampak manfaatnya,

---

<sup>73</sup>*Ibid*.....

<sup>74</sup>*Ibid.*, h. 103.

<sup>75</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012, Cet xvi. h. 430.

terutama yang menyangkut pemecahan permasalahan penelitian sehingga tercapailah tujuan akhir penelitian.

Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data Collection data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.<sup>76</sup>

Berikut tahapan analisis data, yaitu:

1. Data *Collection* ialah peneliti mengumpulkan data dari sumber sebanyak mungkin mengenai Studi takaran dalam jual beli BBM eceran di Palangkaraya dalam kajian (Hukum Ekonomi Syariah) untuk dapat dibuat menjadi bahan dalam penelitian.
2. Data *Reduction* (Reduksi Data) pengurangan data ialah data yang didapat dari penelitian tentang Studi takaran dalam jual beli BBM eceran di Palangkaraya dalam kajian (Hukum Ekonomi Syariah), setelah dipaparkan apa adanya, maka dianggap tidak pantas atau kurang valid datanya akan dihilangkan atau tidak dimasukkan ke dalam pembahasan, data *Reduction* juga mempunyai arti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.<sup>77</sup>

---

218. <sup>76</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010, Cet. Vi. Hal.

<sup>77</sup>*Ibid.*, h. 95.

3. *Data Display* atau penyajian data ialah data yang didapat dari penelitian tentang Studi takaran dalam jual beli BBM eceran di Palangkaraya dalam kajian (Hukum Ekonomi Syariah) yang dipaparkan secara Ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutup-nutupi kekurangannya, sedangkan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data ini akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.<sup>78</sup>
4. *Conclusions Drawing/Verifying* atau penarikan kesimpulan dan verifikasi ialah melakukan dengan melihat kembali pada reduksi data (pengurangan data) dan *display* (penyajian data) sehingga kesimpulan sebagai jawaban rumusan masalah dengan melihat kembali pada temuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian.<sup>79</sup>

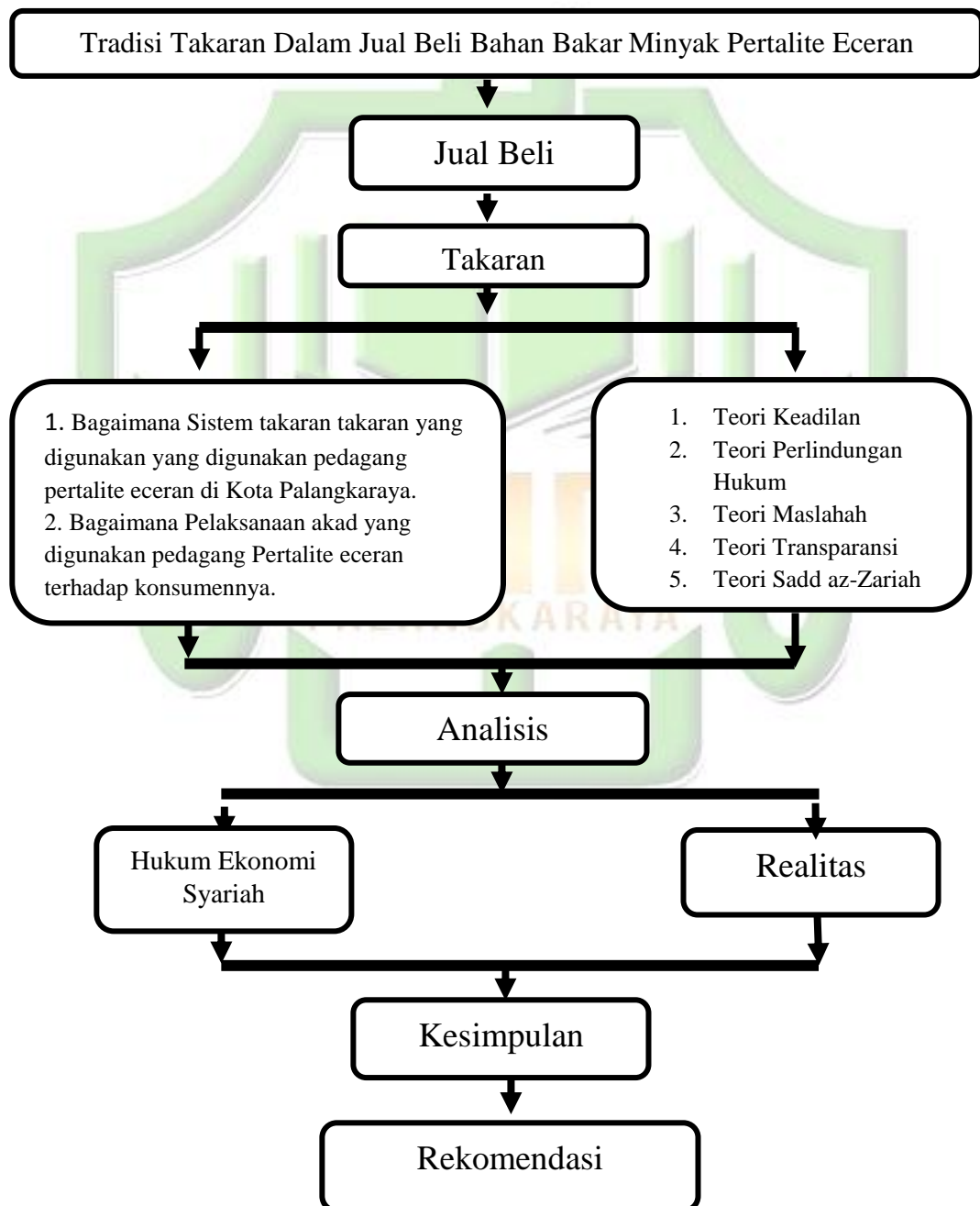
---

<sup>78</sup>*Ibid.*, h. 95.

<sup>79</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*,..., h. 99.

## H. Kerangka Fikir

Dalam kerangka fikir ini peneliti ingin menggambarkan mengenai sistem takaran yang digunakan pedagang BBM eceran di Kota Palangkaraya dan pelaksanaan akad yang digunakan pedagang BBM eceran terhadap konsumennya.



## **BAB IV**

### **HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Palangka Raya**

Terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah melalui proses yang cukup panjang sehingga mencapai puncaknya pada tanggal 23 Mei 1957 dan dikuatkan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 10 tahun 1957, yaitu tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah. Sejak saat itu Provinsi Kalimantan Tengah resmi sebagai daerah otonom, sekaligus sebagai hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan tiang pertama Pembangunan Kota Palangka Raya dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 17 Juli 1957 dengan ditandai peresmian Monumen/Tugu Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah di Pahandut yang mempunyai makna:

- a. Angka 17 melambangkan hikmah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
- b. Tugu Api berarti api tak kunjung padam, semangat kemerdekaan dan membangun.
- c. Pilar yang berjumlah 17 berarti senjata untuk berperang.
- d. Segi Lima Bentuk Tugu melambangkan Pancasila mengandung makna Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian berdasarkan Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 1958 Ibu Kota Provinsi yang dulunya Pahandut berganti nama dengan Palangka Raya.<sup>80</sup>

Sejarah pembentukan Pemerintahan Kota Palangka Raya merupakan bagian integral dari pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, lembaran Negara Nomor 53 berikut penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) Kabupaten dan Palangka Raya sebagai Ibukotanya.<sup>81</sup>

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1959 Nomor: Des. 52/12/2-206, maka ditetapkanlah pemindahan tempat dan kedudukan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dari Banjarmasin ke Palangka Raya terhitung tanggal 20 Desember 1959. Selanjutnya, Kecamatan Kahayan Tengah yang berkedudukan di Pahandut secara bertahap mengalami perubahan dengan mendapat tambahan tugas dan fungsinya, antara lain mempersiapkan

---

<sup>80</sup><https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raya/> diakses 03 Maret 2019.

<sup>81</sup>*Ibid.*



Kotapraja Palangka Raya. Kahayan Tengah ini dipimpin oleh Asisten Wedana, yang pada waktu itu dijabat oleh J. M. Nahan.<sup>82</sup>

Peningkatan secara bertahap Kecamatan Kahayan Tengah tersebut, lebih nyata lagi setelah dilantiknyabapak Tjilik Riwutsebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah pada tanggal 23Desember 1959 oleh Menteri Dalam Negeri, dan Kecamatan Kahayan Tengah di Pahandut dipindahkan ke Bukit Rawi.<sup>83</sup>

Pada tanggal 11 Mei 1960, dibentuk pula Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja PalangkaRaya, yang dipimpin oleh J.M. Nahan. Selanjutnya sejak tanggal 20 Juni 1962 Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya dipimpin oleh W.Coenrad dengan sebutan Kepala Pemerintahan Kotapraja Administratif Palangka Raya.<sup>84</sup>

Perubahan, peningkatan dan pembentukan yang dilaksanakan untuk kelengkapan Kotapraja Administratif Palangka Raya dengan membentuk 3 (tiga) Kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Palangka di Pahandut.
2. Kecamatan Bukit Batu di Tangkiling.
3. Kecamatan Petuk Katimpun di Marang Ngandurung Langit.

Kemudian pada awal tahun 1964, Kecamatan Palangka di Pahandut dipecah menjadi 2 (dua) kecamatan, yaitu:

---

<sup>82</sup>*Ibid.*

<sup>83</sup>*Ibid.*

<sup>84</sup>*Ibid.*

- a. Kecamatan Pahandut di Pahandut.
- b. Kecamatan Palangka di Palangka Raya.

Sehingga Kotapraja Administratif Palangka Raya telah mempunyai 4 (empat) kecamatan dan 17 (tujuh belas) kampung, yang berarti ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan untuk menjadi satu Kotapraja yang otonom sudah dapat dipenuhi serta dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965, Lembaran Negara Nomor 48 tahun 1965 tanggal 12 Juni 1965 yang menetapkan Kotapraja Administratif Palangka Raya, maka terbentuklah Kotapraja Palangka Raya yang Otonom. Peresmian Kotapraja Palangka Raya menjadi Kotapraja yang Otonom dihadiri oleh Ketua Komisi B DPRGR, Bapak L.S. Handoko Widjoyo, para anggota DPRGR, Pejabat-pejabat Departemen Dalam Negeri, Deputy Antar Daerah Kalimantan Brigadir Jendral TNI M. Panggabean, Deyahdak II Kalimantan, Utusan-utusan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan dan beberapa pejabat tinggi Kalimantan Lainnya.<sup>85</sup>

Upacara peresmian berlangsung di Lapangan Bukit Ngalangkang halaman Balai Kota dan sebagai catatan sejarah yang tidak dapat dilupakan sebelum upacara peresmian dilangsungkan pada pukul 08.00 pagi, diadakan demonstrasi penerjunan payung dengan membawa lambang Kotapraja Palangka Raya. Demonstrasi penerjunan payung ini, dipelopori oleh Wing Pendidikan II Pangkalan Udara Republik

---

<sup>85</sup> *Ibid.*

Indonesia Margahayu Bandung yang berjumlah 14 (empat belas) orang, di bawah pimpinan Ketua Tim Letnan Udara II M. Dahlan, mantan paratroop AURI yang terjun di Kalimantan pada tanggal 17 Oktober 1947. Demonstrasi penerjunan payung dilakukan dengan menggunakan pesawat T-568 Garuda Oil, di bawah pimpinan Kapten Pilot Arifin, Copilot Rusli dengan 4 (empat) awak pesawat, yang diikuti oleh seorang undangan khusus Kapten Udara F.M. Soejoto (juga mantan Paratroop 17 Oktober 1947) yang diikuti oleh 10 orang sukarelawan dari Brigade Bantuan Tempur Jakarta. Selanjutnya, lambang Kotapraja Palangka Raya dibawa dengan parade jalan kaki oleh para penerjun payung ke lapangan upacara. Pada hari itu, dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Bapak Tjilik Riwut ditunjuk selaku penguasa Kotapraja Palangka Raya dan oleh Menteri Dalam Negeri diserahkan lambang Kotapraja Palangka Raya.<sup>86</sup>

Pada upacara peresmian Kotapraja Otonom Palangka Raya tanggal 17 Juni 1965 itu, Penguasa Kotapraja Palangka Raya, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, menyerahkan Anak Kunci Emas (seberat 170 gram) melalui Menteri Dalam Negeri kepada Presiden Republik Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan selubung papan nama Kantor Walikota Kepala Daerah Kotapraja Palangka Raya.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup>*Ibid.*

<sup>87</sup>*Ibid.*

## 2. Gambaran Umum Kota Palangka Raya

Secara umum Kota Palangka Raya dapat dilihat sebagai sebuah Kota yang memiliki 3 (tiga) wajah yaitu wajah perkotaan, wajah pedesaan dan wajah hutan. Kondisi ini, memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Palangka Raya dalam membangun Kota Palangka Raya. Kondisi ini semakin menantang lagi bila mengingat luas Kota Palangka Raya yang berada pada urutan ke-3 di Indonesia yaitu 2,687 Km<sup>2</sup>.

## 3. Letak Geografis

Kota Palangka Raya secara geografis terletak pada 113°30'-114°07' Bujur Timur dan 1°35'- 2°24' Lintang Selatan, dengan luas wilayah 2.678,51 Km<sup>2</sup> (267.851 Ha) dengan topografi terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Secara administrasi Kota Palangka Raya berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kabupaten Gunung Mas

Sebelah Timur : Kabupaten Gunung Mas

Sebelah Selatan : Kabupaten Pulang Pisau

Sebelah Barat : Kabupaten Katingan

Wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sabangau, Kecamatan Jekan

Raya, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rakumpit.<sup>88</sup> Yang mana 5 (lima) kecamatan tersebut dibagi dalam 30 (tiga puluh) Kelurahan yaitu :

- a. Kecamatan Pahandut, dibagi dalam 6 (enam) Kelurahan yaitu Kelurahan Pahandut, Kelurahan Panarung, Kelurahan Langkai, Kelurahan Tumbang Rungan, Kelurahan Tanjung Pinang dan Kelurahan Pahandut Seberang.
- b. Kecamatan Jekan Raya, dibagi dalam 4 (empat) Kelurahan yaitu Kelurahan Menteng, Kelurahan Palangka, Kelurahan Bukit Tunggai dan Kelurahan Petuk Katimpun.
- c. Kecamatan Sabangau, dibagi dalam 6 (enam) Kelurahan yaitu Kelurahan Kereng Bangkirai, Kelurahan Sabaru, Kelurahan Kalampangan, Kelurahan Kameloh Baru, Kelurahan Danau Tundai dan Kelurahan Bereng Bengkel.
- d. Kecamatan Bukit Batu, dibagi dalam 7 (tujuh) Kelurahan yaitu Kelurahan Marang, Kelurahan Tumbang Tahai, Kelurahan Banturung, Kelurahan Tangkiling, Kelurahan Sei Gohong, Kelurahan Kanarakan dan Kelurahan Habaring Hurung.
- e. Kecamatan Rakumpit, dibagi dalam 7 (tujuh) Kelurahan, yaitu Kelurahan Petuk Bukit, Kelurahan Pager, Kelurahan Panjehang, Kelurahan Gaung Baru, Kelurahan Petuk Barunai, Kelurahan Mungku Baru dan Kelurahan Bukit Sua.<sup>89</sup>

<sup>88</sup><https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/geografis/> diakses 04 maret2019.

<sup>89</sup>Stanley Adrian, *Profil Kota Palangkaraya*, [Http://beautypalangkaracity.blogspot.co.id/2016/05/demografi-kota-palangka-raya-terdiri.html](http://beautypalangkaracity.blogspot.co.id/2016/05/demografi-kota-palangka-raya-terdiri.html) diakses 04 Maret 2019.

Adapun mengenai luas wilayah, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk Kota Palangka Raya yang terbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

**Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk(per Km<sup>2</sup>) Kota Palangka Raya Tahun 2019**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, 2019

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
1.	Pahandut	119,41	93 894	786
2.	Sabangau	641,47	17 398	27
3.	Jekan Raya	387,53	139 312	359
4.	Bukit Batu	603,16	13 749	23
5.	Rakumpit	1 101,95	3 404	3
<b>Palangka Raya</b>		<b>2 853,52</b>	<b>267 757</b>	<b>61</b>

Demikian gambaran mengenai letak geografis yang meliputi luas wilayah, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk Kota Palangka Raya.

## **B. Hasil Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini tentang Tradisi takaran dalam jual beli bahan bakar minyak eceran pertalite di Kota Palangka Raya perspektif hukum ekonomi syariah, dalam melakukan wawancara peneliti menanyakan berdasarkan format pedoman wawancara atau pertanyaan penelitian yang tersedia

(terlampir), selanjutnya oleh pihak yang diwawancara bahasa yang mereka gunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian antara lain dengan bahasa Indonesia dan juga dicampur dengan bahasa lokal. Untuk penyajian hasil penelitian, peneliti menyajikan data hasil wawancara dengan bahasa Indonesia sepenuhnya, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah penjelasan yang disampaikan oleh para pedagang.

Berikut ini peneliti menyajikan data hasil wawancara dengan para pedagang bahan bakar minyak pertalite eceran di Kota Palangka Raya. Di dalam penelitian ini peneliti mengambil 8 orang pedagang dari tiap kecamatan, dan semuanya terfokus menjual bahan bakar minyak pertalite eceran. Dan peneliti juga menggali data dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Palangka Raya 2 orang dan 1 orang dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya. Lebih jelasnya berikut ini akan peneliti paparkan hasil wawancara yang telah dilakukan, yakni sebagai berikut:

# **1. Sistem takaran yang digunakan pedagang dalam jual beli bahan bakar minyak pertalite eceran di Kota Palangka Raya**

## **a. Pedagang Pertama**

Peneliti melakukan wawancara secara langsung pada tanggal 18 Maret 2019 dengan Bapak RR (47 tahun), di kios beliau yang beralamat di jalan Dr. Murjani (Pahandut). Bapak RR berasal dari suku Banjar beliau adalah pemilik kios sekaligus penjual bahan bakar minyak eceran yang sudah berjualan selama 7 tahun.



Peneliti melakukan wawancara pada pukul 10:30 WIB sampai dengan 12:15. Berikut kutipan wawancara dengan Bapak RR:

“Kadada pang standar takarannya nah, kami bekira-kira ai dalam manakarnya. Mun menakarnya aku pakai takaran selang halus haja pang, ku sedot mulai teng nang ganal tu mbah tu dituangkan ai ke botol yang ada ni. Nah takaran ku ni gin labih pada pada sa liter, amunnya pas saliter tu dibawah pada gulu nya tu. oleh suah aku manakar pakai cuntang yang biasa dipakai urang gasan menakar minyak gas tuh. Aku ngalih mun manakar pakai itu tadua kali hitungannya jadi talalu ribet, yang pasti takaran ku ni samaja lawan takaran urang jua dan labih pada sa litar.”

Terjemah:

“Tidak ada standar takarannya kami menggunakan perkiraan saja. Saya menakar menggunakan selang kecil yag di sedot dari jirigen besar kemudian saya tuangkan ke dalam botol yang ada. Takaran saya ini lebih dari 1 liter, apabila yang pas 1 liter itu pas dibawah dari leher botol tersebut. Saya pernah menakarnya menggunakan takaran baku yang biasa dipakai oleh pedagang minyak tanah. Terlalu ribet menggunakan itu dua kali kerja apabila saya menggunakan itu, saya tuangkan dulu ke takaran itu lalu saya masukkan kedalam botol.”<sup>90</sup>

Hasil wawancara dengan bapak R.R, Dapat diketahui bahwa tidak ada standard atau ukuran yang pasti dalam penakaran bahan bakar minyak pertalite eceran yang beliau gunakan tetapi, sistem takaran yang digunakan adalah menggunakan takaran selang yang disedot dari jirigen besar kemudian dimasukkan ke botol sebagai tempat penyimpanan bahan bakar minyak pertalite eceran dan sekaligus sebagai takaran dalam penjualan dalam jumlah 1 liter atau 1 botol. Dan jumlah takaran yang beliau gunakan disini adalah

---

<sup>90</sup>Wawancara dengan Bapak RR (47 tahun) dikios jalan.dr murjani (pahandut) Palangka Raya, 18 Maret 2019.

lebih dari 1 liter, apabila takaran yang pas dari 1 liter ialah dibawah dari leher botol tersebut, sementara takaran beliau pas sampai full ke leher botol tersebut.dan alasan mengapa beliau tidak mau menggunakan takaran yang pasti (baku) pas 1 liter karena beliau tidak mau kesulitan dalam menakarnya hal tersebut dapat menyebabkan 2 kali kerja.

#### **b. Pedagang Kedua**

Peneliti melakukan wawancara secara langsung pada tanggal 18 Maret 2019 dengan Saudara AH (26 tahun), di bengkel beliau yang beralamat di Jalan G.Obos (Jekan Raya) . Saudara AH berasal dari suku Banjar, beliau adalah pemilik bengkel sekaligus penjual bahan bakar minyak eceran yang sudah berjualan selama 5 tahun. Peneliti melakukan wawancara pada pukul 12:30 WIB sampai dengan 13:15. Berikut kutipan wawancara dengan Saudara AH:

“Kadada standar apa-apa pang nah, aku bekira-kira ai dalam manakar ni. aku ni manakar pakai takaran selang pang, ku isap mulai teng nang ganal tu mbah tu dituangakan ai ke botol . takaran ku gin ni labih pada pada sa liter, amunnya pas saliter tu dibawah pada gulu nya tu. suah aku manakar pakai cuntang yang biasa dipakai urang gasan menakar minyak gas tuh. Aku ni manakar labih pada salitar tu kada papa ja pang, kurang labih aja tuh kan sudah ada jua hujungannya, aku kada manakar pakai cuntang minyak tuh oleh ngalih pang tadua kali gawi hitungannya sudah manakar mbah tu dibuat pulang baasa ke botol, yang pasti takaran ku ni sama ja lawan takaran urang jua dan labih pada sa litar.”

Terjemah:

“Tidak ada, takarannya menggunakan perkiraan saja. Saya menakar menggunakan selang kecil yang di sedot dari jirigen besar kemudian saya tuangkan ke dalam botol. Takaran saya ini lebih dari 1 liter, apabila yang pas 1 liter itu pas dibawah dari leher botol tersebut. Saya pernah menakarnya menggunakan takaran baku yang biasa dipakai oleh pedagang minyak tanah. Tidak, karena selain takarannya bertambah saya juga sudah mendapatkan keuntungan dari harga tersebut. Terlalu ribet menggunakan itu dua kali kerja apabila saya menggunakan itu, saya tuangkan dulu ke takaran itu lalu saya masukkan kedalam botol.”<sup>91</sup>

Dapat diketahui bahwa hasil wawancara dengan saudara A.H, tidak jauh beda dengan bapak RR diatas bahwa tidak ada standard atau ukuran yang pasti dalam penakaran bahan bakar minyak pertalite eceran yang digunakan tetapi, sistem takaran yang digunakan adalah menggunakan takaran selang yang disedot dari jirigen besar kemudian dimasukkan ke botol sebagai tempat penyimpanan bahan bakar minyak pertalite eceran dan sekaligus sebagai takaran dalam penjualan dalam jumlah 1 liter atau 1 botol. Dan jumlah takaran yang beliau gunakan disini adalah lebih dari 1 liter, apabila takaran yang pas dari 1 liter ialah dibawah dari leher botol tersebut, sementara takaran beliau pas sampai full ke leher botol tersebut.

---

<sup>91</sup>Wawancara dengan Saudara AH (26 tahun) dibengkel jalan G.Obos (Jekan Raya) Palangka Raya, 18 Maret 2019.

### c. Pedagang Ketiga

Peneliti melakukan wawancara secara langsung pada tanggal 19 Maret 2019 dengan Ibu RS (38 tahun), di warung beliau yang beralamat di jalan Mahir Mahar Trans Kalimantan (Sabangau). Ibu RS berasal dari suku Banjar Dayak beliau adalah pemilik warung sekaligus penjual BBM yang sudah berjualan bahan bakar minyak eceran selama 6 tahun. Peneliti melakukan wawancara pada pukul 10:00 WIB sampai dengan 10.45 WIB.

Berikut kutipan wawancara dengan Ibu RS:

“Kadada pang, aku menakar pakai corong ai. amun takaran ku ni labih pada pada sa liter, amunnya pas saliter tu dibawah pada gulu botol tu. suah aku manakar pakai cuntang yang biasa dipakai urang gasan menakar minyak gas tuh. Kada rugi pang mun takaran kun i labih salitar aku tergantung sikon jua bejual ni bila tengah malam bisa ku naiki jua haraganya sadikit jadi sudah ada jua hujungannya, Kadada pang orang protes mungkin karena paham aja kalo lah daripada pang kahabisan bensin pas rahatan di jalan tengah malam ha pulang mau kada mau ai inya manukar masalahnya urang banyak tutupan sudah,yah mun haraga kada jua pang talalu banyak aku manaikinya palingan saribu dua ribu ja ku naiki, anggap ja lah hujungan bagadangnya sudah kada beguringan samalaman, aku jadi kada manakar pakai takaran cuntang yang pas salitar tuh Anu tadua kali gawi hitungannya sudah manakar mbah tu dibuat pulang baasa ke botol, yang pasti takaran ku ni sama ja lawan takaran urang jua dan labih pada sa litar pemerataan aja tuh tagantung razaki masing masing ai lagi.”

Terjemah:

“Tidak ada, takarannya menggunakan corong. Takaran saya ini lebih dari 1 liter, apabila yang pas 1 liter itu pas dibawah dari leher botol tersebut. Saya pernah menakarnya menggunakan takaran baku yang biasa dipakai oleh pedagang minyak tanah. Tidak, karena saya

berjualan minyak eceran ini tergantung sikon, harga bisa saya naikkan apabila sudah menjelang tengah malam jadi selain takarannya bertambah saya juga sudah mendapatkan keuntungan dari harga tersebut. Tidak ada yang menegluh karena mungkin sudah paham dan mengerti alasan mengapa saya menaikkan hrganya dikarenakan sudah tengah malam dan juga sebagai upah begadang, dan harganya pun tidak terlalu banyak saya naikkan hanya seribu atau duaribu saja baiklah kita lanjutak ke takaran lagi bu. Terlalu ribet menggunakan itu dua kali kerja apabila saya menggunakan itu, saya tuangkan dulu ke takaran itu lalu saya masukkan kedalam botol, yang pasti takaran saya lebih dari 1 liter dan sama dengan pedagang yang lain katakanlah pemerataan saja. Tinggal tergantung rezeki masing-masing saja lagi.”<sup>92</sup>

Dari Hasil wawancara dengan Ibu RS, Dapat diketahui bahwa tidak ada standard atau ukuran yang pasti dalam penakaran bahan bakar minyak pertalite eceran yang digunakan tetapi, sistem takaran yang digunakan adalah menggunakan takaran corong yang dituangkan langsung dari jirigen kemudian dimasukkan ke botol sebagai tempat penyimpanan bahan bakar minyak pertalite eceran dan sekaligus sebagai takaran dalam penjualan dalam jumlah 1 liter atau 1 botol. Dan jumlah takaran yang beliau gunakan disini adalah lebih dari 1 liter, dengan takaran yang lebih tersebut tidak ada kerugian yang beliau dapat karena beliau berjualan bahan bakar minyak eceran tersebut 24 jam harga pun sewaktu-waktu bisa beliau naikkan apabila menjelang tengah malam, alasan beliau mengapa menaikkan harga karena sebagai upah begadang kata beliau dan tidak pernah

---

<sup>92</sup>Wawancara dengan Ibu RS (38 tahun) dikios jalan Mahir Mahar Trans Kalimantan (Sabangau) Palangka Raya, 19 Maret 2019.

ada orang yang protes mengenai kenaikan harga yang beliau gunakan karena harganya tidak terlalu banyak naiknya hanya seribu atau dua ribu saja dan takaran beliau pun tidak kurang dari satu liter dan sama dengan pedagang yang lainnya.

#### **d. Pedagang Keempat**

Peneliti melakukan wawancara secara langsung pada tanggal 19 Maret 2019 dengan Ibu N (27 tahun), di warung beliau yang beralamat di Jalan Cilik Riwut Km 18. Ibu N berasal dari suku Banjar beliau adalah pemilik warung sekaligus penjual bahan bakar minyak eceran yang sudah berjualan selama 8 tahun. Peneliti melakukan wawancara pada pukul 13:00 WIB sampai dengan 13.45 WIB. Berikut kutipan wawancara dengan Ibu N:

“Kadada standard pang nah, aku menakar pakai selang kadang bisa jua pakai corong ai, Nah amun takaran ku ni pas seliter malahan lebih lagi seliter mun pas di gulu botol tu. karena aku bepacu lawan botolnya tu pang, tu kan botol tu betulisan 1000ml nah berarti pas aja selitar karena kan botol tu gasan wadah penyimpanannya sebelum minyak tu dimasukakakan di tangki kandaraan orang, lawan jua pakai botol ni sudah jadi khalayak umum atau tradisi orang khususnya pedagang eceran ni jadi aku umpat ai jua kaya orang. Amun aku manakar pakai cuntang tu ngalih tadua kali gawi hitungannya sudah manakar mbah tu dibuat pulang baasa ke botol, yang pasti takaran ku ni sama ja lawan takaran urang jua dan labih pada sa litar masalah mengurangi kah atau melabihi kah pada salitar itu tergantung dari pribadi penjualnya ja lagi mun mengurangi kan adaja balasannya dan sama halnya kayatu jua tu mun malabihi insya allah razaki balabih aja tu tarus, tagantung razaki masing masing ai lagi.”



Terjemah:

“Tidak ada standard, takarannya menggunakan selang dan corong. Takaran saya ini pas 1 liter bahkan lebih dari 1 liter, karena saya berpacu pada isi atau muatan botol tersebut kan itu isinya 1000ml, jadi takaran itu memang pas 1 liter, botol itu kan hanya sekedar untuk penyimpanan saja, sebelum dimasukkan ke dalam tangki kendaraan konsumen, dan juga pakai botol sudah jadi khalayak umum dikalangan penjual bbm eceran khususnya dan sudah jadi tradisi banyak orang jadi saya ikut-ikutan saja menggunakan botol. Terlalu ribet menggunakan itu dua kali kerja apabila saya menggunakan itu, saya tuangkan dulu ke takaran itu lalu saya masukkan kedalam botol, yang pasti takaran saya lebih dari 1 liter masalah mengurangi ataupun melebihi takaran itu sudah ada tanggung jawabnya masing-masing kembali ke pribadi pedagang nya saja lagi, mau mengurangi kah sudah pasti ada balasannya, begitu pula dengan melebihi insya allah rezeki pun lebih saja nanti. Tinggal tergantung rezeki masing-masing saja lagi.”<sup>93</sup>

Dari hasil wawancara dengan Ibu N, Dapat diketahui bahwa tidak ada standard atau ukuran yang pasti dalam penakaran bahan bakar minyak pertalite eceran yang digunakan tetapi, sistem takaran yang digunakan adalah menggunakan takaran selang dan corong yang dituangkan langsung dari jirigen kemudian dimasukkan ke botol sebagai tempat penyimpanan bahan bakar minyak pertalite eceran dan sekaligus sebagai takaran dalam penjualan dalam jumlah 1 liter atau 1 botol. Dan jumlah takaran yang beliau gunakan disini adalah pas 1 liter bahkan lebih dari 1 liter, dengan berpacu pada botol yang sudah bertuliskan 1000ml. Dan beliau mengatakan

---

<sup>93</sup>Wawancara dengan Ibu N (27 tahun) diwarung jalan Cilik Km 18Palangka Raya,19 Maret 2019.



mengapa menggunakan botol, karena memang sudah jadi khalayak umum dikalangan penjual bahan bakar minyak pertalite dan sudah jadi tradisi di masyarakat jadi sedikit banyaknya sudah diterima oleh masyarakat. Dan juga dapat diambil hikmah pelajaran dari beliau karena setiap perbuatan pedagang eceran baik dalam mengurangi takaran ataupun melebihi itu sudah ada balasan dan tanggung jawabnya masing-masing.

#### **e. Pedagang Kelima**

Peneliti melakukan wawancara secara langsung pada tanggal 19 Maret 2019 dengan Bapak AM (40 tahun), di warung beliau yang beralamat di Bukit sua (Rakumpit). Bapak AM berasal dari suku Dayak beliau adalah pemilik kios sekaligus penjual bahan bakar minyak eceran yang sudah berjualan selama 8 tahun. Peneliti melakukan wawancara pada pukul 09:00 WIB sampai dengan 10.00 WIB. Berikut kutipan wawancara dengan Bapak AM:

“aku menakar pakai selang kadang bisa jua pakai corong ai. amun takaran ku ni kurang dari seliter. alasan aku mengurangi takaran ni karena kan dalam beusaha ni siapa yang kada handak behujung pasti ai kalo meharap hujungan tu, lawan jua jarak aku meambil minyak ni lumayan jauh, mun kekasongan lumayan jauh dan amun ke palangka lumayan jauh jadi ku kurangi ai dari seliter gasan minta hujungannya ongkos meambil. Amun dari hujungan yang ada ni masih kada sebanding dengan ongkos minyak ku ding ai, makanya ku kurangi ai dari selitar. Ada ai pang orang protes tapi pas ku jelaskan kaya itu paham ai buhannya alasan aku kanapa kada

manakar pakai cuntang tu, anu ngalih mun manakar pakai itu tadua kali gawi hitungannya sudah manakar mbah tu dibuat pulang baasa ke botol, jadi ku pakai yang simple nya ja.”

Terjemah:

”Saya menakar menggunakan selang dan corong. Takaran saya ini kurang dari 1 liter. Karena jarak saya mengambil bahan bakar minyak ini lumayan jauh, apabila ke palangkaraya jauh dan apabila ke kasongan juga jauh maka dari itu saya ingin mendapat keuntungan lebih dari penjualan bbm ini. Keuntungan yang ada masih tidak sebanding dengan ongkos bensin saya mengambil minyak ini. Ada, tetapi setelah saya jelaskan seperti itu dia memakluminya. Saya menakar tidak menggunakan takaran baku karena terlalu ribet menggunakan itu dua kali kerja apabila saya menggunakan itu, saya tuangkan dulu ke takaran itu lalu saya masukkan kedalam botol. Jadi saya memakai yang simplenya saja.”<sup>94</sup>

Dari hasil wawancara dengan Bapak AM, Dapat diketahui bahwa tidak ada standard atau ukuran yang pasti dalam penakaran bahan bakar minyak pertalite ecreeran yang digunakan tetapi, sistem takaran yang digunakan adalah menggunakan takaran selang dan corong yang dituangkan langsung dari jirigen kemudian dimasukkan ke botol. Dan jumlah takaran yang beliau gunakan disini adalah kurang dari 1 liter. Alasan mengapa beliau mengurangi takaran karena jarak beliau mengambil bahan bakar minyak tersebut lumayan jauh, semisal ke palangkaraya membutuhkan bensin yang lebih untuk dapat melangsirnya di pom bensin begitu pula apabila beliau mengambilnya ke kasongan,

---

<sup>94</sup>Wawancara dengan Bapak AM (40 tahun) dikios Bukit Sua (Rakumpit),Palangka Raya,20 Maret 2019.

maka dari itu beliau ingin meraup untung yang lebih dari penjualan minyak eceran tersebut, walau dari segi harga beliau sudah mendapatkan keuntungan tetapi masih tidak sebanding dengan biaya bensin yang beliau gunakan pada saat membeli bahan bakar minyak tersebut di pom bensin. Dan beliau juga mengatakan pernah ada orang protes terkait takaran yang beliau gunakan, tetapi setelah beliau menyatakan demikian konsumen pun dapat memahami dan memakluminya.

#### **f. Pedagang Keenam**

Peneliti melakukan wawancara secara langsung pada tanggal 20 Maret 2019 dengan Bapak SA (42 tahun), di kios beliau yang beralamat di Jalan Rta Milono (Jekan Raya). Bapak SA berasal dari suku Banjar beliau adalah pemilik kios sekaligus penjual bahan bakar minyak eceran yang sudah berjualan selama 6 tahun. Peneliti melakukan wawancara pada pukul 11:00 WIB sampai dengan 11.38 WIB. Berikut kutipan wawancara dengan Bapak SA:

”Kadada standar apa-apa pang nah, aku menakar pakai selang halus ai, ku sedot mulai teng ganal tu mbah tu ku tingir ai ke botol, sabuting dulu jadi contoh sisanya meiringi nang ada ai lagi. amun takaran ku ni pas seliter. Dulu kan aku sempat bejual minyak gas jua, pas raramiannya minyak gas jadi ada aku baisi cuntang nya tu ku coba ai menakar lawan cuntang itu, sakalinya pas salitar, malahan amun ku labihi sadikit kaatas pas di gulu tu berarti labih pada slitar. Amun manakar pakai itu ngalih tadua kali gawi hitungannya sudah manakar mbah tu dibuat pulang baasa ke botol, jadi ku pakai yang praktis nya ja. Dulu pernah ai mengurangi takaran, pas lagi

ngangalihannya minyak jadi ku kurangi ai sadikit pada slitar, dan itupun orang mamakluminya ja karena kan dasar bujur situasinya darurat jua, jadi paham ai buhannya, itu gin aku malngsir liwar ngalih lawan lawas-lawasnya apa orang banyak banar mencari minyak mau kada mau ai jua sorang ni maantri gasan bejual jua.”

#### Terjemah

“Tidak ada standard, takarannya menggunakan selang kecil yang disedpt dari jerigen besar dan dituangkan ke botol, satu dahulu sebagai contoh setelah iyu yang lain mengikuti seperti itu juga. Takaran saya ini pas 1 liter. Dulu waktu saya pernah berjualan minyak tanah, swaktu minyak tanah masih banyak diminati dan diapaki orang, saya punya takaran yang memang pas 1 liter yang saya gunakan untuk menakar minyak tanah tersebut, nah kebetulan pernah saya coba menakar bahan bakar minyak eceran ini menggunakan takaran tersebut dari situ lah saya mengetahui jumlah takaran saya apakah pas 1liter atau kurang, nah apabila saya lebihkan sedikit sampai leher maka takaran tersebut lebih dari 1 liter. Alas an mengapa saya tidak menakar menggunakan takaran baku karena terlalu ribet menggunakan itu dua kali kerja apabila saya menggunakan itu, saya tuangkan dulu ke takaran itu lalu saya masukkan kedalam botol. Jadi saya memakai yang praktis saja. Pernah dulu waktu bahan bakar minyak langka dan susah di cari jadi saya kurangi takaran tersebut dari 1 liter, dan orang pun memaklumi saja karena memang pada saat kondisi dan keadaan yang darurat. Dan saya juga melangsir waktu itu memang sulit dan lama mengantri untuk mendapatkan bahan bakar minyak itu, karena pada saat itu banyak orang yang melangsir untuk menjualnya lagi di eceran.”<sup>95</sup>

Dari hasil wawancara dengan Bapak SA, Dapat diketahui bahwa tidak ada standard atau ukuran yang pasti dalam penakaran bahan bakar minyak pertalite eceran yang dia gunakan tetapi, sistem takaran yang digunakan adalah menggunakan takaran selang yang ditsedot langsung dari jirigen kemudian dimasukkan

<sup>95</sup> Wawancara dengan Bapak SA (42 tahun) dikios jalan Rta Milono (Jekan Raya), Palangka Raya, 20 Maret 2019.

ke botol. Dan jumlah takaran yang beliau gunakan disini adalah pas 1 liter. Beliau pernah menakarnya dengan takaran yang pas 1 liter (baku) pada saat waktu dulu semasih menjual minyak tanah pada saat itu lah beliau mengetahui takara tersebut memang pas 1 liter bahkan apabila beliau naikkan sedikit ke leher botol maka takaran itu lebih dari 1 liter. Alasan mengapa beliau tidak menggunakan takaran itu karena terlalu ribet sehingga menjadi dua kalikerja dalam meakarnya makanya beliau memilih dengan cara yang praktis saja yaitu dengan takaran selang yang disedot kemudian dimasukkan kedalam botol. Dan beliau dulu pernah mengurangi takaran dari 1 liter pada saat bahan bakar minyak langka dan susah di cari makanya takaran tersebut dikurangi dan konsumen pun memahami dan memaklumi karena memang pada saat itu keadaan dan kondisi yang mendesak.

**g. Pedagang Ketujuh**

Peneliti melakukan wawancara secara langsung pada tanggal 21 Maret 2019 dengan Bapak W (43 tahun), di kios beliau yang beralamat di Tangkiling (Bukit Batu) . Bapak W berasal dari suku Banjar Dayak beliau adalah pemilik kios sekaligus penjual bahan bakar minyak eceran yang sudah berjualan selama 7 tahun. Peneliti melakukan wawancara pada pukul 10:30 WIB sampai dengan 11.40 WIB. Berikut kutipan wawancara dengan Bapak W:

“Kada paham jua pang amun standar takaran nih, aku bekira-kira ai dalam manakar ni, aku ni manakar pakai

takaran selang halus haja pang, ku sedot mulai teng nang ganal tu mbah tu dituangkan ai ke botol yang ada ni, amun takaran ku ni labih pada pada sa liter, amunnya pas saliter tu dibawah pada gulu nya tu. Anu suah aku manakar pakai cuntang yang biasa dipakai urang gasan menakar minyak gas tuh. ngalih mun manakar pakai itu tadua kali hitungannya jadi talalu ribet, yang pasti takaran ku ni sama ja lawan takaran urang jua dan labih pada sa litar.”

Terjemah:

“Saya tidak paham juga mengenai takaran yang saya gunakan, takarannya menggunakan perkiraan saja. Saya menakar menggunakan selang kecil yang di sedot dari jirigen besar kemudian saya tuangkan ke dalam botol yang ada. Takaran saya ini lebih dari 1 liter, apabila yang pas 1 liter itu pas dibawah dari leher botol tersebut. Saya pernah menakarnya menggunakan takaran baku yang biasa dipakai oleh pedagang minyak tanah. Terlalu ribet menggunakan itu dua kali kerja apabila saya menggunakan itu, saya tuangkan dulu ke takaran itu lalu saya masukkan kedalam botol, yang pasti takaran saya ini pas bahkan lebih dari satu liter, sama saja dengan pedagang sekitar lainnya.”<sup>96</sup>

Hasil wawancara dengan bapak W, Dapat diketahui bahwa tidak ada standard atau ukuran yang pasti dalam penakaran bahan bakar minyak pertalite eceran yang beliau gunakan tetapi, sistem takaran yang digunakan adalah menggunakan takaran selang yang disedot dari jirigen besar kemudian dimasukkan ke botol sebagai tempat penyimpanan bahan bakar minyak pertalite eceran dan sekaligus sebagai takaran dalam penjualan dalam jumlah 1 liter atau 1 botol. Dan jumlah takaran yang beliau gunakan disini adalah lebih dari 1 liter, apabila takaran yang pas dari 1 liter ialah dibawah

---

<sup>96</sup>Wawancara dengan Bapak W (43 tahun) dikios jalan tangkiling (Bukit Batu), Palangka Raya, 21 Maret 2019.



dari leher botol tersebut, sementara takaran beliau pas sampai full ke leher botol tersebut. dan alasan mengapa beliau tidak mau menggunakan takaran yang pasti (baku) pas 1 liter karena beliau tidak mau ribet karena dengan menggunakan takaran baku atau takaran yang pas itu menyebabkan 2 kali kerja yang menjadi ribet dalam hal penakarannya.

#### **h. Pedagang Kedelapan**

Peneliti melakukan wawancara secara langsung pada tanggal 21 Maret 2019 dengan Bapak AR (40 tahun), di kios beliau yang beralamat di Jalan Dr. Murjani (Pahandut). Bapak AR berasal dari suku Banjar beliau adalah pemilik kios sekaligus penjual bahan bakar minyak eceran yang sudah berjualan selama 12 tahun. Peneliti melakukan wawancara pada pukul 12:00 WIB sampai dengan 12.40 WIB. Berikut kutipan wawancara dengan Bapak AR:

“Kadada standarnya nah, aku menakar pakai selang halus ai, ku sedot mulai teng ganal tu mbah tu ku tuangkan ai langsung ke botol, nah amun takaran ku ni pas seliter. Aku suah menakar pakai cuntang yang dipakai gasan menakar minyak gas tuh. alasan kenapa aku kada manakar pakai itu ribet tabuang buang waktu hitungannya sudah manakar mbah tu dibuat pulang baasa ke botol, kadangkan aku sambil menakar ni sambil ja mealayani orang betukaran nah sekira lakas gawianku tuntung makanya pakai yang praktis nya ja Pernah pang aku mengurangi takaran tapi dulu lawas sudah, pas lagi balum ada saingan beparakan kaya ini pas masih aku sorangan aja bejualan di daerah parak sini, tapi wahini kada lagi dah karena ngalih mun baparakan kaya ini sadikit gin amun kada sama takarannya lawan nang disubalah,



pacangan kasubalah tarus urang, jadi mun sudah sama ni tagantung razaki masing-masing ai lagi.”

Terjemah:

“Tidak ada standard, takarannya menggunakan selang kecil yang disedpt dari jerigen besar dan dituangkan ke botol, satu dahulu sebagai contoh setelah itu yang lain mengikuti seperti itu juga. Takaran saya ini pas 1 liter. Saya pernah menakarnya dengantakaran yang biasa dipakai orang untuk menjual minyak tanah. Terlalu ribet menggunakan itu dua kali kerja apabila saya menggunakan itu, saya tuangkan dulu ke takaran itu lalu saya masukkan kedalam botol. Kadang pada saat saya melakukan penakaran ada orang yang berbelanja otomatis saya melayani orang itu terlebih dahulu, makadari itu saya memakai yang praktis saja. Pernah dulu waktu belum ada saingan berjualan, karena apabila sudah ada pesaing apabila saya mengurangi sedikit saja dari yang disebelah otomatis konsumen pun banyak kesana karena meliat takaran yang berbeda dan memilih yang lebih banyak. Maka saya samakan saja dengan yang di sebelah , setelah takaran sama tinggal rezeki msing-masing saja lagi.”<sup>97</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak AR, Dapat diketahui bahwa tidak ada standard atau ukuran yang pasti dalam penakaran bahan bakar minyak pertalite eceran yang digunakan tetapi, sistem takaran yang digunakan adalah menggunakan takaran selang yang disedot langsung dari jirigen kemudian dimasukkan ke botol. Dan jumlah takaran yang beliau gunakan disini adalah pas 1 liter. Beliau pernah menakarnya dengan takaran yang pas 1 liter (baku) Alasan mengapa beliau tidak menggunakan takaran itu karena terlalu ribet dan banyak

---

<sup>97</sup>Wawancara dengan Bapak AR(40 tahun) dikios jalan Dr. Murjani (Pahandut), Palangka Raya, 21 Maret 2019.

memakan waktu sehingga menjadi dua kali kerja dalam meakarnya makanya beliau memilih dengan cara yang praktis saja yaitu dengan takaran selang yang disedot kemudian dimasukkan kedalam botol. Dan beliau dulu pernah mengurangi takaran dari 1 liter pada saat belum ada saingan dalam berdagang, namun setelah ada saingan beliau menaikkan kembali takarannya agar terjadinya pemerataan antar sesama pedagang

## **2. Pelaksanaan Akad dalam penjualan Bahan Bakar Minyak Peralite eceeran di Kota Palangka Raya**

### **a. Pedagang Pertama**

Pelaksanaan akad penjualan Bahan Bakar Minyak Peralite eceeran di Kota Palangka Raya, menurut wawancara dengan Bapak RR adalah sebagai berikut:

“Sistem akadnya kaya biasa ai ding ai, kaya itu pang mun aku nang beucap, “Jual lah”, “Jual Seadanya” Lalu urang nang menukar tu menyahuti ai jua, “inggih tukar mang, “Inggih sama sama mang” nah kayaitu ai ding ai. kadang jua bisa jua tadahalulu urang nang menukarnya nang beucap akad nya tu, jadi ku sahuti ai jua yang kayaitu. Nah amun orang awal beucap tu macam-macam ding ai, ada yang beucap “selitar” ada jua “sebotol”. Mun urang beucap salitar palingan oh, iih jar ku, karena takaran ku ni labih aja pada salitar, kecuali kurang pada salitar nah itu bisa ja ku melurusakan dan ku jalasakan bahwa itu tu kada salitar tapi seitu pang adanya, nah itu tadi tu pang maksud “jual seadanya” tu, seitu pang adanya, tapi kan takaran ku ni labih sadikit pada salitar jadi aman ja aku kada papa ja pang rasa ku.”

Terjemah:

“Sistem akadnya seperti pada umumnya, kalo dari saya menyebutkan kata “Jual”, “Jual Seadanya”.dan pembeli pun menjawabnya dengan kata,”Iya tukar” Iya sama-sama”, Kadang apabila si pembeli bisa juga berkata terlebih dahulu dari saya lalu saya pun membalas ucapannya dengan kata tadi. Berbagai macam ada yang berkata sebotol ada juga yang berkata seliter, dan ada juga yang berkata hanya satu. Saya sih diam saja, paling tidak saya mengatakan,”oh iya” karena kan takaran saya disini lebih dari 1liter, kecuali takaran saya ini kurang dari seliter, baru saya meluruskan dan menjelaskan bahwa takaran tersebut tidak sampai seliter. Akan tetapi kan takaran saya pas dari 1 liter bahkan lebih, jadi bagi saya tidak apa-apa saja.”<sup>98</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa dalam pelaksanaan akad yang digunakan oleh bapak RR dalam penjualan bahan bakar minyak eceran tersebut menggunakan akad yang memang pada umumnya digunakan dalam jual beli, seperti kata, “Jual, Jual Seadanya, Makasih, Sama-sama”. Dan apabila dalam praktiknya ketika konsumen ingin membeli kata awal yang diucapkan beragam macam bunyinya seperti, “Sebotol,seliter,dan satu.” Dan apabila ada yang mengatakan seliter, beliau pun hanya diam saja dan berkat iya, karena tidak ada masalah dalam takaran beliau bahkan lebih dari 1 liter, kecuali ada pengurangan dalam takaran baru beliau akan meluruskan dan menjelaskan kepada konsumen bahwasanya takaran tersebut kurang . jadi menurut

---

<sup>98</sup>Wawancara dengan Bapak RR (47 tahun) dikios jalan.dr murjani (pahandut) Palangka Raya,18 Maret 2019...

beliau tidak ada permasalahan selagi tidak ada kesalahan atau kejanggalan yang dilakukan.

#### **b. Pedagang Kedua**

Pelaksanaan akad penjualan Bahan Bakar Minyak Pertalite eceran di Kota Palangka Raya, menurut wawancara dengan Saudara AH adalah sebagai berikut:

“Beakad kaya biasa ai, akad jual beli mun aku beucap, “Jual lah”, “Jual Seadanya” urang nang menukar tu menyahuti ai jua, “tukar, “sama sama” Nah amun dari urang nang beucap di awal sebelum manukar tu biasanya mang pas handak menukar tu macam-macam ai, ada yang beucap “selitar” ada jua “sebotol” ada jua “satu aja jar”. Aku ai yang biasa melurusakan oh “sebotol” kah jar ku, iya jar urang kayatu ai.”

Terjemah:

“Sistem akadnya seperti pada umumnya, apabila dari saya menyebutkan kata “Jual”, “Jual Seadanya”.dan pembeli pun menjawabnya dengan kata,”Iya tukar” Iya sama-sama”, bermacam-macam ada yang berkata sebotol ada juga yang berkata selitar, dan ada juga yang berkata hanya satu. Saya meluruskan oh sebotol ya, iya kata konsumen.”<sup>99</sup>

Dari penjelasan Saudara AH dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan akad yang digunakan oleh saudara AH dalam penjualan bahan bakar minyak eceran tersebut menggunakan akad yang memang pada umumnya digunakan dalam jual beli, seperti kata, “Jual, Jual Seadanya, Makasih, Sama-sama”. Dan apabila dalam praktiknya ketika konsumen ingin membeli kata awal yang

---

<sup>99</sup>Wawancara dengan Saudara AH (26 tahun) dibengkel jalan G.Obos (Jekan Raya) Palangka Raya, 18 Maret 2019.

diucapkan beragam macam bunyinya seperti, “Sebotol, seliter, dan satu.” Dan apabila ada yang mengatakan seliter, beliau pun langsung meluruskan dan berkata oh “Sebotol” ya, dan konsumen pun menjawabnya “iya sebotol”.

### c. Pedagang Ketiga

Pelaksanaan akad penjualan Bahan Bakar Minyak Pertalite eceran di Kota Palangka Raya, berdasarkan wawancara dengan Ibu RS adalah sebagai berikut:

“Anu pakai akadnya kaya biasa ai ding ai, kaya itu pang mun aku nang beucap, “Jual lah”, “Jual Seadanya” yang penting kita ni beucap ai dulu karena kan akad tu perlu jua dipakai dalam jual beli ni yakalo, walapun paribasanya urang ada jua nang kada manyahuti tapi kita sudah beucap kan lapas jua sudah yakalo, kadang ada jua nang manyahuti, “inggih tukar, “Inggih sama sama” nah kayaitu ai ding ai. kadang jua bisa jua tadahalulu urang nang menukarnya nang beucap akad nya tu, jadi ku sahuti ai jua yang kayaitu. Nah amun dari urang nang beucap di awal sebelum transaksi tu itu macam-macam ding ai, ada yang beucap “selitar” ada jua “sebotol”.tapi kebanyakan sebotol pang karena kan urang paham aja sudah bahwa yang dipakai ni, pakai takaran botol lain liter, tapi takaran didalam botol ni pas dan bahkan lebih sadaikit pada salitar.”

Terjemah:

“Memakai akadnya seperti pada umumnya, apabila dari saya menyebutkan kata “Jual”, “Jual Seadanya”. Yang penting kita sudah berkata dan berucap masalah orang yang tidak menjawab atau membalas akad kita tadi terserah orang saja, tapi terkadang ada juga si pembeli menjawabnya dengan kata,”Iya tukar” Iya sama-sama”, Kadang apabila si pembeli bisa juga berkata terlebih dahulu dari saya lalu saya pun membalas ucapannya dengan kata tadi, dari konsumen sendiri bermacam-macam ada yang berkata sebotol ada juga yang berkata selitar, tetapi kebanyakan berkata Sebotol karena mungkin

masyarakat sudah memahami bahwa takaran yang digunakan adalah botol bukan liter, dan takaran tersebut pas seliter bahkan lebih sedikit dari seliter.”<sup>100</sup>

Dari hasil wawancara dengan ibu RS diatas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan akad yang digunakan oleh ibu RS dalam penjualan bahan bakar minyak eceran tersebut menggunakan akad yang memang pada umumnya digunakan dalam jual beli, seperti kata, “Jual, Jual Seadanya, Makasih, Sama-sama”. Dan apabila dalam praktiknya ketika konsumen ingin membeli kata awal yang diucapkan beragam macam bunyinya seperti, “Sebotol,seliter.” Kebanyakan dari pembeli berkata sebotol bukan seliter. Karena mungkin sudah mengetahui bahwa takaran yang digunakan adalah takaran botol bukan takaran liter, dan takarannya pun pas seliter bahkan lebih sedikit.

#### **d. Pedagang Keempat**

Pelaksanaan akad penjualan Bahan Bakar Minyak Pertalite eceeran di Kota Palangka Raya, menurut wawancara dengan Ibu N adalah sebagai berikut:

“Makai akad yang kaya biasa ai ding ai, aku nang beucap, “Jual lah”, “Jual Seadanya” Lalu urang nang menukar tu menyahuti ai jua, “tukar”. “sama sama” nah kayaitu ai ding ai. tapi kan mun beakad kaya itu kebanyakan orang banjar, mun umumnya tu kan palingan, “makasih” amun dari urang nang beucap di awal sebelum transaksi tu biasanya tu macam-macam ding ai, ada yang beucap “selitar” ada jua “sebotol”. aku menanggapi orang nang

---

<sup>100</sup>Wawancara dengan Ibu RS (38 tahun) dikios Jalan Mahir Mahar (Sabangau) Palangka Raya, 19 Maret 2019.



beucap seliter tu langsung ku anuakan ai palingan iya jar ku, karena takaran ku ni pas aja pada salitar, tasarah urang nang menyambat nya ai lagi.”

Terjemah:

“Memakai akad seperti pada umumnya, apabila dari saya menyebutkan kata “Jual”, “Jual Seadanya”.dan pembeli pun menjawabnya dengan kata,”Iya tukar” Iya sama-sama”, akad itu kan kebanyakan dipakai oleh orang banjar, kalau umumnya kan “makasih”. Dari konsumen sendiri bermacam-macam ada yang berkata sebotol ada juga yang berkata selitar, dan ada juga yang berkata hanya satu. Langsung saya layani dan saya takrakan saja, cuman saya berakata iya begitu saja. i kan takaran saya pas dari 1 liter. Jadi terserah konsumennya saja mau berkata apa.”<sup>101</sup>

Dari penjelasan beliau dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan akad yang digunakan oleh ibu N, dalam penjualan bahan bakar minyak eceran tersebut menggunakan akad yang memang pada umumnya digunakan dalam jual beli, seperti kata, “Jual, Jual Seadanya, Makasih, Sama-sama”. Beliau mengatakan akad yang seperti itu kebanyakan hanya dipakai oleh orang banjar saja, apabila yang umumnya hanya kata”makasih” Dan apabila dalam praktiknya ketika konsumen ingin membeli kata awal yang diucapkan beragam macam bunyinya seperti, “Sebotol,seliter.” Dan apabila ada yang mengatakan seliter, beliau pun hanya diam saja dan berkata iya, karena tidak ada masalah dalam takaran

---

<sup>101</sup>Wawancara dengan Ibu N (27 tahun) diwarung jalan Cilik Km 18Palangka Raya,19 Maret 2019.



beliau, kembali ke konsumennya saja mau berkata apa yang pasti takaran saya pas seliter .

#### e. Pedagang Kelima

Pelaksanaan akad penjualan Bahan Bakar Minyak Pertalite eceeran di Kota Palangka Raya, berdasarkan wawancara dengan bapak AM adalah sebagai berikut:

“Cara berakadnya akad umum ai, mun aku nang beucap, “Jual lah”, “Jual Seadanya” urang nang menukar tu menyahuti ai jua, “inggih tukar mang, “Inggih sama sama mang” jarang jua pang beakad kaya itu palingan “makasih lah” nah kayaitu ai ding ai. amun dari urang nang beucap di awal sebelum transaksi tu macam-macam ding ai, tapi kabanyakan yang beucap “mang minyak” aku menanggapi orang nang beucap seliter tu palingan oh, iih jar ku,di akhir banar ai ku ucapakan kata “jual seadanya” maksud jual seadanya tu kan seitu pang adanya, kurang kah labih kah seitu pang adanya. Urang gin membalas ai iya jar.”

Terjemah:

“Cara berakadnya seperti pada umumnya, apabila dari saya menyebutkan kata “Jual”, “Jual Seadanya”.dan pembeli pun menjawabnya dengan kata,”Iya tukar” Iya sama-sama. Jarang juga akad seperti itu digunakan kebanyakan hanya mengatakan “makasih” dari konsumen sendiri bermacam-macam ada yang berkata sebotol ada juga yang berkata selitar, tapi kebanyakan hanya berkata,”pak minyak”. Saya sih diam saja, pada saat terkahir saja saya ucapkan kata jual seadanya, maksud kata tersebut kan adalah seberapapun takarannya seperti itulah adanya.”<sup>102</sup>

Dari penjelasan bapak AM dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan akad yang digunakan oleh bapak AM, dalam penjualan bahan bakar minyak eceran tersebut menggunakan akad

<sup>102</sup> Wawancara dengan Bapak AM (40 tahun) dikios Bukit Sua (Rakumpit),Palangka Raya,20 Maret 2019.

yang memang pada umumnya digunakan dalam jual beli, seperti kata, “Jual, Jual Seadanya, Makasih, Sama-sama”. Dan apabila dalam praktiknya ketika konsumen ingin membeli kata awal yang diucapkan beragam macam bunyinya seperti, “Sebotol, seliter, dan satu.” Dan apabila ada yang mengatakan seliter, beliau pun hanya diam saja, akan tetapi pada saat terakhir transaksi barulah beliau berkata “jual seadanya” karena maksud dari kata tersebut adalah seperti itulah adanya, dan juga karena takaran beliau memang kurang dari seliter.

**f. Pedagang Keenam**

Pelaksanaan akad penjualan Bahan Bakar Minyak Pertalite eceeran di Kota Palangka Raya, menurut hasil wawancara dengan Bapak SA adalah sebagai berikut:

“Akadnya yang ku pakai kaya biasa ai ding ai, aku nang beucap, “Jual lah”, “Jual Seadanya” Lalu urang nang menukar tu menyahuti ai jua, “tukar”, “sama sama” nah kayaitu ai ding ai. Wajib pang bagiku mun beakad nih, mun kita sudah meucapakan tu, tasarah urang ai lagi handak menyahuti kah kada kah, tapi kabanyakan manyahuti ja pang. amun dari urang nang menukar beucap di awal sebelum transaksi tu kebanyakan beucap “sebotol” pang. Aku menanggapi orang nang beucap seliter tu palingan oh, iih jar ku, karena takaran ku ni labih aja pada salitar, kecuali kurang pada salitar nah itu bisa ja ku melurusakan dan ku jalasakan bahwa itu tu kada salitar tapi seitu pang adanya, nah itu tadi tu pang maksud “jual seadanya” tu, seitu pang adanya, tapi kan takaran ku ni labih sadikit pada salitar jadi aman ja aku kada papa ja pang rasa ku.”

Terjemah:

“Akadnya yang saya pakai seperti pada umumnya, apabila dari saya menyebutkan kata “Jual”, “Jual Seadanya”.dan

pembeli pun menjawabnya dengan kata, "Iya tukar", "sama-sama". Wajib bagi saya beakad dalam jual beli, apabila kita sudah mengatakan, tergantung dari konsumennya, tapi kebanyakan juga membalas apa yang saya ucapkan tadi. Dari konsumen sendiri Kebanyakan berkata "sebotol". Saya sih diam saja, karena kan takaran saya disini lebih dari 1liter, kecuali takaran saya ini kurang dari seliter, baru saya meluruskan dan menjelaskan bahwa takaran tersebut tidak sampai seliter. Akan tetapi kan takaran saya pas dari 1 liter bahkan lebih, jadi bagi saya tidak apa-apa saja."<sup>103</sup>

Dari penjelasan tersebut di atas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan akad yang digunakan oleh bapak SA dalam penjualan bahan bakar minyak eceran tersebut menggunakan akad yang memang pada umumnya digunakan dalam jual beli, seperti kata, "Jual, Jual Seadanya, Makasih, Sama-sama". Dan apabila dalam praktiknya ketika konsumen ingin membeli kata awal yang diucapkan kebanyakan orang mengatakan "Sebotol" Dan apabila ada yang megatakan seliter, beliau pun hanya diam saja karena tidak ada masalah dalam takaran beliau bahkan lebih dari 1 liter, kecuali ada pengurangan dalam takaran baru beliau akan meluruskan dan menjelaskan kepada konsumen bahwasanya takaran tersebut kurang. Jadi menurut beliau tidak ada permasalahan selagi tidak ada kesalahan atau kejanggalan yang dilakukan.

---

<sup>103</sup>Wawancara dengan Bapak SA (42 tahun) dikios jalan Rta Milono (Jekan Raya), Palangka Raya, 20 Maret 2019.

### g. Pedagang Ketujuh

Pelaksanaan akad penjualan Bahan Bakar Minyak Pertalite eceeran di Kota Palangka Raya, berdasarkan wawancara dengan bapak W adalah sebagai berikut:

“Jarang jarang pang baakad bila baakad gin kaya biasa ai ding ai, kaya itu pang mun aku nang beucap, “Jual lah”, “Jual Seadanya” urang nang menukar tu menyahuti ai jua, “tukar, “sama sama”. amun dari konsumen beucap di awal sebelum manukar tu macam-macam ding ai, ada yang beucap “selitar” ada jua “sebotol”. aku menanggapi orang nang beucap seliter tu ku luruskan ai dengan beucap, “oh sebotol kah” iya jar orang karena mun sduah beucap dan urang menjawab berarti sudah ridho dan saling rela. karena takaran ku ni lebih aja pada salitar, kecuali kurang pada salitar nah itu bisa ja ku meluruskan dan ku jalaskan bahwa itu tu kada salitar tapi seitu pang adanya.”

Terjemah:

“Jarang berakad tapi bila berakad, akadnya pun seperti pada umumnya, apabila dari saya menyebutkan kata “Jual”, “Jual Seadanya”. dan pembeli pun menjawabnya dengan kata, “Iya tukar” Iya sama-sama”. Dari konsumen sendiri bermacam-macam ada yang berkata sebotol ada juga yang berkata selitar, dan ada juga yang berkata hanya satu. Saya mengatakan, “oh sebotol ya” apabila kita sudah berucap dan orang membalasnya berarti sudah atas dasar saling rela dan ridho karena kan takaran saya disini lebih dari 1 liter, kecuali takaran saya ini kurang dari seliter, baru saya meluruskan dan menjelaskan bahwa takaran tersebut tidak sampai seliter. Tapi seperti itulah adanya.”<sup>104</sup>

Dari penjelasan bapak W di atas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan akad yang digunakan oleh bapak W dalam penjualan bahan bakar minyak eceran tersebut jarang menggunakan akad dan apabila berakad beliau pun menggunakan akad yang

<sup>104</sup>Wawancara dengan Bapak W (43 tahun) dikios jalan tangkiling (Bukit Batu), Palangka Raya, 21 Maret 2019.

memang pada umumnya digunakan dalam jual beli, seperti kata, “Jual, Jual Seadanya, Makasih, Sama-sama”. Dan apabila dalam praktiknya ketika konsumen ingin membeli kata awal yang diucapkan beragam macam bunyinya seperti, “sebotol, seliter, dan satu.” Dan apabila ada yang mengatakan seliter, beliau meluruskan dan berkata oh sebotol ya, karena tidak ada masalah dalam takaran beliau bahkan lebih dari 1 liter.

#### **h. Pedagang Kedelapan**

Pelaksanaan akad penjualan Bahan Bakar Minyak Pertalite eceeran di Kota Palangka Raya, menurut hasil wawancara dengan Bapak AR adalah sebagai berikut:

“Beakad tarus ai pang, akadnya tu kaya biasa ai, aku nang beucap, “Jual lah”, “Jual Seadanya” tapi kebanyakan aku beucap ,:jual seadanya pang urang nang menukar tu menyahuti ai jua, “inggih tukar mang, “Inggih sama sama mang” nah kayaitu ai. Amun dari urang nang beucap di awal sebelum transaksi tu macam-macam ding ai, ada yang beucap “selitar” ada jua “sebotol”, tapi kebanyakan sebotol pang. aku menanggapi orang nang beucap seliter tu mang? iya jar ku, karena takaran ku ni labih aja pada salitar, amun kurang pada salitar nah itu bisa ja ku meluruskan bahwa itu tu kada salitar tapi seitu pang adanya.”

Terjemah:

“Berakad terus akadnya seperti pada umumnya, apabila dari saya menyebutkan kata “Jual”, “Jual Seadanya” kebanyakan “jual seadanya” .dan pembeli pun menjawabnya dengan kata,”Iya tukar” Iya sama-sama”, dari konsumen sendiri bermacam-macam ada yang berkata sebotol ada juga yang berkata selitar, kebanyakan berkata sebotol. Saya sih diam saja, paling tidak saya mengatakan,”oh iya” karena kan takaran saya disini lebih dari 1liter, kecuali takaran saya ini kurang dari seliter, baru saya meluruskan dan menjelaskan

bahwa takaran tersebut tidak sampai seliter,tapi seperti itulah adanya.”<sup>105</sup>

Dari penjelasan bapak AR dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan akad yang digunakan oleh bapak AR dalam penjualan bahan bakar minyak eceran tersebut sering menggunakan akad yang memang pada umumnya digunakan dalam jual beli, seperti kata, “jual, jual seadanya, makasih, sama-sama”. Dan apabila dalam praktiknya ketika konsumen ingin membeli kata awal yang diucapkan beragam macam bunyinya seperti, “sebotol,seliter. Dan apabila ada yang megatakan seliter, berkata iya, karena tidak ada masalah dalam takaran beliau bahkan lebih dari 1 liter, kecuali ada pengurangan dalam takaran baru beliau akan meluruskan dan menjelaskan kepada konsumen bahwasanya takaran tersebut kurang.

Selain melakukan wawancara dengan pedangang bahan bakar minyak pertalite eceran pedagang juga melakukan wawancara terhadap beberapa pembeli hal ini peneliti lakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pembeli mengetahui mengenai takaran dan manfaat yang bisa ditimbulkan dengan adanya pedagang bahan bakar minyak pertalite eceran. Adapun beberapa wawancara dengan para pembeli adalah sebagai berikut:

---

<sup>105</sup>Wawancara dengan Bapak AR(40 tahun) dikios jalan Dr. Murjani (Pahandut), Palangka Raya,21 Maret 2019.



#### a. Pembeli Pertama

Penulis melakukan wawancara dengan bapak H usia 37 tahun, pembeli bahan bakar minyak pertalite eceran di kios bapak RR.

Berikut kutipan wawancara dengan bapak H:

“Saya tidak tahu mengenai jumlah pasti bahan bakar minyak yang dijual entah lebih atau kurang dari satu liter, yang saya tahu saya membeli bahan bakar minyak eceran sebanyak satu liter dengan harga sesuai yang disepakati, untuk alasan saya membeli bahan bakar minyak pertalite eceran dikarenakan minyak saya sudah mau habis dan perjalanan menuju Pom Bensin masih jauh takut kalau tidak cukup, kalau masalah akad jual beli selama saya menjadi pembeli masih agak kurang jelas sebagian ada yang bilang jual dan sebagian cuma diam saja jadi saya pun juga diam saja paling bilang terima kasih. Kalo keterangan mengenai jumlah yang dijual hampir gak pernah tuh saya dapat pedagang yang bilang jual seliter, jual sebotol, paling banyak kata yang diucapkan jual seadanya dan saya iyaikan saja”.<sup>106</sup>

Berdasarkan wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa pembeli tidak mengetahui pasti tentang jumlah takaran yang di jual, pembeli hanya faham bahwa yang dia beli adalah sebanyak satu liter. Mengenai kelebihan atau kekurangan pembeli tidak mau ambil pusing yang mereka tahu hanya dapat bahan bakar yang mereka butuhkan sedangkan untuk membeli ke setasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) jaraknya lumayan jauh. Mengenai akad pembeli juga menjelaskan tidak ada akad yang jelas dan menyebutkan tentang takaran yang dijual oleh pedagang akad yang

---

<sup>106</sup>Wawancara dengan Bapak H(45 tahun) dikios Bapak RR. jalan Dr. Murjani (Pahandut), Palangka Raya, 18 Maret 2019.



paling banyak di ucapkan adalah jual seadanya tanpa memberikan keterangan lain.

#### **b. Pembeli Kedua**

Penulis melakukan wawancara dengan bapak B usia 28 tahun, pembeli bahan bakar minyak pertalite eceran di kios bapak SA.

Berikut kutipan wawancara dengan bapak B:

“Saya tidak terlalu tahu mengenai jumlah takaran yang ada dibahan bakar minyak eceran yang dijual karena dari segi takarannya pun menggunakan takaran botol entah apakah lebih atau kurang itu kembali lagi kepedagangnya yang saya tahu saya membeli bahan bakar minyak eceran sebanyak satu liter dengan harga yang disepakati, mengenai alasan saya membeli bahan bakar minyak pertalite eceran dikarenakan kadang kan di pom bensin itu antriannya luar biasa jadi saya malas mengantri terlalu lama terbuang waktu saya jadi saya pilih yang simple nya saja, kalau masalah akad jual beli selama saya menjadi pembeli macam macam bentuk akad yang digunakan sebagian ada yang bilang jual dan sebagian cuma diam saja jadi saya pun juga diam saja paling tidak saya bilang terima kasih. Kalau keterangan mengenai jumlah yang dijual hampir tidak pernah tuh saya dapat pedagang yang berkata jual seliter, jual sebotol, paling banyak kata yang di ucapkan adalah jual seadanya dan saya iyaikan saja. Karena apabila orang awam tidak mengerti apa maksud kata “jual seadanya” padahal maksud kata tersebut adalah seberapaapun jumlah takarannya maka seperti itulah adanya.”<sup>107</sup>

Berdasarkan wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa dan tidak jauh berbeda dari pembeli pertama pembeli tidak mengetahui pasti tentang jumlah takaran yang di jual, pembeli hanya paham bahwa yang dia beli adalah sebanyak satu liter. Mengenai kelebihan atau kekurangan pembeli tidak mau ambil pusing yang

---

<sup>107</sup>Wawancara dengan Bapak B (38 tahun) dikios Bapak SA. jalan Rta Milono (Jekan Raya), Palangka Raya, 20 Maret 2019.

mereka tahu hanya dapat bahan bakar yang mereka butuhkan sedangkan untuk membeli ke setasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) jaraknya lumayan jauh. Mengenai akad pembeli juga menjelaskan tidak ada akad yang jelas dan menyebutkan tentang takaran yang dijual oleh pedagang akad yang paling banyak di ucapkan adalah jual seadanya tanpa memberikan keterangan lain.

### c. Pembeli Ketiga

Penulis melakukan wawancara dengan saudara MA usia 23 tahun, pembeli bahan bakar minyak pertalite eceran di kios bapak W.

Berikut kutipan wawancara dengan saudara MA:

“Tidak tahu, saya tidak tahu mengenai takaran bahan bakar minyak yang dijual, saya kalo beli selalu bilang beli satu liter biasanya saya sambil bertanya berapa satu liternya. kalo masalah kurnag atau lebih itu urusan pedagang yang saya tau saya mau beli satu liter, alas an saya beli eceran karena pomnya agak jauh mas terus biasanya antri tapi kalo pas lewat pom ya saya mampir beli sebenarnya lumayan sih selisihnya, na kalo akad saya sering aja mas dengar pedagan ada bilang jual lah atau jual seadanay, kadang juga cuma diam terus saya bilang makasih udah mas.”<sup>108</sup>

Tidak terlalu banyak yang disampaikan saudara MA karena belia agak tergesa-gesa akan tetapi berdasarkan hasil wawancara dengan saudara MA tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa sama dengan pembeli-pembeli sebelumnya saudara MA juga menyatakan tidak tahu takaran pasti jumlah bahan bakar minyak pertalite yang dijual, saudara MA cuek saja dengan jumlah takaran,

---

<sup>108</sup>Wawancara dengan Saudara MA(23 tahun) dikios Bapak W. jalan Rta Milono (Jekan Raya), Palangka Raya, 20 Maret 2019.

menurutnya kurang atau lebihnya sebuah takaran akan ditanggung penjual baik dosa maupun pahalanya, sedangkan masalah alasan membeli saudara MA menyatakan bahwa jarak antara setasiun pengisian bahan bakar minyak umum jauh dari tempat tinggalnya. Sedangkan masalah akad saudara MA menerangkan sebagian pedagang menggunakan akad dan sebagian yang lain tidak menggunakan akad, akad yang paling banyak di ucapkan pedagang adalah jual lah dan jual seadanya.

### **3. Kedudukan hukum dalam praktik penjualan Bahan Bakar Minyak Pertalite di Kota Palangka Raya menurut Hukum Ekonomi Syariah.**

Di samping melakukan wawancara dan observasi terhadap 8 subjek yang melakukan profesi sebagai Penjual Bahan Bakar Minyak Eceran peneliti juga melakukan wawancara terhadap 3 Responden yaitu 1 orang dari Pihak Pemerintah (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya) dan 2 orang dari MUI (Majelis Ulama Indonesia Kota Palangka Raya). Adapun beberapa responden yang memberikan respon dan masukan dalam penelitian penulis ini diantaranya:

#### **a. Responden Pertama**

Wawancara Inderson Dagon, S.H, 50 Tahun, Suku Dayak, Jabatan Penara Ahli Madya pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya di Kantor Disperindak. Berikut kutipan wawancara dengan bapak Inderson Dagon:

”Sosialisasi memang pernah dilakukan dulu waktu tempo tahun 2000 an awal itu rutin tiap tahun sekali. Kalau seharusnya bukan sosialisasi lagi tapi tindakan langsung bahkan razia untuk menera dan meliat kembali seperti apakah sistem takaran yang mereka gunakan dan sekarang hanya untuk sementara himbauan atau pelayanan yang dilakukan ditempat tertentu dan melakukan himbauan, Dalam praktiknya sistem penjualan bahan bakar minyak eceran di Kota Palangka Raya pada saat ini tidak sesuai dan tidak benar dengan apa yang seharusnya di atur dan ditetapkan oleh pihak kami sebagai pemerintah khususnya dinas perindustrian dan perdagangan Kota Palangka Raya, karena sistem penjualannya menggunakan takaran botol bukan takaran liter yang sebagaimana kami atur di dalam peraturan penjualan bahan bakar minyak eceran tersebut. Kita lihat pada konteks sekarang yang mereka gunakan adalah botol sebagai tempat penyimpanan sekaligus sebagai takaran dalam pejualannya, sementara yang seharusnya atau sesuai dengan aturan yang ada apabila dalam segi penakaran harus menggunakan takaran yang memang pas atau takaran baku sesuai dengan metrologi yang khusus untuk menakar bahan cair seperti corong atau contang yang terbuat dari kaleng yang digunakan oleh pedagang minyak tanah, minyak goreng, dan pedagang bensin atau bahan bakar pada umumnya.“

Dari penjelasan Bapak Dagon dapat diketahui bahwa terkait takaran yang seharusnya digunakan memang sudah ada aturan yang mengaturnya dan termuat dalam Undang- Undang Metrologi dan terkait masalah sosialisasi juga pernah dilakukan, bahkan apabila sekarang bentuknya bukan sosialisasi lagi tetapi penindakan untuk merajia para pedagang bahan bakar minyak eceran yang memang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

## b. Responden Kedua

Wawancara dengan Ustadz Zuhri pada tanggal 28 maret 2019 Pukul: 19.53 WIB di Mesjid Muhammadiyah Palangkaraya.

Berikut kutipan wawancara dengan Ustadz Zuhri:

“Untuk jual beli bahan bakar minyak eceran dengan menggunakan botol diperbolehkan saja, asalkan dalam akad menyebutkan kata sebotol bukan seliter dan ketentuannya akad dalam jual beli tersebut diucapkan diawal sebelum terjadinya transaksi, begitu pula dengan penyebutan kata “Jual Seadanya” bisa diucapkan asalkan di awal transaksi sudah di jelaskan bahwa jumlah takarannya seperti itu adanya maka berlakulah akad “Jual Seadanya” tersebut. Untuk sebagian pedagang yang mengurangi takaran itu tidak diperbolehkan apapun alasannya tidak peduli jauh atau dekat jarak pengambilan bahan bakar tersebut, lebih baik jujur dan katakana sebenarnya bahwa takaran tersebut kurang atau tidak pas satu liter .” Allah sudah jelas melarangnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Alquran, yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ ۱ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ ۲  
وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ ۝ ۳ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ  
مَبْعُوثُونَ ۝ ۴ لِّيَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ ۵ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ ۶

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang disini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.”<sup>109</sup>

Dapat diketahui bahwa beliau mengungkapkan dalam jual beli bahan bakar minyak eceran dengan menggunakan botol diperbolehkan dan tidak ada tantangan asalkan dalam praktiknya

<sup>109</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: PT Senergi Pustaka Indonesia, 2012, h.878

akad dilakukan didepan sebelum bahan bakar minyak tersebut dituangkan dalam tangki minyak, untuk pengurangan takaran beliau menerangkan bahwa tidak diperbolehkan apapun alasannya karena dalam alquran sudah jelas yakni dalam surah Al Mutaafifin ayat 1-6.

### c. Responden Ketiga

Wawancara dengan Ustadz Zainal Arifin pada tanggal 30 maret 2019 Pukul:13.33 WIB di kediaman beliau di jalan Rta Milono Komplek Marina Permai Palangka Raya. Berikut kutipan wawancara dengan Ustadz Zainal Arifin:

“Jual beli bahan bakar minyak eceran tersebut yang menggunakan takaran botol boleh saja, tidak ada masalah selama dalam takarannya tidak ada kekurangan atau kesalahan dalam segi takaran, dan akadnya pun perlu dijelaskan dan diterangkan sesuai dengan takaran tersebut, pada intinya akadnya harus jelas akad itu memang sudah kewajiban dalam jual beli karena sebagai keabsahannya agar dagangan kita menjadi sah dan berkah. Apabila ada pedagang yang terindikasi mengurangi takaran dengan sengajanya ataupun ada lasan apapun yang membuatnya melakukan pengurangan dalam takarannya itu tetap dilarang dan haram hukumnya karena mengurangi takaran sama hukumnya dengan riba memakan hak orang lain.”

Tidak jauh berbeda dengan penjelasan dari Ustadz Zuhri, beliau menerangkan bahwa jual beli bahan bakar minyak eceran menggunakan botol diperbolehkan asalkan disertai dengan akad yang jelas tanpa ada hal yang ditutup-tutupi, begitu juga mengenai akad “Jual Seadanya” beliau menjelaskan bahwa akad tersebut bisa berlaku asalkan kejelasan dalam transaksi jual beli tersebut sudah diterapkan dan ditekankan mengenai takarannya seperti itulah adanya



baik lebih, pas, ataupun kurang dari satu liter maka berlaku lah akad tersebut.

### **C. Analisis Hasil Penelitian**

Pada analisis data hasil penelitian ini peneliti terlebih dahulu memaparkan pelaksanaan penelitian yang diawali dengan survey ke lokasi penelitian dan menentukan subjek yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini dengan kriteria beragama islam dan cakap melakukan perbuatan hukum. Peneliti menentukan kriteria tersebut sebagai dasar bahwa informasi dan data yang di ambil dapat dipertanggung jawabkan. Selanjutnya peneliti melakukan pendekatan kepada setiap subyek yang telah ditentukan sebagai responden sebelum melakukan wawancara agar wawancara dapat berjalan dengan baik dan dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan peneliti. Data hasil wawancara peneliti sajikan berdasarkan hasil wawancara dengan masing-masing responden sesuai dengan pertanyaan yang terlampir. Setelah hasil wawancara tersaji dengan runtut dan teratur maka dilakukanlah analisis hasil penelitian sesuai dengan teori-teori yang ada. Berikut adalah analisis dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan :

- 1. Sistem takaran yang digunakan pedagang dalam jual beli bahan bakar minyak pertalite eceran di Kota Palangka Raya**
  - a. Ditinjau dari Teori Budaya Hukum**



Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalah gunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah polapikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Berdasarkan hasil wawancara kepada para pedagang di peroleh bahwa semua pedagang tidak menggunakan takaran pasti atau takaran baku yang telah ditetapkan pemerintah, melainkan menggunakan botol yang telah diperkirakan bahwa isinya adalah satu liter. Bahkan hasil wawancar pedagang menganggap hal tersebut sudah menjadi budaya atau tradisi dalam proses jual beli bahan bakar minyak eceran hal tersebut sesuai yang disampaikan Ibu N yang menyatakan bahwa jua beli minyak menggunakan botol sudah jadi khalayak umum atau tradisi orang khususnya pedagang eceran. Jadi dengan demikian jual beli bahan bakar minyak pertelite eceran munggunakan botol sebagai takaran dianggap sebagai budaya atai tradisi bagi kalangan pedangang.

Berdasarkan teori di atas dapat kita ketahui bahwa sistem takaran pada perdagangan pertalite eceran di Kota Palangka Raya tidak menggunakan takaran baku yang terstandar yang telah ditetapkan oleh pemerintah melainkan menggunakan takaran botol yang belum diketahui tingkat presisi dan keakuratan takarannya sehingga pada prosesnya, budaya menakar dengan menggunakan botol patut ditinggalkan. Meskipun sebagian dari pedagang berdalih bahwa takaran mereka lebih dari satu liter akan tetapi itu masih belum cukup karena sifat dasar kaca adalah memuai, pemuaian mengakibatkan waktu dalam penakaran bisa mempengaruhi isi dari botol tersebut.

Dalam praktik kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, secara mendasar (*grounded dogmatic*) dimensi kultur seyogiannya mendahului dimensi lainnya, karena dalam dimensi budaya itu tersimpan seperangkat nilai (*value system*). Selanjutnya sistem nilai ini menjadi dasar perumusan kebijakan (*policy*) dan kemudian disusul dengan pembuatan hukum (*law making*) sebagai rambu-rambu yuridis dan *code of conduct* dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, yang diharapkan akan mencerminkan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa yang bersangkutan.

Dari uraian tersebut dapat kita ketahui bahwa dimensi budaya merupakan dasar dari pembentukan hukum itu sendiri,

sehingga budaya yang salah bila dilakukan terus menerus dan tanpa adanya koreksi dari pihak yang berkepentingan maka akan menjadikan budaya tersebut sehingga menimbulkan aturan atau hukum baru. Begitu juga dengan proses penakaran bahan bakar minyak menggunakan botol apabila budaya ini diteruskan maka lama kelamaan akan menjadi aturan yang sulit dirubah dan pada akhirnya akan menjadi hukum yang salah, imbas dari semua itu akan mengakibatkan kepada penjual yang menggunakan takaran yang benar dan terstandar nasional akan disalahkan dan di acuhkan.

#### **b. Ditinjau dari Teori Keadilan**

Keadilan merupakan suatu tindakan atau putusan yang diberikan terhadap suatu hal (baik memenangkan/memberikan dan ataupun menjatuhkan/menolak) sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, adil asal kata nya dari bahasa arab '*adala*, alih bahasa nya adalah lurus. Secara istilah berarti menempatkan sesuatu pada tempat/aturan nya, lawan katanya adalah zalim/aniyaya (meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya). Untuk bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, kita harus tahu aturan-aturan sesuatu itu, tanpa tahu aturan-aturan sesuatu itu bagaimana mungkin seseorang dapat meletakkan sesuatu pada tempatnya.

Berdasarkan teori keadilan ini takaran minyak pedagang eceran menggunakan botol tidak bisa di katakan adil karena dengan

menggunakan takaran tersebut akan terjadi selisih dari takaran baku baik kelebihan atau pun kurang. Dengan demikian pasti akan ada salah satu pihak yang dirugikan mengenai hal tersebut.

Dari wawancara dengan para pembeli rata-rata pembeli menyatakan tidak mengetahui takaran pasti tentang bahan bakar minyak pertalite eceran yang dijual, pembeli tidak mempermasalahkan hal tersebut akan tetapi mengenai konsekuensi dari proses jual beli terkait takaran pembeli mengembalikan kembali kepada penjual apa bila terjadi selisih antara takaran penjualan bahan bakar minyak tersebut baik kurang ataupun lebih. salah satu contohnya adalah yang dikemukakan saudara MA yang menyatakan bahwa tidak tau berapa ukuran dari bahan bakar yang dijual akan tetapi masalah kurang lebihnya menjadi urusan pedagang saudara MA hanya tahu bahwa yang dia ingin beli adalah satu liter. Dengan demikian dapat diartikan bahwa sebenarnya pembeli menginginkan sebuah keadilan dalam proses jual beli tersebut, proses keadilan tersebut adalah mendapatkan informasi pasti mengenai jumlah takaran yang ingin dibeli, dengan tidak adanya informasi yang diberikan oleh pedagang kepada pembeli berarti pedagang sudah melanggar hak yang seharusnya diberikan pedagang kepada pembeli.

Keadilan pada dasarnya terletak pada keseimbangan atau keharmonisan antara penuntutan hak dan menjalankan kewajiban. Berdasarkan segi etis, manusia diharapkan tidak hanya menuntut hak

dan tidak melaksanakan kewajibannya sama sekali. Sikap dan tindakan manusia yang semata-mata hanya menuntut haknya tanpa melaksanakan kewajibannya akan mengarah pada pemerasan atau perbudakan terhadap orang lain.

Keadilan juga dapat berarti suatu tindakan yang tidak berat sebelah atau tidak memihak ke salah satu pihak, memberikan sesuatu kepada orang sesuai dengan hak yang harus diperolehnya. Bertindak secara adil berarti mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan mana yang salah, bertindak jujur dan tepat menurut peraturan dan hukum yang telah ditetapkan serta tidak bertindak sewenang-wenang.

Dengan demikian dapat kita pahami bahwa tradisi takaran menggunakan botol sangart minim sekali tingkat keadilannya, baik untuk pembeli maupun penjual. Bahkan berdasarkan penelitian ini terdapat beberapa pedagang yang sengaja mengurangi takaran hanya demi meraup keuntungan, meskipun dengan alasan yang berbeda-beda dari tempat pengambilan yang jauh sampai sebagai upah lembur dalam menjaga. Keadilan tetaplah keadilan seperti apapun alasan hal tersebut dilakukan maka teetaplah tidak benar karena takaran keridhoan dan keikhlasan seseorang berbeda-beda.

Agama Islam memberikan kebebasan individu kepada umatnya untuk berusaha mencari rezeki, salah satunya menjadikan jual beli sebagai mata pencaharian. Allah SWT menjadikan langit,

bumi, laut dan apa saja yang ada di dunia ini untuk kepentingan dan manfaat manusia. Dalam proses jual beli, umat manusia tidak diperbolehkan melakukan kecurangan demi memperoleh keuntungan yang lebih banyak.

Nabi Muhammad SAW mengenai hal ini bersabda, yang artinya

*”...Tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan kecuali akan ditimpa paceklik, susahnya penghidupan dan kezaliman penguasa atas mereka. Tidaklah mereka menahan zakat (tidak membayarnya) kecuali hujan dari langit akan ditahan dari mereka (hujan tidak turun), dan sekiranya bukan karena hewan-hewan, niscaya manusia tidak akan diberi hujan....”*(Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2/1322) no. 4019, Abu Nu’aim, al-Hakim dan yang lainnya)

Dari sini dapat kita pahami bahwa mengurangi takaran bukanlah menambah keuntungan melainkan malah mendatangkan bencana dan kerugian bagi kita jadi berdasarkan teori keadilan, tradisi takaran bahan bakar minyak menggunakan botol tidak dapat dikatakan benar karena akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, dengan demikian seharusnya sebagai muslim yang beriman kita harus berlomba-lomba mencari rejeki yang halal dan mengharap keridoan-Nya.

### **c. Ditinjau dari Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Sama halnya dalam

jual beli khususnya dalam jual beli bahan bakar minyak eceran harus adanya tujuan-tujuan hukum serta kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis (lisan) dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Dari hasil penelitian mengenai tradisi takaran pedagang pertalite eceran tidak terdapat kepastian hukum yang menyangkut hal tersebut, baik bagi pedagang maupun bagi pembeli sehingga bagi kedua belah pihak tidak ada perlindungan hukum yang mengikat. Dengan demikian apabila dari salah satu pihak ada yang dirugikan maka pihak tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat dijadikan acuan dalam proses hukum selanjutnya. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa yang dirugiakan dari proses jual beli bahan bakar minyak pertalite eceran adalah konsumen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 pasal 4 menyatakan bahwa hak-hak yang dimiliki konsumen diantaranya, perlindungan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak atas



informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya dan hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>110</sup>

Dari pasal 4 undang-undang perlindungan konsumen di atas kita ketahui bahwa tidak ada satu pun hak atas konsumen yang mendapat perlindungan dari proses penjualan bahan bakar minyak pertalite eceran tersebut, karena belum adanya atauran yang jelas yang mengatur hal-hal terkait jual beli bahan bakar minyak pertalite eceran tersebut dan bahkan terjadi pelanggaran pada salah satu poin yaitu mengenai hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Pelanggaran pada poin ini yakni konsumen atau pembeli bahan bakar minyak pertalite eceran tidak pernah

---

<sup>110</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4.

mendapatkan informasi pasti mengenai takaran dari bahan bakar minyak tersebut. Dari hasil penelitian diketahui bahwa sebagian pedagang bahan bakar minyak pertalite eceran sengaja mangurangi takaran demi meraup keuntungan yang lebih besar. Pada Undang-Undang ini tepatnya pada Pasal 7 poin b, penjual berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.<sup>111</sup> Jadi berdasarkan teori perlindungan hukum dalam hal ini perlindungan konsumen kegiatan perdagangan bahan bakar minyak pertalite eceran dengan praktik takaran yang tidak pasti dan tanpa standar baku ini bisa dikatakan melanggar hukum.

#### **d. Ditinjau dari Teori Transparansi**

Transparansi pada prinsipnya adalah prinsip penciptaan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Melalui transparansi ini, pemerintah dan masyarakat saling memberi informasi di mana informasi merupakan suatu kebutuhan penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk saling berpartisipasi dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik.<sup>112</sup>

---

<sup>111</sup>*Ibid* Undang-Undang ....Pasal 7

<sup>112</sup>Akhmad, *analisa komprehensif transparansi dalam Penyelenggaraan pemerintahan daerah* , Ad'ministrare, Vol. 3 No. 2, 2016, h. 32.

Transparansi juga merupakan keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas atas pertanggung jawaban pemerintah dalam sumber daya yang di percayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Secara singkat dapat diartikan bahwa Transparansi adalah memberikan keterbukaan informasi yang menyeluruh kepada pihak-pihak yang membutuhkan.<sup>113</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwa dalam praktik jual beli bahan bakar minyak eceran pertalite dari sisi transparansi bisa dikatakan belum transparan karena tidak ada kejelasan antara takaran yang di gunakan oleh penjual dan dari ketika jelasan takaran tersebut penjual pun tidak memberikan informasi yang seharusnya di peroleh atau menjadi hak pembeli yaitu tentang system takarannya, penjual lebi memilih aman yankni dengan berdiam diri dan pada saat akad dari proses jual beli penjual hanya menggunakan akat “Jual Seadanya”. Sebagai salah satu contohnya adalah pernyataan yang disampaikan oleh saudara MA dan pembeli lain yang menyatakan bahwa mereka tidak pernah mendapatkan informasi pasti mengenai takaran yang penjual gunakan atau nilai dari bahan bakar minyak yang di jual oleh penjual, kebanyakan penjual hanya mengatakan jual

---

<sup>113</sup>Mahlel, Dkk, *Akuntabilitas Dan Transparansi Berbasis Bagi Hasil (Analisis Terhadap Karyawan Toko Di Kota Beureunuen)*, j-ebis vol. 2 no. 2 april 2016, h. 8.

seadanya untuk mencari jalan aman mengenai kekurangan atau kelebihan takaran. Dari sini sudah bisa kita lihat bahwa terdapat indikasi ketidak jujuran mengenai informasi dari nilai takaran bahan bakar minyak pertalite eceran yang di jual oleh penjual, sehingga dapat kita katakan bahwa untuk transparansi dalam jual beli bahan bakar minyak eceran ini belum ada terutama dari pihak penjual.

Dalam Islam sudah benar-benar ditegaskan bahwa ketika kita berdagang, maka harus mengutamakan kejujuran. Jangankan menggunakan bahan-bahan yang mengandung zat berbahaya yang dapat merusak kesehatan, mengurangi takaran timbangan pun telah dilarang dalam agama Islam. Menekankan sikap transparan (keterbukaan/kejujuran) sangat penting untuk diperhatikan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Alquran, yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ ١ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ ٢  
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝ ٣ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ  
مَبْعُوثُونَ ۝ ٤ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ ٥ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ  
٦

Artinya: “kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang disini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.”<sup>114</sup>

<sup>114</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: PT Senergi Pustaka Indonesia, 2012, h. 773

Selain itu transparansi sangat menuntut nilai-nilai kejujuran atas setiap informasi. Sehubungan dengan kejujuran, dalam Al-quran surat Al-Is'ra ayat 35 yaitu:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٣٥

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Dalam ayat lain, Allah SWT juga menegaskan kepada umat Islam untuk tidak sekali-kali mengurangi takaran timbangan. Hal itu sebagaimana Allah tegaskan dalam Alquran

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ٩

Artinya: “Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu” (*QS ar-Rahman [55]: 9*).<sup>115</sup>

Dari ayat di atas jelas bahwa Allah sangat menekankan nilai-nilai transparansi dan kejujuran, umat islam diperintahkan untuk menyempurnakan takaran dan melarang berlaku curang dalam proses menakar untuk menambah keuntungan dengan merugikan orang lain, demikian pula harus berlaku jujur dan adil jika menimbang dengan menggunakan neraca yang benar. Karena sikap dan cara yang demikian itu adalah lebih baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian dengan ayat tersebut Islam mengajarkan kepada umat-Nya agar selalu tidak takut akan

kehilangan rezeki. Bahwa Allah SWT telah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya dan menciptakan manusia dengan segala keunggulannya, termasuk didalamnya, telah diatur kemudahan rezekinya.

Islam juga mengajarkan bahwa setiap umat-Nya untuk selalu tawakal dan menyakini bahwa Allah telah menyediakan fasilitas untuk manusia mencari rezeki sebanyak-banyaknya, untuk kepentingan dunia dan akhirat.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا  
مِنْ رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ١٥

Artinya: “Dialah yang menjadikan Bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Dan Hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan (*Q.S. al-Mulk : 15*).<sup>116</sup>

Dalam ayat ini dijelaskan, kita harus meyakini, Allah SWT merupakan pemilik segala-galanya yang ada di muka bumi. Jangan pernah takut akan kehilangan rezeki dalam berdagang. Utamakan selalu kejujuran untuk kemaslahatan bersama.

Jadi berdasarkan teori transparansi proses jual beli bahan bakar minyak pertalite eceran ini tidak transparan, karena dalam proses penakaran penjual tidak menggunakan standar pasti dalam penakaran, dan pada sebagian pedagang malah dengan sengaja untuk menguranginya, tanpa memberitahukan kepada konsumen

<sup>116</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: PT Senergi Pustaka Indonesia, 2012, h.823.



mengenai hal tersebut. Sedangkan sumber utama transparansi adalah kejujuran dari penyedia barang atau jasa.

**e. Ditinjau Dari Teori *Urf***

Kata '*urf*' berasal dari kata '*arafa, ya 'rifu*' (عرف يعرف) sering diartikan dengan "*al-ma'ruf*" (المعروف) dengan arti: "sesuatu yang dikenal".<sup>117</sup> Kata '*Urf*' secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat".<sup>118</sup> Secara terminologi yaitu kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan atau perbuatan.<sup>119</sup> '*Urf*' ialah apa-apa yang saling diketahui oleh manusia dan diam mempraktekannya, baik perkataan, atau perbuatan, atau meninggalkan.

Berdasarkan penelitian praktik jual beli bahan bakar minyak pertalite eceran yang terjadi di kota Palangka Raya dalam penakaran menggunakan botol sebagai system takaran, bagi para pedagang penakaran menggunakan botol sudah terjadi sejak lama dan sudah menjadi tradisi. Mereka beranggapan bahwa menjual satu liter bahan bakar minyak bisa dikatakan sama dengan menjual satu botol minyak, meskipun pada kenyataannya penakaran menggunakan botol menimbulkan banyak pertanyaan tentang isi dari botol tersebut apakah sudah satu liter atau lebih bahkan kurang, akan tetapi hal ini terus menerus dilakukan karena mereka merasa hal seperti ini benar dan sudah menjadi kebiasaan bagi

<sup>117</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2009, h. 387.

<sup>118</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005, h. 153.

<sup>119</sup> Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, h. 236.



semua pedagang minyak eceran, mereka juga mengatakan bahwa bila menakar menggunakan cuntang minyak membuat pekerjaan mereka semakin lama dengan hasil yang sama.

Anggapan seperti ini membuat nilai-nilai jual beli yang diajarkan Rasulullah mengalami penurunan dan bahkan menghilangkan serta tergantikan dengan kebiasaan berdagang dengan hilangnya nilai transparansi dan kejujuran, pada akhirnya sebagian pedagang dengan sengaja mengurangi isi dari botol untuk meraup keuntungan yang lebih besar.

Bila di pandang dari teori '*Urf*' perdagangan seperti ini dapat dikategorikan sebagai '*urf*' sebab '*urf*' dipandang sebagai sesuatu yang dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan dan perbuatan.<sup>120</sup>

Adapun untuk mengetahui apakah praktik jual beli bahan bakar minyak pertalite eceran ini termasuk *urf ṣaḥīḥ* atau '*urf fāsid*' sehingga dapat atau tidak dijadikan dalil atau tidak sebagai hukum apabila memenuhi syarat berikut:<sup>121</sup>

- 1) '*Urf*' bernilai mashlahat dalam arti dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menghindarkan dari kerusakan atau keburukan.

Pada praktiknya perdagangan bahan bakar minyak pertalite eceran sudah memunculkan unsur kemashlahatan

---

<sup>120</sup>Miftahul Arifin dan Faishal Hag, *Ushul Fiqh Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam...*, h. 146.

<sup>121</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh...*, h.74.

karena dapat membantu para pengendara kendaraan yang memerlukan bahan bakar minyak namun jauh dari pusat pengisian bahan bakar minyak, sesuai yang disampaikan pra pembeli misalnya bapak H yang mengungkapkan alasan mengisi bahan bakar minyak pada pedagang eceran dikarenakan jarak tempat tinggal dan stasiun pengisian bahan bakar minyak terlalu jauh, hal yang tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh bapak SB dan saudara MA yang menyatakan alasan mengisi bahan bakar minyak eceran pada pedagang eceran karena jarak antara tempat tinggal dan stasiun pengisian bahan bakar minyak umum terlalu jauh dan kemungkinan terjadinya antrian distasiun pengisian bahan bakar minyak tersebut juga menjadi alasan bapak SB dan saudara MA untuk mengisi minyak pada pedagang eceran. dari sini dapat kita ketahui bahwa terdapat kemaslahatan dengan adanya pedagang minyak eceran tersebut akan tetapi proses penakaran menggunakan botol sebagai sistem takaran menimbulkan banyak pertanyaan dan mungurangi sisi kemashlahatannya, karena dalam sistem penakaran seperti ini tidak memiliki nilai transparansi dan keadilan bagi pembeli, bahkan merupakan kesempatan bagi sebagian pedagang untuk berlaku curang. Sehingga perdagangan minyak seperti ini tidak memenuhi syarat kemshlahatan.

- 2) 'Urf berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu.

Sebuah kaidah fikih menyatakan:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطَرَّتْ أَوْ غَلَبَتْ

Artinya: “Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus menerus berlaku atau berlaku umum”.<sup>122</sup>

Pada masyarakat suatu perbuatan atau perkataan yang dapat diterima sebagai adat kebiasaan, apabila perbuatan atau perkataan tersebut sering berlaku, atau dengan kata lain sering berlakunya itu sebagai suatu syarat bagi suatu adat dijadikan sebagai dasar hukum.<sup>123</sup>

Seperti penjelasan sebelumnya bahwa perdagangan bahan bakar minyak pertalite eceran dengan botol sebagai takaran terjadi sudah sangat lama dan terjadi terus menerus tanpa ada pertentangan antara hal tersebut dan masyarakat, bahkan cara seperti ini sudah menjadi kebiasaan bagi pedagang minyak eceran di kota Palangka Raya, salah satu pedagang yaitu ibu N menyatakan bahwa jual beli bahan bakar minyak menggunakan botol sebagai takaran ini sudah sejak lama dilakukan dan sudah menjadi tradisi bagi para pedagang minyak eceran di kota Palangka Raya, maka dengan

<sup>122</sup>A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis...*, h. 85.

<sup>123</sup>Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001, h. 102-103.

demikian perdagangan minyak dengan system takaran seperti ini memenuhi syarat '*urf*' dalam poin ini.

- 3) '*Urf*' berlaku sebelum itu, dan tidak '*urf*' yang datang kemudian

Kebiasaan praktik penjualan bahan bakar minyak pertalite eceran dengan botol sebagai takaran sudah terjadi sejak lama dan terus menerus dilakukan serta sudah menjadi kebiasaan bagi para pedagang. Maka praktek penjualan minyak dengan takaran seperti ini bukan lagi fenomena yang baru.

- 4) '*Urf*' tidak bertentangan dengan dalil-dalil *syara*' yang ada

Syarat terakhir ini sudah berulang kali dijelaskan pada poin-poin sebelumnya yakni praktek penjualan bahan bakar minyak dengan botol sebagai takaran banyak sekali melanggar aturan, tidak hanya melanggar hak-hak yang dimiliki pembeli akan tetapi juga melanggar aturan agama seperti mengenai penyempurnaan takaran dan berlaku jujur dalam berniaga.

Pada akhirnya, menurut peneliti berdasarkan syarat-syarat '*urf*' ini maka praktik perdagangan ini masuk ke dalam kategori '*urf fāsid*' dikarenakan perdagangan ini tidak memenuhi beberapa syarat di atas, sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

#### **f. Ditinjau dari Teori Maslahah**

*Maṣlahah* adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.<sup>124</sup>

*Maṣlahah* sebagai *hujjah* (sumber hukum), pada umumnya ulama lebih dahulu meninjaunya dari segi ada atau tidaknya kesaksian syara' (*syahādah asy-syar'i*) terhadap *maṣlahah*, baik kesaksian tersebut bersifat mengakui/melegitimasinya sebagai *maṣlahah* ataupun tidak.

Untuk melihat apakah kemaslahatan perdagangan minyak eceran ini sesuai dengan konsep *maṣlahah* yang dibolehkan atau tidak, maka dari itu dalam mengkaji kemaslahatan ini perlu dilihat apakah kemalahatannya sudah memenuhi syarat-syarat *maṣlahah* atau tidak. Adapun syarat-syarat *maṣlahah*, diantaranya:<sup>125</sup>

1) *Maṣlahah* itu harus hakikat, bukan dugaan

Syarat ini memandang bahwa *maṣlahah* itu harus hakiki yang dapat menarik manfaat untuk dan dapat menolak bahaya dari mereka. Sehingga *maṣlahah-maṣlahah* yang bersifat dugaan tidaklah diperlukan.<sup>126</sup> Syarat ini juga mengisyaratkan bahwa *maṣlahah* tersebut harus dapat diterima

<sup>124</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, h. 345-346.

<sup>125</sup> Chaerul Umam, *Ushul Fiqih 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, h. 137-138.

<sup>126</sup> *Ibid.*, h. 137.

oleh akal sehat.<sup>127</sup> Artinya syarat ini menyatakan bahwa kemaslahatan itu harus pasti.

Perdagangan bahan bakar minyak eceran telah di bahas sebelumnya bahwa perdagangan seperti ini mengandung kemaslahatan bagi para pelakunya. Kemaslahatan itu bersifat pasti, sebab benar-benar dapat memberikan manfaat bagi pelakunya, baik pembeli maupun pedagang selain itu manfaat-manfaat tersebut dapat diterima secara rasional.

2) *Maṣlahah* itu harus bersifat umum dan menyeluruh

Kemaslahatan pada perdagangan bahan bakar minyak pertalite eceran ini sudah dijelaskan bahwa kemaslahatannya bersifat umum, sebab kemaslahatan ini tidak hanya dirasakan oleh satu pihak saja, namun kemaslahatan ini dirasakan oleh seluruh pihak yang melaksanakan proses jual beli bahan bakar minyak pertalite eceran, akan tetapi dalam sisi kerugian pembeli bahan bakar minyak eceran lebih banyak dirugiakan karena banyak hak-hak mereka yang di langgar oleh penjual dan cara jual beli yang diperintahkan oleh Islam juga di tinggalkan oleh penjual, sehingga akad ini tidak sepenuhnya mengandung kemaslahatan yang menyeluruh.

3) *Maṣlahah* harus sesuai dengan *syara'*

---

<sup>127</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2...*, h. 359.

Kemaslahatan perdagangan bahan bakar minyak pertalite eceran jika dikaitkan dengan *syara'* maka perdagangan tersebut bertentangan dengan *syara'*, sebab terkait dengan takaran perdagangan ini tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Al- Hadist. Namun pada faktanya, perdagangan seperti ini sudah memenuhi unsur keridhaan, akan tetapi bagi sebagian pembeli prektek ini mengandung unsur keterpaksaan dan ketidak ikhlasan sehingga akad ini tidak memenuhi syarat kesesuaian dengan *syara'*, tetapi ia bertentangan dengan *syara'*. Sehingga perdagangan bahan bakar minyak pertalite eceran ini bukan termasuk dalam *maṣlahah* yang sesuai dengan hukum Islam.

## **2. Pelaksanaan akad penjualan Bahan Bakar Minyak Pertalite eceeran di Kota Palangka Raya**

### **a. Ditinjau Dari Teori Terbentuknya Akad**

Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad (perjanjian) yang sah dan mengikat haruslah terpenuhi rukun akad dan syarat akad. Syarat akad dibedakan menjadi empat macam, yaitu

#### **1) Syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*)**

Masing-masing rukun (unsur) yang membentuk akad di atas memerlukan syarat-syarat agar unsur itu dapat berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat



dimaksud, rukun akad tidak dapat membentuk akad. Dalam hukum Islam, syarat-syarat dimaksud dinamakan syarat-syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*). Rukun pertama, yaitu harus memenuhi dua syarat terbentuknya akad, yaitu tamyiz dan berbilang (*at-ta'addud*). Rukun kedua, yaitu pernyataan kehendak, harus memenuhi dua syarat juga, yaitu adanya persesuaian ijab dan kabul, dengan kata lain tercapainya kata sepakat, dan kesatuan majelis akad. Rukun ketiga, yaitu objek akad, harus memenuhi tiga syarat, yaitu objek itu harus dapat diserahkan, tertentu atau dapat ditentukan, dan objek itu dapat ditransaksikan. Rukun keempat memerlukan satu syarat, yaitu tidak bertentangan dengan syara.

Syarat-syarat yang terkait dengan rukun akad ini disebut syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*). Jumlahnya seperti terlihat dari apa yang dikemukakan di atas, ada delapan macam, yaitu:

- a) Tamyiz
- b) Berbilang pihak (*at-ta'adud*)
- c) Persesuaian ijab dan kabul (kesepakatan)
- d) Kesatuan majelis akad
- e) Objek akad dapat diserahkan
- f) Objek akad tertentu atau dapat ditentukan

g) Objek akad dapat ditransaksikan (artinya berupa benda bernilai dan dimiliki/*mutaqawwim* dan *mamluk*)

2) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara.

Kedelapan syarat ini beserta rukun akad yang disebutkan terdahulu dinamakan pokok (*al-ashl*). Apabila pokok ini tidak terpenuhi, maka tidak terjadi akad dalam pengertian bahwa akad tidak memiliki wujud yuridis syar'i apa pun. Akad semacam ini disebut akad batil. Ahli-ahli hukum Hanafi mendefinisikan akad batil sebagai akad yang menurut syara tidak sah pokoknya, yaitu tidak terpenuhi rukun dan syarat terbentuknya. Apabila rukun dan syarat terbentuknya akad telah terpenuhi, maka akad sudah terbentuk.

3) Syarat keabsahan akad (*syuruth ash-shihhah*)

Rukun-rukun dan syarat-syarat terbentuknya akad yang disebutkan di atas memerlukan kualitas tambahan sebagai unsur penyempurna. Perlu ditegaskan bahwa dengan memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, suatu akad memang sudah terbentuk dan mempunyai wujud yuridis syar'i, namun belum serta merta sah. Untuk sah nya suatu akad, maka rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut memerlukan unsur-unsur penyempurna yang menjadikan suatu akad sah. Unsur-unsur penyempurna ini disebut syarat keabsahan akad. Syarat

keabsahan ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu syarat-syarat keabsahan umum yang berlaku terhadap semua akad atau paling tidak berlaku untuk kebanyakan akad, dan syarat-syarat keabsahan khusus yang berlaku bagi masing-masing aneka akad khusus.

Rukun pertama, yaitu para pihak, dengan dua syarat terbentuknya, yaitu tamyiz dan terbilang pihak, tidak memerlukan sifat penyempurna. Rukun kedua, yaitu pernyataan kehendak, dengan kedua syaratnya, juga tidak memerlukan sifat penyempurna. Namun menurut jumhur ahli hukum Islam syarat dari rukun kedua ini memerlukan penyempurna, yaitu persetujuan ijab dan kabul itu harus dicapai secara bebas tanpa paksaan, bilamana terjadi dengan paksaan maka akadnya fasid. Akan tetapi, ahli hukum Hanafi, Zulfar berpendapat bahwa bebas dari paksaan bukan syarat keabsahan, melainkan adalah syarat berlakunya akibat hukum (*syart an-nafadz*). Artinya, menurut Zulfar, akad yang dibuat dengan paksaan adalah sah, hanya saja akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan atau masih tergantung (*maukuf*), menunggu ratifikasi dari pihak yang dipaksa apabila paksaan tersebut telah berlalu. Tulisan ini mengikuti pendapat Zulfar, dan pendapat ini pula yang diikuti oleh banyak KUH Perdata yang bersumber syariah.

Rukun ketiga, yaitu objek akad, dengan ketiga syaratnya memerlukan sifat-sifat sebagai unsur penyempurna. Syarat “dapat diserahkan” memerlukan unsur penyempurna, yaitu bahwa penyerahan itu tidak dapat menimbulkan kerugian (*dharar*) dan apabila menimbulkan kerugian, maka akadnya fasid. Syarat “objek harus tertentu” memerlukan kualifikasi penyempurna, yaitu tidak boleh mengandung unsur *gharar* dan apabila mengandung unsur *gharar* maka akadnya menjadi fasid. Begitu pula syarat “objek harus dapat ditransaksikan” memerlukan unsur penyempurna yaitu harus bebas dari syarat fasid dan bagi akad atas beban harus bebas dari riba. Dengan demikian, secara keseluruhan ada empat sebab yang menjadikan fasid suatu akad meskipun telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, yaitu, penyerahan yang menimbulkan kerugian, *gharar*, syarat-syarat fasid dan riba. Bebas dari keempat faktor ini merupakan syarat keabsahan akad.

Akad yang telah memenuhi rukunya, syarat terbentuknya dan syarat keabsahannya dinyatakan sebagai syarat yang sah. Apabila syarat-syarat keabsahan yang empat ini tidak terpenuhi, meskipun rukun dan syarat terbentuknya akad telah terpenuhi, akad tidak sah. Akad ini disebut akad fasid. Menurut ahli-ahli hukum hanafi, akad fasid adalah akad yang menurut syara sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya.

Maksudnya adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya.<sup>128</sup>

Syarat berlakunya akibat hukum (*syuruthan-nafadz*), dan Apabila telah memenuhi rukun-rukunya, syarat-syarat terbentuknya, dan syarat-syarat keabsahannya, maka suatu akad dianggap sah. Akan tetapi, meskipun sudah sah, ada kemungkinan bahwa akibat-akibat hukum akad tersebut belum dapat dilaksanakan. Akad yang belum dilaksanakan akibat hukumnya itu, meskipun sudah sah, disebut akad *maukuf* (terhenti/tergantung).

Untuk dapat melaksanakan akibat hukumnya, akad yang sudah sah itu harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum, yaitu adanya kewenangan sempurna atas objek akad dan adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.

#### 4) Syarat mengikatnya akad (*syuruth al-luzum*)

Pada dasarnya, akad yang telah memenuhi rukunnya, serta syarat terbentuknya, syarat keabsahannya dan syarat berlakunya akibat hukum, yang karena itu akad tersebut sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya adalah mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik kembali

---

<sup>128</sup>Syamsul Anwar, *HUKUM PERJANJIAN SYARIAH Studi tentang teori akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta, Raja Grafindo, 2007, h.95-101.

persetujuannya secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain. Namun ada beberapa akad yang menyimpang dari asas ini dan tidak serta merta mengikat, meskipun rukun dan semua syaratnya telah dipenuhi..

Dalam hal akad, akad-akad yang di dalamnya terdapat salah satu jenis *khiyar* (hak opsi) juga tidak mengikat. Akad itu mengikat apabila di dalamnya tidak ada lagi hak *khiyar*. Bebas dari *khiyar* inilah yang disebut syarat mengikatnya akad (*Syuruth al-luzum*).<sup>129</sup>

Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa syarat-syarat terbentuknya akad pada jual beli bahan bakar miyak pertalite eceran hampir memenuhi semua unsur teori terbentuknya akad akan tetapi mengenai poin tidak bertentangan dengan *Syara*, hal ini tidak terpenuhi karena dalam pelaksanaan akad yang dilakukan oleh penjual terkesan terdapat ketidak jujuran atau bahkan penipuan, akad yang di ucapkan semua pedagang saat ijab kabul yakni “ *jual seadany*” hal ini sesuai yang dinyatakan oleh semua pedagang yang dengan jelas menyatakan bahwa mereka menggunakan akad dengan kalimat “*Jual seadanya*” Pernyataan serupa juga di sampaikan oleh para pembeli yang semuanya menyatakan bahwa rata-rata pedagang

---

<sup>129</sup>*Ibid* 102-105.

menggunakan akad dengan kalimat “*jual seadanya*”. Dari seini sudah jelas bahwa terkesan ada yang ditutupi atau tidak ingin diperlihatkan kepada pembeli, hal tersebut yakni nilai takaran dari bahan bakar minyak tersebut.

Dari hasil penelitian bahkan diperoleh bahwa terdapat pedagang yang sengaja menggunakan akad tersebut untuk menutupi bahwa bahan bakar minyak yang dijual sengaja dikurangi, salah satunya adalah bapak AM yang menyatakan bahwa beliau sengaja mengurangi takaran untuk menambah keuntungan karena jarak pengambilan yang jauh, bapak AM juga menyatakan bahwa dia menggunakan akad “*jual seadanya*” agar terlepas dari unsur kecurangan. Maka berdasarkan teori ini akad tersebut tidak sah atau tidak terbentuk.

#### **d. Ditinjau dari teori transparansi**

Transparansi adalah keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas atas pertanggung jawaban pemerintah dalam sumber daya yang di percayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Dalam Teori transparansi yang terkait dengan penelitian ini yakni bentuk transparan dari



seorang penjual dengan menggunakan tiga asas, yakni asas keadilan, asas keridhaan dan asas kejujuran’.

#### 1) Asas Keadilan

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa setiap orang atau warga negara dihadapan hukum sama. Keasamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada setiap orang porsi sesuai dengan prestasinya. Keadilan komutatif memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya, dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar dan menukar barang dan jasa.<sup>130</sup>

Dalam hal ini seorang penjual harus bersikap adil dalam hal penjualan BBM eceran tersebut khususnya dalam

---

<sup>130</sup>L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, cet.26, 1996, h.11-12

sistem takaran apakah takaran tersebut sudah pas dan sesuai dengan aturan yang ada ataukah sebaliknya. sesuai yang disampaikan para pembeli bahwa tidak ada penjual yang menyatakan atau menjelaskan mengenai takaran yang digunakan. Sehingga dalam proses jual beli bahan bakar minyak pertalite eceran asas keadilan tidak terpenuhi. dengan demikian perlu adanya system takaran yang baku dalam hal takaran agar menimbulkan rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

## 2) Asas Keridhaan

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa dirugikan. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi salah satu pihak merasa rugi, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal. Seperti yang sudah terdapat dalam dalil ushul fiqh

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ الْمُتَعَاقِدِينَ وَنَتِيجَتُهُ مَا إِنْ تَرَ مَاهُ بِاتِّعَا قُ

Artinya “Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlakunya yang dilakukan.”<sup>131</sup>

### 3) Asas Kejujuran

Dalam hal ini seorang penjual harus memiliki sifat keterbukaan dan jujur kepada pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli yang dilakukan tersebut dengan pertimbangan bahwa masing-masing pihak yang terlibat mempunyai hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh. Dalam proses jual beli bahan bakar minyak pertalite eceran asas kejujuran ini hampir bisa dikatakan tidak ada karena semua pedagang tidak pernah mengungkapkan dengan sesungguhnya tentang nilai takaran yang di jualnya. Hal ini dapat kita lihat dari hasil penelitian diatas yang menyatakan bahwa semua pembeli tidak pernah mendapat informasi dari penjual mengenai takaran atau jumlah minyak yang di jual. Dengan demikian untuk asas kejujuran pada proses jual beli bahan bakar minyak pertalite eceran di Kota Palangka Raya tidak terpenuhi.

Dari paparan tentang pengertian dan asas-asas transparansi di atas dapat kita simpulkan bahwa akad dalam

---

<sup>131</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, H.,23

proses jual beli bahan bakar minyak pertalite tidak transparan karena dalam pelaksanaan akad seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat unsur yang sengaja ditutupi yakni tentang kepastian takaran. Hal tersebut menggugurkan asas keadilan, kejujuran dan keridhaan, karena dalam akad tersebut keadilan untuk mendapatkan informasi yang sesungguhnya dari pedagang tidak terpenuhi, kemudian kejujuran sama halnya dengan keadilan maka kejujuran tentang takaran yang seharusnya di berikan oleh pedagang pun tidak dipenuhi, jika kedua asas tersebut tidak terpenuhi maka sudah jelaslah bahwa keridhaan dari pembeli pun juga tidak akan terpenuhi.

### **3. Kedudukan hukum dalam praktik penjualan Bahan Bakar Minyak Pertalite di Kota Palangka Raya.**

#### **a. Menurut Al-Quran dan Al-Hadist**

##### **1) Al-Quran**

Mengenai pandangan jual beli bahan bakar minyak pertalite eceran yang terjadi di Kota Palangka Raya dengan system takaran menggunakan botol telah di jelaskan diatas bahwa agama islam sudah benar-benar menegaskan bahwa ketika kita berdagang, maka harus mengutamakan kejujuran. Jangankan menggunakan bahan-bahan yang mengandung zat berbahaya yang dapat merusak kesehatan, juga jangan lah

mengurangi takaran dan timbangan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Alquran, yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ ١ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ ٢ وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ ۝ ٣ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ۝ ٤ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ ٥ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ ٦

Artinya: “kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang disini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.”<sup>132</sup>

Sehubungan dengan kejujuran, dalam Al-quran surat Al-Is’ra ayat 35 Allah SWT menyatakan:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝ ٣٥

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>133</sup>

Dalam ayat lain, Allah SWT juga menegaskan kepada umat Islam untuk tidak sekali-kali mengurangi takaran timbangan. Hal itu sebagaimana Allah tegaskan dalam Alquran

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۝ ٩

<sup>132</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: PT Senergi Pustaka Indonesia, 2012, h.878

<sup>133</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: PT Senergi Pustaka Indonesia, 2012, h. 389.

Artinya: “Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu” (*QS ar-Rahman [55]: 9*).<sup>134</sup>

Dari ayat di atas jelas bahwa Allah sangat menekankan nilai-nilai kejujuran, umat islam diperintahkan untuk menyempurnakan takaran dan melarang berlaku curang dalam proses menakar untuk menambah keuntungan dengan merugikan orang lain, demikian pula harus berlaku jujur dan adil jika menimbang dengan menggunakan neraca yang benar. Karena sikap dan cara yang demikian itu adalah lebih baik di dunia maupun di akhirat.

Dengan demikian dengan ayat tersebut Islam mengajarkan kepada umat-Nya agar selalu tidak takut akan kehilangan rezeki. Bahwa Allah SWT telah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya dan menciptakan manusia dengan segala keunggulannya, termasuk didalamnya, telah diatur kemudahan rezekinya.

Jadi berdasarkan uraian tersebut proses jual beli bahan bakar minyak pertalite eceran yang diterapkan oleh pedagang eceran dikota Palangka Raya tidak di perbolehkan oleh Al-Quran, karena di dalamnya terdapat beberapa aspek yang dilarang oleh Al-Quran diantaranya tidak ada nilai kejujuran,

---

<sup>134</sup>KementrianAgama RI,*Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta:PT Senergi Pustaka Indonesia, 2012, h. 773.

keterbukaan, dan terdapat unsur mengurangi takaran, karena kebanyakan dari pedagang tidak dengan sertanerta mengatakan dengan sesungguhnya berapa ukuran pasti yang terdapat pada botol sedangkan konsumen beranggapan bahwa yang mereka beli merupakan bahan bakar minyak sebanyak satu liter

## 2) Berdasarkan Al-Hadist

Sama halnya dengan menurut Al-Quran bahwa jual beli bahan bakar minyak pertalite eceran di kota Palangka Raya dengan menggunakan takaran botol tidak diperbolehkan atau dilarang dalam hal ini bagi pedagang yang mengurangi takaran pada botol. Rasulullah SAW mnjelaskan dalam salah satu hadistnya yang artinya:

“ Tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan kecuali akan ditimpa paceklik, susahnya penghidupan dan kezaliman penguasa atas mereka. Tidaklah mereka menahan zakat (tidak membayarnya) kecuali hujan dari langit akan ditahan dari mereka (hujan tidak turun), dan sekiranya bukan karena hewan-hewan, niscaya manusia tidak akan diberi hujan....”<sup>135</sup>

Dari hadis tersebut sudahlah jelas bahwa praktek mengurangi takaran sangat dilarang dan konsekuensi yang akan ditimpa oleh pelakunya sangatlah menyakitkan. Maka dri itu bagi umat islam hedaklah jangan sekali-kali melakukan praktik pengurangan takaran apapun alasanya karena sungguh hal tersebut sangat dibenci oleh Allah SWT.

---

<sup>135</sup>Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2/1322) no. 4019,



### 3) Pandangan Ulama Kota Palangka Raya

Menurut pandangan ulama kota Palangka Raya bagi pedagang bahan bakar minyak eceran dengan menggunakan botol di perbolehkan asalkan akad dilakukan di depan dan akad menyebutkan kata botol bukan liter akan tetapi kasus pengurangan takaran bagi pedagang yang beralasan mengurangi takaran karena jarak yang jauh dalam pengambilan bahan bakar tersebut, ulama kota Palangka Raya menyatakan apapun alasannya tidak diperbolehkan karena didalamnya terdapat unsur yang dilarang oleh Allah. Ulama kota Palangka Raya juga menjelaskan bahwa boleh menggunakan akad jual seadanya asalkan bahan bakar belum dimasukan kedalam tangki kendaraan, karena jika bahan bakar sudah dimasukan maka pembeli mau tidak mau akan menyepakati akad dan pada akad yang seperti ini tidak sah karena terdapat unsur keterpaksaan didalamnya.

Untuk pengurangan takaran ulama kota PALANGKA RAYA berpegang pada firman Allah SWT dalam Alquran, yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ ۱ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ ۲  
وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝ ۳ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ  
مَبْعُوثُونَ ۝ ۴ لِّيَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ ۵ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ  
۶

Artinya: “kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari

orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang disini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.”

Dalam ayat ini Allah memulai surat dengan suatu ancaman bagi orang-orang yang curang dalam timbangan (*al-muthaffifin*) dengan kalimat “wail” artinya celakalah, suatu indikasi bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih . Siapakah *al-muthaffifin* dan mengapa diancam demikian? Mereka adalah orang-orang yang jika menerima takaran mereka minta ditambah dan jika mereka menimbang atau menakar mereka mengurangi. Merekalah orang-orang yang curang dalam jual beli, mereka tidak beriman dengan adanya hari kiamat, hari kebangkitan, hari yang sangat besar, hari pertanggungjawaban atas apa yang diperbuat.

#### 4) Berdasarkan Dinas Perdagangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2018 pasal 1 tentang metrologi legal menyatakan bahwa Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.<sup>136</sup> Dalam pengukuran bahan bakar cair dimaksud dalam hal ini adalah bahan bakar minyak pertalite eceran ukuran standar yang telah disahkan oleh direktorat metrologi yaitu takaran kaleng yang

---

<sup>136</sup> Perdagangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2018 Pasal 1

dibuat dari bahan kaleng (tinplate) dengan ketebalan tertentu yang dibentuk sedemikian rupa sehingga mempunyai penampang bentuk lingkaran dan panjang garis tengah lingkaran mempunyai garis yang sama tinggi dalam takarannya.<sup>137</sup>

Mengacu pada hal tersebut praktik jual beli bahan bakar minyak pertalite eceran menggunakan botol sebagai sistem takaran tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian bisa dikatakan paraktik jual beli yang seperti ini bisa dikatakan melanggar hukum, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2018 pasal 13 yang menyatakan Setiap orang perorangan, produsen atau importir pemilik UTP yang melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang metrologi legal.<sup>138</sup>

Jadi berdasarkan analisis antara hasil penelitian dan peraturan pemerintah tersebut maka praktik jual beli bahan bakar minyak pertalite eceran itu salah dan melanggar hukum.

---

<sup>137</sup> Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Tentang Metrologi Legal, h. 8

<sup>138</sup> Perdagangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2018 Pasal 3

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Sistem takaran yang digunakan oleh Pedagang Bahan Bakar Minyak Peralite eceran di Kota Palangka Raya adalah menggunakan botol tidak menggunakan takaran baku atau takaran yang telah ditetapkan pemerintah
2. Pelaksanaan akad penjualan Bahan Bakar Minyak Peralite eceran di Kota Palangka Raya belum jelas karena hanya sebagian pedagang dalam penelitian ini yang menggunakan akad dalam proses jual beli, akad yang sering digunakan oleh para pedagang adalah akad dengan kalimat “Jual Seadanya.
3. Kedudukan hukum dalam praktik jual beli bahan bakar minyak peralite eceran di Kota Palangka Raya ditinjau dari teori budaya hukum, teori perlindungan hukum, teori keadilan dan teori transparansi praktek jual beli seperti ini patut ditinggalkan karena termasuk budaya yang tidak benar, tidak mengandung keadilan dan tidak terdapat transparansi atau keterbukaan serta tidak memiliki kepastian hukum pada proses jual belinya, sedangkan ditinjau dari sisi ‘*Urf*’ praktek jual beli seperti ini termasuk kategori ‘*urf fāsid*’, kemudian ditinjau dari sisi masalah belum terbentuk masalah, selain itu ditinjau dari Al-Quran dan Hadist praktek jual beli seperti ini juga dilarang karena bertentangan dengan aturan dan syariat islam. Menurut pandangan ulama kota Palangka Raya praktik jual

beli seperti ini diperbolehkan asalkan akadnya jelas dan dilakukan diawal serta menyebutkan nilai takarannya, sedangkan dinas Perindustrian dan perdagangan menyatakan praktek jual beli seperti ini melanggar hukum karena tidak sesuai dengan Undang-undang mengenai metrologi legal yang terkait masalah aturan dalam segi takaran.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh maka saran dari penelitian ini adalah:

1. Bagi para pedagang bahan bakar miyak pertalite eceran hendaknya menggunakan takaran baku yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam proses penakaran, terlepas dari susah ataupun lambatnya pekerjaan sudah menjadi resiko dari sebuah pekerjaan yang harus diterima penjual.
2. Untuk akad dalam jual beli bahan bakar miyak pertalite eceran hendaknya di ucapkan dengan jelas dan disertai informasi pasti engenai nilai takaran yang dijual serta hendaknya akad dilaksanakan di depan proses jual beli.
3. Bagi dinas terkait dalam hal ini Disperindag agar sudi kiranya menetapkan aturan-atauran pasti mengenai system takaran dan melakukan tindakan tegas bagi para pelanggar terutama pedagan yang mengurangi takaran agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dari proses jual beli seperti ini serta memberikan sosialisasi secara rutin terutama bagi pedagang-pedagang di pedalaman.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, cet. ke-2, 2011.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Uşul al-Fiqh*, diterjemahkan oleh Faiz el Muttaqin
- Abdulkadi Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 2004.
- Ahmad mustafa al maragi .1993 .*Terjemah Tafsir Al-Maraghi 19*. TOHA PUTRA: SEMARANG
- Akid* adalah subjek/ Penjual atau pembeli yang terlibat dalam suatu transaksi
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Asep Subhi Dan Ahmad Taufik. 2004. *101 Dosa-dosa Besar*. Jakarta: Qultum Media.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 1989.
- Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008.
- Ghufron A. Mas'adi, *FIQH MUAMALAH KONTEKSTUAL*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2002.
- Fachruddin, *Ensiklopediaal-Qur'an*, Cet. 2 ( Jakarta: Rineka Cipta, 1992).
- Zainuddin Ali, *metode Penelitian Hukum*, cet. 6, Jakarta; Sinar Grafika, 2015,
- Hendi Suhendi, *FiqhMuamalah*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002).
- Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta, 2008. Hal. 224.
- judul "*Ilmu Uşul Fikih: Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, cet. ke-9, 1977.



- L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, cet.26, 1996.
- Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- M.Nasir, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta; PT. Hanindita offset, 1983.
- Muhammad Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam dalam Perkembangan* (Bandung: Mandar Maju, 2002).
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta; Granit, 2004.
- Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014
- Sapiudin Shadiq, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Kencana, cet. Ke-1, 2011.
- Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, cet. ke-2, 2008 Sayyid Sabiq, *Fiqih sunnah*,
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; Universitas Indonesia, 1986,
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, , Bandung: Alfabeta, 2010
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suharsimi arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, ed. Revisi,. Jakarta, Rineka Cipta, 2002.
- Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta Timur, Pustaka Al-Kausar, 2004.
- Syamsul Anwar, *HUKUM PERJANJIAN SYARIAH Studi tentang teori akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta, Raja Grafindo, 2007



Tim Permata Press, *Burgelijk Wetboek, KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA*, PERMARA PRESS, 2010.

#### **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Perdagangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2018  
Pasal 1

Undang-Undang Perdagangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2018  
Pasal 7

Undang-Undang Perdagangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2018  
Pasal 3

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4

#### **C. Jurnal**

Akhmad, *analisa komprehensif transparansi dalam Penyelenggaraan pemerintahan daerah*, Ad'ministrare, Vol. 3 No. 2, 2016

Mahlel, Dkk, *Akuntabilitas Dan Transparansi Berbasis Bagi Hasil (Analisis Terhadap Karyawan Toko Di Kota Beureunuen)*, j-ebis vol. 2 no. 2 april 2016

#### **D. Internet**

<https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raya>

<https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/geografis/>

<http://beautypalangkarayacity.blogspot.co.id/2016/05/demografi-kota-palangka-raya-terdiri.html>